Minan Jauhari-Muhibbin-Kun Wazis-Sofyan Hadi

Jurnalisme Pesantren

Perlawanan Alternatif Kaum Santri Terhadap Hegemoni Media Mainstream

PUSTAKA PELAJAR

IJP
IAIN Jember Press

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNALISME PESANTREN

Perlawanan Alternatif Kaum Santri Terhadap Hegemoni Media Mainstream

JURNALISME PESANTREN

Perlawanan Alternatif Kaum Santri Terhadap Hegemoni Media Mainstream

Minan Jauhari, S.Sos.I., M.Si
Muhibbin, S.Ag., M.Si
Kun Wazis, M.I.Kom
Dr. Sofyan Hadi, S.Sos., M.Pd

Pengantar Penulis

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

A*lhamdulillah,* dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT., kendati dengan format yang sangat sederhana, buku tentang "JURNALISME PESANTREN: Perlawanan Alternatif Komunitas Santri Terhadap Hegemoni Media *Mainstream*" ini dapat terselesaikan.

Buku ini secara detail berupaya membahas tentang jurnalisme pesantren, sebagai harapan konsep yang telah disusun dalam buku ini bisa menjadi bahan acuan dan bacaan bagi masyarakat terutama bagi kalangan pesantren

yang berkeinginan untuk menjadikan jurnalisme pesantren sebagai salah satu alternatif dalam rangka kegiatan dakwah Islam, karenanya tim penulis juga melengkapi dengan hasil pengabdian yang pernah dilakukan di Pesantren Miftahul Ulum Suren Kabupaten Jember. Mudah-mudahan karya yang sederhana ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. *Amin.*

Diketahui bahwa fenomena kebebasan media massa dalam ruang publik pada saat ini setidaknya juga dapat dipandang dari beberapa munculnya banyak kasus ditengah masyarakat, seperti radikalisme, kriminalitas, pornografi dan pemberitaan yang provokatif yang dihadirkan oleh media massa. bahkan kasus situs-situs yang diduga bermuatan isu radikalisme belum lama ini juga mewarnai munculnya persoalan baru dalam kehidupan bermasyarakat, sebab situs-situs yang diduga bermuatan pada isu radikalisme ini dinilai bisa mengancam kesatuan masyarakat Indonesia, meskipun tindakan pemblokiran oleh pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi terhadap situs yang diduga bermuatan isu radikalisme ini juga memicu controversi ditengah-tengah masyarakat.

Ragam problem realitas ini hanyalah segelintir kasus bagaimana media massa/pers Indonesia tak jarang telah melanggar dan melangkahi UU No. 40 Tahun 1999. Seharusnya, pasca reformasi yang ditandai dengan iklim kebebasan dan independensi pers, media massa/pers harus mampu menjadi salah satu pilar demokrasi bagi masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan tiga elemen dasar pers, yakni integritas intelektual, etik, moral dan

religius. Karena ketiga aspek inilah yang diyakini mampu menjadi kontrol internal bagi pers itu sendiri.

Karenanya, sebagai upaya untuk bisa terlibat sehingga dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam menghadapi problem media massa ini, sebagai kalangan akademisi yang sedang konsen mengembangkan ilmu Dakwah di lembaga PTKIN, menyusun buku tentang "JURNALISME PESANTREN Perlawanan Alternatif Komunitas Santri Terhadap Hegemoni Media *Mainstream*", karya ini merupakan tindak lanjut sebagai publikasi ilmiah atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat terkait penguatan dakwah melalui jurnalisme warga (Citizen Jurnalism) dengan basis santri sebagaimana diselenggarakan oleh direktoprat pendidikan tinggi Islam. Harapannya karya buku ini dapat menjadi tawaran alternative konsep yang sangat positif menghadapi berbagai problem media massa pada masa kini yang dinilai bisa mengancam masa depan bangsa. Selain itu upaya ini juga bisa diarahkan untuk kepentingan Dakwah Islam sebagaimana misi PTKIN.

Sesungguhnya diketahui bahwa pesantren merupakan pusat pendidikan agama berbasis masyarakat yang sejak lama ada di Indonesia. Sebagai pusat penggemblengan ilmu-ilmu agama, tentunya pesantren selalu mengajarkan kebaikan sesuai dengan tuntunan agama. Tak terkecuali tentang sopan santun dan ajaran tentang larangan membicarakan aib orang lain. Karenanya, menulis pun sedikit banyak telah menjadi tradisi intelektual pesantren dalam pengembangan ilmu-ilmu agama. Menilik potensi ini, tentunya akan sangat mudah apabila jurnalisme warga

berbasis santri bisa berkembang dan menjadi sebuah kecenderungan yang tak terelakkan dilingkungan pondok pesantren.

Kami menyadari, penyelesaian karya ini atas dukungan dari banyak pihak. tim penyusun menyampaikan terima kasih, semoga partisipasinya akan dinilai sebagai amal sholeh, dan *jazakumullah khairan katsira*. Namun demikian, nama-nama berikut, perlu kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, khususnya kepada:

Pertama, yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta yang telah memberikan dana pengabdian masyarakat berbasis Ilmu Dakwah (PM-D) ini. Fasilitasi dana yang diberikan ini telah memberikan spirit dan energi tersendiri sehingga sangat memperlancar aktivitas pengabdian. Terima kasih yang sama juga disampaikan kepada Direktur DIKTIS, Kepala Subdit dan Kepala Seksi Penelitian Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Jakarta beserta jajaran-nya, yang telah membantu memberikan dukungan moral, substansi dan teknis guna memperlancar proses mulai awal kegiatan sampai dengan pelaporan penelitian.

Kedua, yang terhormat kepada para *stake holder* dan tokoh masyarakat yang berada di Jember khususnya para jurnalis dari radar jember (jawa pos grup) serta mitra dampingan yakni para santri pesantren Miftahul Ulum Suren Ledok Ombo Jember yang telah banyak melakukan shering dan partisipasinya sehingga program dampingan dan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan

baik.

Keempat, yang terhormat Rektor IAIN Jember, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ketua LP2M beserta seluruh staf dan para dosen yang telah membantu mulai dari persiapan pengabdian ini berupa fasilitas seminar proposal sampai seminar hasil sebelum laporan ini disusun. Bantuan yang telah diberikannya, bagi kami merupakan dukungan moril yang luar biasa, khususnya menyangkut kontribusi pemikirannya, referensinya saat seminar proposal maupun seminar hasil di kampus IAIN Jember.

Sekali lagi, kepada semuanya disampaikan terima kasih, semoga amal baiknya diterima oleh Allah dan mendapatkan balasan yang setimpal disisi-Nya. Akhirnya, kepada Allah SWT jualah semuanya kami serahkan, dan semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua. SELAMAT MEMBACA!!!

Jember, Awal Juni 2016

Tim Penyusun

Sambutan
Rektor IAIN Jember

Sejatinya, perguruan tinggi bukan sekedar lembaga pelayanan pendidikan dan pengajaran, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. IAIN Jember sebagai salah satu pusat kajian berbagai disiplin ilmu kesilaman, selalu dituntut terus berupaya menghidupkan budaya akademis yang berkualitas bagi civitas akademikanya, terutama bagi para dosen dengan beragam latar belakang kompetensi yang dimiliki.

setidaknya, ada dua parameter untuk melihat kualitas dosen. *Pertama,* produktivitas karya-karya ilmiah yang dihasilkan sesuai dengan latar belakang kompetensi

keilmuan yang dimiliki. *Kedua,* apakah karya-karya tersebut mampu memberi pencerahan kepada publik--khususnya kepada para mahasiswa--, yang memuat ide generik, konsep cemerlang atau teori baru. Maka kehadiran buku ilmiah dalam segala jenisnya bagi dosen merupakan sebuah keniscayaan.

Buku yang ditulis oleh tim penyusun yaitu Saudara Minan Jauhari, M.Si., Muhibbin, S.Ag., M.Si, Kun Wazis, M.I.Kom, dan Dr. Sofyan Hadi, S.Sos.I., M.Pd.I ini merupakan gambaran tentang Jurnalisme Pesantren (Perlawanan alternative kaum santri terhadap hegemoni media *mainstream*). Mengingat pentingnya wawasan dan pengetahuan tentang Jurnalisme Pesantren, tentu saja karya buku ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan/atau bagi dunia akademik.

Terbitnya buku melalui Program Publikasi Ilmiah ini diorientasikan untuk meningkatkan iklim akademis di tengah-tengah tantangan besar tuntutan publik yang menginginkan "referensi intelektual" dalam menyikapi beragam problematika kehidupan masyarakat di masa-masa mendatang.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh warga kampus untuk memanfaatkan program publikasi ilmiah ini sebagai pintu kreatifitas yang tiada henti dalam mengalirkan gagasan, pemikiran, dan ide-ide segar dan mencerdaskan untuk ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan peradaban bangsa.

Akhir kata, inilah karya yang bisa disodorkan kepada masyarakat luas yang membaca buku ini sebagai bahan

referensi, disamping literatur lain yang bersaing secara kompetitif dan alam yang semakin mengglobal ini. Selamat berkarya.

Jember, Medio September 2016
Rektor IAIN Jember

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM

Daftar Isi

Bab I
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti media massa, menyebabkan terjadi perubahan secara cepat dimana-mana. Media massa sedikit demi sedikit membawa masuk masyarakat ke suatu pola budaya yang baru dan mulai menentukan pola pikir serta budaya perilaku masyarakat. Tanpa disadari media massa telah ikut mengatur jadwal hidup serta menciptakan sejumlah kebutuhan. Bahkan keberadaaan media massa dalam menyaji-kan informasi cenderung memicu perubahan serta banyak membawa pengaruh pada penetapan pola hidup masyarakat.

Beragam informasi yang disajikan oleh media massa dinilai dapat memberi pengaruh yang berwujud positif dan negatif. Secara perlahan-lahan namun efektif, media membentuk pandangan masyarakat terhadap bagaimana seseorang melihat pribadinya dan bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan dunia sehari-hari. Media memperlihatkan pada masyarakat bagaimana standar hidup layak bagi seorang manusia, sehingga secara tidak langsung menyebabkan masyarakat menilai apakah lingkungan mereka sudah layak atau apakah ia telah memenuhi standar tersebut dan gambaran ini banyak dipengaruhi dari apa yang di lihat, didengar dan dibaca dari media.

Disisi yang lain, fenomena kebebasan media massa atau sering disebut dengan pers dalam ruang publik pada saat ini setidaknya juga dapat dipandang dari beberapamunculnya banyak kasus ditengah masyarakat, seperti radikalisme, kriminalitas, pornografi dan pemberitaan yang provokatif yang dihadirkan oleh media massa. bahkan kasus situs-situs yang diduga bermuatan isu radikalisme belum lama ini juga mewarnai munculnya persoalan baru dalam kehidupan bermasyarakat, sebab situs-situs yang diduga bermuatan pada isu radikalisme ini dinilai bisa mengancam kesatuan masyarakat Indonesia, meskipun tindakan pemblokiran oleh pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi terhadap situs yang diduga bermuatan isu radikalisme ini juga memicu kontroversi ditengah-tengah masyarakat[1].

---

[1] sederet kasus pornografi dinilai juga masih mewarnai wajah media-media massa saat ini, persoalan lain yang juga menjadi keprihatinan adalah banyaknya pemberitaan dengan nuansa provokatif juga dinilai begitu mudahnya muncul diruang public.

Problem realitas ini mempertegas bagaimana media massa/pers Indonesia tak jarang telah melanggar dan melangkahi UU No. 40 Tahun 1999. Seharusnya, pasca reformasi yang ditandai dengan iklim kebebasan dan independensi pers, media massa/pers harus mampu menjadi salah satu pilar demokrasi bagi masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan tiga elemen dasar pers, yakni integritas intelektual, etik, moral dan religius. Karena ketiga aspek inilah yang diyakini mampu menjadi kontrol internal bagi pers itu sendiri.

B. Pesantren dan Independensi Media Mainstream

Terselesaikannya buku tentang Jurnalisme Pesantren; Perlawanan Alternatif terhadap Media Mainstream ini terinspirasi dari hasil Program pengabdian masyarakat tentang penguatan jurnalisme warga (Citizen Jurnalism) berbasis santri yang dilaksanakan oleh Tim Penulis sebelumnya, sehingga hasil pengabdian ini memberikan penegasan bahwa keberadaan pesantren menjadi posisi strategis bahkan dapat menjadi alternatif konsep yang sangat positif untuk menghadapi munculnya realitas problem media massa yang dinilai bisa mengancam masa depan bangsa. Selain itu upaya ini juga bisa diarahkan untuk kepentingan Dakwah Islam sebagaimana misi PTKIN.

Dalam pandangan mazhab kritis[2], dipertegas bahwa media massa selalu dirasakan hanya sebagai alat yang "*powerfull*" dan ada ideologi dominan di dalamnya. Hal ini yang disebut oleh para penggiat *Cultural studies* sebagai

---

[2] terutama dalam studi-studi yang dikembangkan oleh *Centre for Contemporary Cultural studies, Birmingham University*.

hegemoni media. Teori hegemoni ini dicetuskan oleh Gramsci[3] yang merujuk pada kekuasaan dan praktis. Hegemoni merujuk pada upaya pelanggengan kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok yang berkuasa. Di sini, institusi media memberikan sebuah fungsi hegemoni yang secara terus menerus memproduksi sebuah ideologi yang kohesif (ideologi yang meresap), satu perangkat nilai-nilai *common-sense* dan norma norma yang memproduksi dan mengesahkan dominasi struktur sosial tertentu, yang mana kelas-kelas subordinasi berpartisipasi di dalam dominasi mereka itu. Bahkan lebih lanjut, Gitlin mendefenisikan hegemoni sebagai "rekayasa sistematik" kepatuhan massa untuk memapankan kekuasaan kelompok yang berkuasa. Stuart Hall berpendapat Media massa cenderung mengukuhkan ideologi dominan untuk menancapkan kuku kekuasaannya melalui hegemoni.

Seiring dengan keberadaan media massa sebagaimana pandangan madzhab kritis, membuat pesantren sebagai bagian dari elemen sosial harus terpinggirkan ditengah perkembangan teknologi informasi ini. Meski demikian parktik-praktik jurnalisme pesantren bisa menjadi alternatif yang sangat positif. Selanjutnya jurnalisme pesantren ini dapat menjadi alat perlawanan kepada media media massa yang (kurang) berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas. Sebagaimana diketahui bahwa pesantren merupakan pusat pendidikan agama berbasis masyarakat yang sejak lama ada di Indonesia. Tentunya selain menjadi media edukasi sosial juga berfungsi sebagai media dalam membangu relasi demi pelaksanaan Dakwah Islam.

---

[3] Nina Widyawati, *Etnisitas dan Agama sebagai Isu Politik,* 2014, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor. Hal. 60-61

Berdasarkan catatan Kun Wazis dalam risetnya tentang Konstruksi Realitas Pesantren di Media Massa: Analisis Framing Berita Pondok Pesantren di wilayah Jember, Bondowoso, dan Lumajang pada koran Radar Jember Jawa Pos Group Edisi 2012[4]". Memberikan penegasan bahwa berita tentang pondok pesantren masih sangat minim dibandingkan dengan berita institusi lain. Padahal, jumlah pondok pesantren di wilayah Jember, Bondowoso, dan Lumajang masing-masing mencapai ratusan pondok pesantren. Disebutkan bahwa dari sekitar 362 edisi koran harian dibawah bendera Jawa Pos itu, pondok pesantren hanya termuat sebanyak 30 berita. Parahnya, dari 30 berita tersebut, sebagian besar bukan berita yang positif yang ditampilkan, tetapi lebih mengarah pada bad news (berita buruk), seputar perusakan pesantren dan kasus pemukulan di lingkungan pondok pesantren. Dengan demikian, berita yang muncul menunjukkan aspek negatifnya dibandingkan hal yang positif. Lebih lanjut tentang catatan riset ini diuraikan pada bab yang sama di sub. Catatan Riset Terdahulu.

Pesantren sebagai pusat penggemblengan ilmu-ilmu agama, tentunya pesantren selalu mengajarkan kebaikan sesuai dengan tuntunan agama. Tak terkecuali tentang sopan santun dan ajaran tentang larangan membicarakan aib orang lain. Karenanya, menulis pun sedikit banyak telah menjadi tradisi intelektual pesantren dalam pengembangan ilmu-ilmu agama. Menilik potensi ini, tentunya akan sangat mudah apabila jurnalisme pesantren bisa berkembang dan menjadi sebuah

---

[4] Kun Wazis, 2013, Laporan Penelitian, "Konstruksi Realitas Pesantren di Media Massa: *Analisis Framing Berita Pondok Pesantren di wilayah Jember, Bondowoso, dan Lumajang pada koran Radar Jember Jawa Pos Group Edisi 2012*, STAIN Jember

kecenderungan yang tak terelakkan dilingkungan pondok pesantren sehingga bisa menjadi pilihan alternatif.

C. Catatan Riset Terdahulu

Selain beberapa Riset tentang jurnalisme warga, tim penulis menjadikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh salah satu tim penulis sebelumnya sebagai focus catatan terdahulu yaitu Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kun Wazis pada tahun 2013 berjudul "Konstruksi Realitas Pesantren di Media Massa: Analisis Framing Berita Pondok Pesantren di wilayah Jember, Bondowoso, dan Lumajang pada koran Radar Jember Jawa Pos Group Edisi 2012[5]".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berita tentang pondok pesantren masih sangat minim dibandingkan dengan berita institusi lain. Padahal, jumlah pondok pesantren di wilayah Jember, Bondowoso, dan Lumajang masing-masing mencapai ratusan pondok pesantren.

Diketahui dalam penelitian ini bahwa dari sekitar 362 edisi koran harian dibawah bendera Jawa Pos itu, pondok pesantren hanya termuat sebanyak 30 berita. Parahnya, dari 30 berita tersebut, sebagian besar bukan berita yang positif yang ditampilkan, tetapi lebih mengarah pada bad news (berita buruk), seputar perusakan pesantren dan kasus pemukulan di lingkungan pondok pesantren. Dengan demikian, berita yang muncul menunjukkan aspek negatifnya dibandingkan hal yang positif.

---

[5] Kun Wazis, 2013, Laporan Penelitian, "Konstruksi Realitas Pesantren di Media Massa: *Analisis Framing Berita Pondok Pesantren di wilayah Jember, Bondowoso, dan Lumajang pada koran Radar Jember Jawa Pos Group Edisi 2012*, STAIN Jember

Marginalisasi berita pondok pesantren di media massa tersebut sebenarnya "tidak menguntungkan" bagi dunia pesantren. Sebab, kiprah pondok pesantren di kawasan Jember, Lumajang, dan Bondowoso yang berdiri bertahun-tahun dan melakukan kegiatan positif di masyarakat berupa perubahan sosial, ternyata terkontruksi negatif di media massa. Media massa dengan kekuatan pengaruhnya kepada khalayak akan mampu memberikan kesan apapun kepada publik sesuai dengan konstruksi berita yang ditampilkan, termasuk berita buruk yang menimpa dunia pesantren.

Ini jelas membahayakan jika tidak ada upaya untuk mengimbangi dari sisi opini melalui media alternatif lain. Untuk itu, diera globalisasi teknologi dan informasi, jurnalisme pesantren dapat menjadi ruang strategis dalam selain demi kepentingan dakwah Islam juga demi kepentingan fasilitasi ruang-ruang public bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Sebagaimana diketahui bahwa semenjak awal dikenal pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan juga berfungsi sebagai Secara mendasar peranan Pondok Pesantren yang lebih fungsional dan berpotensi antara lain selain sebagai Pusat kajian islam, sebagai Pusat pengenbangan dakwah, Pusat pelayanan beragama dan mora, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan solidaritas dan ukhuwah islamiayah.

Memperkuat penulisan konsep dalam buku ini, tim penulis juga menjadikan hasil penelitian yang telah ditulis oleh Dr. Eni Maryani, Dra., M.Si. yaitu tentang Media dan Perubahan Sosial (Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas). Hasil penelitian yang membuahkan konsep kajian tentang Media dan perubahan Sosial ini diakui oleh Prof.

Deddy Mulyana, M.A., Ph.D[6] sebagai hasil kajian yang cukup layak dan menarik untuk menjadi salah satu referensi dalam pengetahuan yang focus pada bidang ilmu komunikasi khususnya bidang media, riset ini secara cermat mengeksplorasi teori kritis dan signifikansi perspektif untuk menganalisis masalah penelitian, yakni bagaimana kesadaran dan resistensi warga di Timbulharjo, Bantul, Jogjakarta, terhadap budaya dan struktur kekuasaan yang ada, menurutnya analisis mikro yang dilakukan diperkuat oleh analisis makronya yang menjelaskan bagaimana konteks ekonomi, politik, dan sosial budaya berhubungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Diakui juga oleh Prof. Sasa Djuarsa Senjaja, Ph.D[7]. bahwa Perkembangan media dan bagaimana media dioperasikan terkait dengan perubahan sosial di tempat media tersebut berada. Media penyiaran di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar sejak terjadinya reformasi. Keterlibatan para aktivis di bidang media penyiaran tidak saja mewarnai kebijakan di bidang media, tetapi juga melahirkan berbagai media komunitas atau media alternatif di masyarakat. Media komunitas menjadi alternatif bagi masyarakat yang merasa kepentingannya termarjinalkan. gambaran yang kritis tentang bagaimana perubahan sosial yang terjadi melahirkan media yang dimiliki masyarakat dan masalah yang dihadapi pengelola media komunitas dalam menjaga kelangsungan

---

[6] Adalah Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Eni Maryani, 2016, Media dan Perubahan Sosial (Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas), Rosda Karya, Bandung.

[7] Adalah Guru Besar llmu Komunikasi Universitas Indonesia Jakarta, Eni Maryani, 2016, Media dan Perubahan Sosial (Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas), Rosda Karya, Bandung.

nya—baik dari sisi idealisme maupun praktis—serta keberadaan dan manfaat Komisi Penyiaran Indonesia. Bisa tergambar dalam hasil riset yang telah dilakukan oleh Dr. Eni Maryani, Dra., M.Si. yaitu tentang Media dan Perubahan Sosial (Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas)

Karena itu sebagai simpulan dalam riset yang dilakukan oleh Eni Maryani ini adalah terdapat empat isu yang diidentifikasi sebagai masalah dan menjadi pertanyaan akademis masing masing adalah munculnya kesadaran komunitas, dalam hal ini eni mencatat bahwa munculnya kesadaran kritis komunitas di Timbulharjo secara historis tidak lepas dari situasi makro yang terjadi di Indonesia. Krisis multidimensional yang dialami negeri ini tampaknya meluas pada level yang terendah yaitu desa (di Jawa). Krisis ekonomi, kepemimpinan, dan budaya begitu terasa oleh masyarakat, sementara ide-ide demokratisasi melalui berbagai gerakan masyarakat sipil dan program-program pembangunan atas bantuan berbagai lembaga bilateral dan multilateral juga meluas sampai ke desa-desa. Ini menimbulkan kontradiksi-kontradiksi di masyarakat.

Lalu Angkringan sebagai media dan ruang publik, dalam catatan hasil riset yang telah dilakukan bahwa di Timbulharjo sebelum Angkringan muncul, sebagian besar komunitas terlanjur membisu menghadapi berbagai ketidakjelasan bahkan ketidakadilan yang dialami. Oleh karena itu mereka perlu didorong untuk dapat berbicara, mempertanyakan dan menuntut kejelasan atau keadilan

atas apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Hambatan budaya dalam hal menjaga hubungan baik memerlukan media unluk melakukan kritik sehingga tak ada konflik terbuka dalam

relasi personal yang terjadi. artinya, ketika kritik dilakukiin melalui media maka dapat dihindarkan seseorang terlibat dalam konflik teibiika dengan orang-orang yang dikenalnya atau ada dalam satu ikatan komunitas.

Pertanyaan akademis lainnya adalah kompetensi dalam melakukan resistensi, dalam hal ini Eni Maryani mencatat bahwa Resistensi yang dilakukan dalam komunitas Timbulharjo adalah perlawanan tanpa kekerasan, paling tidak secara fisik dan budaya. Walaupun ada konflik akan tetapi hal itu dikemas dalam arena komunikasi di sebuah media yang bernama Angkringan. Sedangkan pertanyaan akademis lainnya adalah keberlangsungan resistensi itu sendiri. Reni mencatat bahwa Terdapat beberapa bentuk resistensi di Timbulharjo tetapi dilakukan tanpa kekerasan. Resistensi seperti ini hanya dapat dilakukan melalui komunikasi yang bersifat dialog, terbuka dan bebas serta memungkinkan banyak pihak terlibat. Keterbukaan komunikasi berarti kemudahan akses untuk para partisipan. Untuk itulah Angkringan sebagai media komunitas dibangun, yaitu untuk merealisasikan keterbukaan akses komunikasi sehingga melahirkan kesadaran masyarakat akan dominasi yang merugikannya dan memungkinkan atau memperkuat perlawanan yang dilakukan komunitas.

Tim penulis melihat bahwa sedikitnya dua catatan riset ini bisa memperkuat akan dibutuhkannya penjelasan konsep yang lebih rijik tentang jurnalisme pesantren, tim penulis memahami riset yang dihasilkan oleh Kun Wazis mempertegas adanya fenomena di kabupaten jember, lumajang dan bondowo terkait posisi pondok pesantren yang terpinggirkan. Sementara riset yang menghasilkan kajian tentang Media dan Perubahan Sosial (Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas) sebagaimana

dilakukan oleh Dr. Eni Maryani, Dra., M.Si. memberi penegasan bahwa komunitas-komunitas yang terpinggirkan bisa melakukan perlawanan sebagai bentuk respon atas munculnya fenomena media yang belum sepenuhnya dinilai berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Karena itu, tim penulis menilai bahwa pondok pesantren yang nota benenya sebagai bagian dari instrument masyarakat dinilai mampu mengalirkan energi opini yang positif melalui partisipasi para santrinya dalam menyampaikan pesan Islam melalui jurnalisme pesantren. Diakui bahwa jurnalisme pesantren berangkat dari konsep jurnalisme warga atau sering disebut dengan citizen journalism, dibanyak literature mengakui bahwa jurnalisme ini sangat berpotensi dikembangkan di Indonesia seiring perkembangan teknologi komunikasi. Sebab jurnalisme ini merupakan perwujudan konsep public sphere yang diperkenalkan pertama kali oleh Habermas pada abad 18. Sebagaimana diketahui bahwa Public sphere atau ruang publik merupakan zona bebas tanpa intervensi dimana masyarakat sipil bisa mengemukakan opini tertentu tentang sesuatu hal.

Dalam konsep ruang publik, media menjadi wakil yang dipikirkan publik tentang isu kemasyarakatan. Menurut McQuail dalam bukunya *Teori Komunikasi Massa*, edisi 6, media harus memperluas ruang debat, mengedarkan informasi dan gagasan sebagai dasar untuk opini publik, menghubungkan warga dengan pemerintah, menyediakan informasi yang bergerak, menantang monopoli pemerintah dalam hal politik, serta memperluas kebebasan dan keragaman publikasi.

Sementara disisi yang lain, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang masih secara intens

melakukan pembelajaran keagamaan, bahkan keagamaan tidak sekedar di transformasikan dalam khazanah pengetahuan belaka, akan tetapi pembinaan mental akademis dan religious juga selalu ditanamkan. Melihat potensi pondok pesantren yang demikian dapat menjdikan sebagai salah satu pilihan yang cukup strategis apabila menjadi basis dalam kegiatan jurnalisme warga (Citizen Journalism). Tim penulis sengaja menyertakan rangkuman proses pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang penguatan dakwah melalui jurnalisme santri yang pernah dilaksanakan oleh tim penulis di PP Miftahul Ulum Jember. Harapannya rekaman proses pengabdian ini bisa menambah data konsep buku tentang jurnalisme pesantren.

D. Tentang Buku ini

Buku tentang Jurnalisme Pesantren ini adalah upaya untuk menjelaskan tentang fenomena media jurnalisme pesantren yang mulai tumbuh dibanyak pesantren, sehingga media ini bisa menjadi wujud bagian dari media-media alternative. Disisi yang lain buku ini mencoba menguraikan realitas media mainstream yang dinilai juga eksis ditengah-tengah masyarakat, namun demikian dalam buku ini, tim penulis berupaya untuk melihat realitas media mainstrin dalam ranah kajian yang lebih kritis. Beberapa teori hegemoni serta pendekatan ekonomi politik menjadi alat perspektif bagi tim penulis. Dengan kajian-kajian ini tim penulis mencoba untuk mengurai bentuk-bentuk resistensi pada media alternatif.

Enam bab buku ini disusun berdasarkan urutan yang tidak dimaksudkan untuk menunjukkan tingkatan pentingnya. Harapan kami agar pembaca bisa membaca bab demi bab baik

secara berurutan maupun langsung ke salah satu bab yang paling diminati. Dengan cara demikian, diharapkan buku ini bisa sampai ke tangan pembaca yang lebih luas, baik itu mahasiswa maupun pembaca umum yang sedang atau berminat dan focus melakukan kajian-kajian media dan komunikasi khususnya menyangkut kajian Jurnalisme pesantren. Bab-bab buku ini tidak hanya berbicara tentang industri komunikasi dan media mainstream, melainkan juga bagaimana kita selaku khalayak atau publik yang punya daya kritis sebaiknya menghadapi proses komunikasi yang sedang berlangsung dalam kehidupan kita sehari-hari.

Karena itu, bab-bab terakhir lebih menekankan pada bentuk alternatif sebagaimana praktik jurnalisme pesantren yang dilakukan oleh komunitas santri di pondok pesantren Miftahul Ulum Suren Ledok Ombo Jember, tim penulis menjadikan data pengabdian pada bab akhir dalam buku jurnaliesme pesantren ini sebagai pendukung kelengkapan data teoritis tentang bangunan konsep jurnalisme pesantren, tentunya media massa pesantren ini memiliki misi yang jelas dalam manajemen media massanya, yakni mengemban dakwah Islam yang ramah.

Tentu saja, dalam menjalankan tugasnya, media massa pesantren tidak bisa dilepaskan dengan fungsi-fungsi media massa sehingga dapat menjadi media massa alternatif yang memiliki kekuatan untuk membangun kekuatan pesantren. Fungsi utama media jurnalistik yang harus diperankan oleh media massa pondok pesantren adalah *pertama*, menyiarkan informasi. Ini merupakan fungsi utama media massa sebab masyarakat membeli media tersebut karena memerlukan informasi tentang berbagai hal yang terjadi di dunia ini. *Kedua*,

mendidik. Media massa menyajikan pesan-pesan atau tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga dapat dijadikan media pendidikan massa. *Ketiga*, menghibur. Media massa biasanya menyajikan rubrik-rubrik atau program-program yang bersifat hiburan. Hal ini dihidangkan memang sengaja untuk menghibur atau yang lebih penting lagi untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel-artikel yang dapat menguras perhatian dan pikiran pembaca. *Keempat*, memengaruhi. Melalui fungsinya yang keempat ini pers memegang peranan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat

Dengan semangat pendekatan kajian yang lebih kritis terhadap berbagai proses dan praktik komunikasi yang berlangsung melalui media mainstream, buku ini diharapkan bisa menjadi pengantar awal yang mungkin bisa memberikan sumbangan dalam memahami dan menjelaskan pertumbuhan industri media dan jurnalisme pesantren dan implikasinya bagi isi media, khalayak, dan pekerja industri media serta rembesannya dalam hal-hal cukup mendasar seperti dalam menentukan keberpihakan. Dengan demikian, diharapkan buku ini bisa membuka dialog dan menumbuhkan sikap kritis dalam memandang bahwa setiap praktik komunikasi yang kita jumpai sehari-hari mungkin tak selalu berhasil lepas sepenuhnya dari hegemoni. Karena itulah, sikap kritis dan pemahaman atas kajian kritis dalam bidang media dan komunikasi menjadi modal penting dalam era komunikasi yang semakin terprivatisasi. []

Bab II
Ideologi, Politik Media, Dan Jurnalisme Pesantren: Catatan Kritis

A. Media massa dan Hegemoni

Dalam pandangan mazhab kritis, terutama dalam studi-studi yang dikembangkan oleh *Centre for Contemporary Cultural studies, Birmingham University*, media massa selalu dirasakan sebagai alat yang "*powerfull*" dan ada ideologi dominan di dalamnya. Hal ini yang disebut oleh para penggiat *Cultural studies* sebagai hegemoni media. Teori

hegemoni ini dicetuskan oleh Gramsci[8] yang merujuk pada kekuasaan dan praktis. Hegemoni merujuk pada upaya pelanggengan kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok yang berkuasa. Di sini, institusi media memberikan sebuah fungsi hegemoni yang secara terus menerus memproduksi sebuah ideologi yang kohesif (ideologi yang meresap), satu perangkat nilai-nilai *common-sense* dan norma norma yang memproduksi dan mengesahkan dominasi struktur sosial tertentu, yang mana kelas-kelas subordinasi berpartisipasi di dalam dominasi mereka itu[9].

Melalui media massa juga menyediakan *frame work* bagi berkembangnya budaya massa. Melalui media massa pula kelompok dominan terus-menerus menggerogoti, melemah-kan dan meniadakan potensi tanding dari pihak-pihak yang dikuasainya. Sedangkan menurut Mc. Luhan, seorang peng-kritik media, mengatakan bahwa media massa bukan hanya sebagai media pengirim pesan tapi juga mempengaruhi nilai-nilai budaya dan membuat stereotip mengenai gender, ras dan etnik, memiliki kontribusi terhadap pengalaman komunikasi dan bisa saja memonopoli dunia pemikiran seseorang.

[8] Merupakan tokoh yang pemikirannya banyak dipengaruhi marx.tradisi Marxist tertarik untuk melihat hegemoni moral, cultural, intelektual dan kepemimpinan politik. Dalam bukunya Nina Widyawati, *Etnisitas dan Agama sebagai Isu Politik,* 2014, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor. Hal. 60-61

[9] Bahkan lebih lanjut, Gitlin mendefenisikan hegemoni sebagai "rekayasa sistematik" kepatuhan massa untuk memapankan kekuasaan kelompok yang berkuasa. Stuart Hall berpendapat Media massa cenderung mengukuhkan ideologi dominan untuk menancapkan kuku kekuasaannya melalui hegemoni.

Maka dari itu selama media masih dikuasai oleh ideologi dominan, maka mereka akan menggambarkan kelompok oposisi sebagai kaum marginal. bagi Hall dan koleganya, interpretasi teks media selalu muncul di dalam suatu pertarungan dari kontrol ideologis. Ronald Lembo dan Kenneth Tucker menggambarkan proses tersebut sebagai "arena kompetisi di mana individu atau kelompok mengekspresikan kepentingan yang berlawanan". Apalagi jika hal tersebut sudah menyangkut bisnis, bahwa saat ini urgensi penciptaan standar kode etik bisnis media semakin besar, ketika kecenderungan konglomerasi media di tanah air semakin besar pula.

Seorang teoritis Antonio Gramsci[10] membangun suatu teori yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi terhadap kehadiran kelompok dominan berlangsung dalam suatu proses yang damai, tanpa tindakan kekerasan. Media dapat menjadi sarana di mana satu kelompok mengukuhkan posisinya dan merendahkan kelompok lain. Proses bagaimana wacana mengenai gambaran masyarakat bawah bisa buruk di media berlangsung dalam suatu proses yang kompleks. Proses marjinalisasi wacana itu berlangsung secara wajar, apa adanya, dan dikhayati bersama. Khalayak tidak merasa dibodohi atau dimanipulasi oleh media. Konsep hegemoni menolong kita menjelaskan bagaimana proses ini berlangsung.

Hegemoni menekankan pada bentuk ekspresi, cara penerapan, mekanisme yang dijalankan untuk mem-

---

[10] bersumber dari buku *Selection from Prison Notebooks.* Buku ini adalah catatan Gramsci selama dipenjara antara tahun 1929-1935

pertahankan dan mengembangkan diri melalui para korbannya, sehingga upaya itu berhasil dan mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. Melalui hegemoni, ideology kelompok dominan dapat disebarkan, nilai dan kepercayaan dapat dipertukarkan. Akan tetapi, berbeda dengan manipulasi atau indoktrinasi, hegemoni justru terlihat wajar, orang menerima sebagai kewajaran dan sukarela.

Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana ia menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah. Media di sini dianggap secara tidak sengaja dapat menjadi alat bagaimana nilai-nilai atau wacana yang dipandang dominan itu disebarkan dan meresap dalam benak khalayak sehingga menjadi konsesus bersama. Sementara nilai atau wacana lain dipandang sebagai menyimpang. Misalnya, pemberitaan mengenai demonstrasi buruh, wacana yang dikembangkan seringkali perlunya pihak buruh musyawarah dan kerja sama dengan pihak perusahaan. Dominasi wacana semacam ini menyebabkan kalau buruh melakukan demonstrasi selalu dipandang tidak benar[11].

Teori hegemoni Gramsci menekankan bahwa dalam lapangan sosial ada pertarungan untuk memperebutkan

[11] Di sini menggambarkan bagaimana proses hegemoni bekerja. Ia berjalan melalui suatu proses atau cara kerja yang tampak wajar. Dalam produksi berita, proses situ terjadi melalui cara yang halus, sehingga apa yang terjadi dan diberitakan oleh media tampak sebagai suatu kebenaran, memang begitulah adanya, logis dan bernalar (common sense) dan semua orang menganggap itu sebagai suatu yang tidak perlu dipertanyakan.

penerimaan publik. Karena pengalaman sosial kelompok subordinat (apakah oleh kelas, gender, ras, umur, dan sebagainya) berbeda dengan ideologi kelompok dominan untuk menyebarkan ideologi dan kebenarannya tersebut agar diterima, tanpa perlawanan. Salah satu kunci strategi kunci dalam hegemoni adalah nalar awam.[12]

Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni, bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan dua cara, yaitu kekerasan dan persuasi[13]. Cara kekerasan (represif/ dominasi) yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasinya dilaksanakan dengan cara-cara halus, dengan maksud untuk menguasai guna melanggengkan dominasi. Perantara tindak dominasi ini dilakukan oleh para aparatur negara seperti polisi, tentara, dan hakim.

Menurut Gramsci, faktor terpenting sebagai pendorong terjadinya hegemoni adalah faktor ideologi dan politik yang diciptakan penguasa dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan membentuk pola pikir masyarakat. Faktor lainnya adalah pertama paksaan yang dialami masyarakat, sanksi yang diterapkan penguasa, hukuman yang menakutkan, kedua kebiasaan masyarakat dalam mengikuti suatu hal

---

[12] Simon, Roger, *Gramcsi's Political Thought*, alih bahasa oleh Kamdani dan Baehaqi, Imam, 1999.

[13] Simon, Roger. 2004. Gagasan-Gagasan Politik Gramsci. Yogyakarta: INSIST. hal: 09

yang baru dan ketiga kesadaran dan persetujuan dengan unsur-unsur dalam masyarakat[14].

Hegemoni dipergunakan untuk menunjukkan adanya kelas dominan yang mengarahkan "tidak hanya mengatur" masyarakat melalui pemaksaan kepemim-pinan moral dan intelektual[15]. Hegemoni di atur oleh mereka yang oleh Gramsci disebut "intelektual organic". Mereka adalah tokoh moral dan intelektual yang secara dominan menentukan arah konflik, politik, dan wacana yang berkembang di masya-rakat. Mereka bekerja untuk melanggengkan kekuasaan atas kelompok yang lemah. Dominasi "intelektual organic" diwujudkan melalui rekayasa bahasa sebagai sebuah kekuasaan. Melalui berbagai media bahasa ditunjukkan hadirnya kekuasaan dan pengaturan hegemoni tersebut. Berbagai kebijakan negara, misalnya, disampaikan dalam bahasa "untuk kepentingan bangsa di masa mendatang" atau "demi kemandirian bangsa" telah menghegemoni masyarakat untuk senantiasa menerima berbagai keputusan negara, yang merugikan sekalipun. Misalnya, hegemoni bahasa politik digunakan oleh para politisi untuk membantu bagaimana bahasa digunakan dalam persoalan-persoalan (1) siapa yang ingin berkuasa, (2) siapa yang ingin menjalankan kekuasaan, dan (3) siapa yang ingin memelihara kekuasaan.[16] Meskipun Lain halnya

[14] Stillo, Monica, *Antonio Gramsci*, www.theory. org.uk/ ctr-gram. htm, 1998-1999.

[15] http://rohmadwidy.wordpress.com/2012/03/29/hegemoni-dalam-laskar-pelangi

[16] Eriyanto. 2011. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKiS Group

dengan Habermas yang menyebut-kan bahwa paling tidak ada dua wilayah yang menjadi korban hegemoni atas ruang public. Yaitu *Pertama,* pada wilayah sosial, dimana media massa tidak lagi menjadi fasilitas diskursus rasional, tetapi menjalankan konstruksi, seleksi dan formasi diskursus itu menjadi komoditas hiburan yang dapat dikonsumsi secara pasif. Dan *Kedua,* Pada wilayah politis, dalam hal ini banyak kasus berubah menjadi komoditas politik semata[17].

Selain itu, hegemoni juga berfungsi untuk menciptakan cara berpikir yang berasal dari wacana dominan, juga media yang berperan dalam penyebaran wacana dominan itu. Hegemoni dipergunakan untuk menunjukkan adanya kelas dominan yang mengarahkan tidak hanya mengatur masyarakat melalui pemaksaan kepemimpinan moral dan intelektual[18].

Media memiliki kekuasaan untuk memengaruhi khalayak. Media massa membentuk khalayak yang patuh dan bisa dimanipulasi. Akibatnya, ada kesamaan efek. Demikian dipertegas oleh Todd Gitlin dalam tulisannya yang berjudul *Media Sociology: the Dominant Paradigm*, pandangan ini menjadikan Pandangan alternative.[19] Tentang

---

[17] Dalam buku perkembangan masyarakat informasi dan teori sosial kontemporer. Karya Rahma sugiharti, 2014, Jakarta, Kencana, Prenada Media Group. Hal.47

[18] http://vitaandfamily.blogspot.com/hegemoni.html

[19] Sebelumnya Todd Gitlin dalam tulisannya yang berjudul *Media Sociology: the Dominant Paradigm* menunjukkan bagaimana paradigma efek media ini didasarkan pada asumsi yang salah. Paradigma dominan yang muncul pada era Perang Dunia II terkait dengan teori Elihu Katz dan Paul F Lazarsfeld, *two-step flow of communication*. Gitlin menyatakan bahwa paradigm efek media ini bermasalah karena mengaburkan isu penting terutama

Dominasi Media Massa. Pandangan ini mematahkan pandangan tentang dominasi media sebelumnya yang menunjukkan bahwa paradigma dominan media massa yang patut menjadi fokus perhatian adalah efek media massa.

Dipertegas bahwa hal yang paling penting dalam pengujian efek media massa adalah membongkar siapa yang memengaruhi produksi media massa. Gitlin menyebutkan, media massa dikendalikan perusahaan dan peraturan negara. Paradigma alternatif ini bisa menunjukkan dampak kuat media massa pada pembentukan sosial dengan pertanyaan sistem yang ada kepemilikan, kontrol dan tujuan.

Didasarkan pada pemirkiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa masyarakat digerakkan oleh kekuatan ekonomi. Bahkan, ekonomi melahirkan kesadaran palsu "Kesadaran adalah awal dari produk sosial," Kesadaran palsu yang ciptakan komunikasi massa, yaitu media massa memberikan dampak pada khalayak, sehingga tercipta

---

pada tingkat struktural dan institusional analisis. Dia menegaskan bahwa pandangan behavioris, ditambah keterbatasan metodologis, menyebabkan temuan efek media sangat terbatas dan kekuatan individu berlebihan. Menurut Gitlin, efek media bukanlah sesuatu yang sempit dan bisa diukur. Gitlin menunjukkan bahwa paradigma dominan yang ditunjukkan melalui penelitian dan survei bahwa penonton mempertahankan kekuasaan dan kontrol apa pesan yang dikirim kepada mereka melalui perangkat komunikasi massa seperti televisi, radio dan media cetak. Gitlin menyimpulkan dari temuannya, Paul F. Lazarsfeld dan rekan-rekannya ingin menunjukkan "media tidak sangat penting dalam pembentukan opini publik". Kegagalan dari teori itu yang paling mendasar adalah pengabaian terhadap kekuatan media. Media juga dipengaruhi oleh kekuasaan politik dan ekonomi.

penonton yang patuh. Khalayak menerima segala sesuatu yang disajikan media tanpa adanya perlawanan.[20]

Theodor Adorno menyatakan, media massa memiliki kemampuan untuk mengonstruksi realitas. Elit, atau yang disebut Marx sebagai borjuis, menggunakan media massa untuk mengendalikan kesadaran khalayak. Disisi yang lain padahal, Everett M. Rogers dalam bukunya Communication Technology; The New Media in Society[21], mengatakan bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal empat era komunikasi yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi dan era media komunikasi interaktif. Dalam era terakhir dikenal media komputer, videotext dan teletext, teleconferencing, TV kabel, dan sebagainya.[22] Sedangkan Marshall McLuhan dalam bukunya Understanding Media B The Extensions of Man[23], mengemukakan ide bahwa A medium is message. McLuhan menganggap media sebagai perluasan manusia dan bahwa media yang berbeda-beda mewakili pesan yang berbeda-beda. Media juga menciptakan dan mempengaruhi cakupan serta bentuk hubungan-hubungan dan kegiatan-kegiatan manusia. Pengaruh media telah berkembang dari individu kepada masyarakat. Dengan media, setiap bagian dunia dapat dihubungkan menjadi desa global, Hegemoni, menurut pandangan Gramsci, tidak hanya menunjukkan dominasi

---

[20] Nina Widyawati, *Etnisitas dan Agama sebagai Isu Politik,* 2014, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor

[21] dalam Deddy Mulyana, 1999

[22]http://www.sofyanamarta.com/2015/11/komunikasi-media-massa-menurut-sofyan.html

[23] Ibid. 1999

dalam kontrol ekonomi dan politik saja, namun juga menunjukkan kemampuan dari suatu kelas sosial yang dominan untuk memproyeksikan cara mereka dalam memandang dunia. Jadi, mereka yang mempunyai posisi di bawahnya menerima hal tersebut sebagai anggapan umum yang sifatnya alamiah.

Budaya yang tersebar merata di dalam masyarakat pada waktu tertentu dapat diinterpretasikan sebagai hasil atau perwujudan hegemoni, perwujudan dari penerimaan Akonsesual oleh kelompok-kelompok gagasan subordinat, nilai-nilai, dan kepemimpinan kelompok dominan tersebut. Menurut Gramsci, kelompok dominan tampaknya bukan semata-mata bisa mempertahankan dominasi karena kekuasaan, bisa jadi karena masyarakat sendiri yang mengizinkan. Keberadaan media dimana-mana dan juga periklanan telah mengubah pengalaman sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Media merupakan unsur penting dalam pergaulan sosial masa kini. Kebudayaan masyarakat tidak terlepas dari media, dan budaya itu sendiri direpresentasikan dalam media. Karenanya, posisi media alternative sesungguhnya menjadi strategis dalam perimbangan informasi ditengah-tengah masyarakat.

B. Realitas media di Indonesia

Perkembangan media di Indonesia saat ini sudah semakin maju. Bahkan dunia cetak perlahan-lahan mulai beralih ke dunia digital dan elektronik. Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan media memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat di dunia media massa. Tidak heran jika

perkembangan media saat ini (khususnya di Indonesia) juga dijejali dengan pesatnya perkembangan dunia infotaiment di sejumlah media bahkan berita-berita seputar gosip di media massa dinilai lebih laku bila dibandingkan dengan pemberitaan yang memiliki nilai edukasi.

Kepala Republika Online, M Irwan Ariefyanto24, mempertegas hingga saat ini, media massa banyak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tak hanya itu, konsep *bad news is a good news* seolah menjadi paradigma baru di kalangan media massa di Indonesia. Ruang lingkup yang begitu sempit sampai masalah privasi dipublikasikan, sedangkan berita tentang masyarakat kita tidak diperdulikan, Keadaan ini berakibat akibat pada hasil kerja jurnalis yang belum banyak berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bahkan hasil kerja jurnalistik masih banyak menghasilkan produk jurnalistik di sejumlah media yang (dinilai) mengabaikan kode etik dan lebih banyak mengedepankan sensasi.

Realitas arus informasi yang timpang Penguasaan media yang sangat kuat di tangan segelintir orang akan menciptakan situasi arus informasi yang tidak seimbang, yang lebih jauh akan mengancam demokrasi di negara yang bersangkutan. Mario Antonius Birowo[25] dalam kolom tulisannya tentang Melawan Hegemoni Media dengan

---

[24] http://www.republika.co.id/berita/rol-to-school/tim-jurnalistik-sma-se-jakarta-timur/12/05/23/m4gq6k-perkembangan-media-massa-di-indonesia

[25] http://antonbirowo.blogspot.co.id/2008/11/melawan-hegemoni-media.html, diakses, 29/09/16

Strategi Komunikasi Berpusat pada Masyarakat menyebutkan bahwa Pada negara berkembang seperti Indonesia, betapa ketimpangan arus informasi berkaitan dengan persoalan demokrasi, terutama soal kontrol terhadap jalannya kekuasaan serta partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Kasus di Indonesia, Mario menyebutkan bahwa realitas hegemoni media tidak terlepas dari dua aspek, yaitu ekonomi dan politik. Aspek ekonomi terkait dengan pengaruh ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap negara-negara Barat penguasa ekonomi dan politik dunia. Negara-negara tersebut merupakan pengusung dari ideologi pasar bebas yang berkeinginan untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan bagi pelaku usaha untuk menciptakan kompetisi terbuka di antara mereka. Sebagai salah satu klien, Indonesia mau tidak mau mengikuti apa yang telah menjadi garis kebijakan ekonomi mereka. Ideologi pasar ini merasuk pula ke bidang media dimana media massa telah berfungsi sebagai sebuah industri, melalui produksi pesan yang dipasarkan secara komersial. Kondisi demikian mau tidak mau menggiring bidang media massa untuk berorientasi memperoleh keuntungan dagang. Orientasi pada keuntungan semacam ini merupakan gambaran dari model kapitalis pasar.

Aspek kedua hegemoni media ini menyangkut soal politik, yang sekaligus bertautan dengan soal penguasaan sumber daya (ekonomi). Kebijakan para pemimpin negara berkembang untuk mengekor pembangunan negara-negara Barat telah banyak dikritik. Model Barat dengan kapitalis

pasarnya oleh Kaufman[26] dinyatakan sudah gagal mendorong kemakmuran di negara-negara sedang berkembang. Sebenarnya untuk kasus Indonesia, jika dirunut ke belakang, akar realitas media dewasa ini merupakan konsekuensi dari kebijakan pembangunan dan sistem politik terpusat yang dimulai pemerintah Orde Baru. Dengan menggunakan Barat sebagai model, pemerintah Orde Baru membuat cetak biru pembangunan yang dimaksudkan untuk mengatasi (bukan mengejar) ketertinggalan Indonesia dibanding negara-negara Barat[27].

Kecenderungan semacam itu terjadi pula pada bidang komunikasi. Angka pertumbuhan yang bersifat kuantitatif menjadi ukuran keberhasilan suatu program, sehingga tidak mengherankan jika dengan paradigma ini pemerintah menekankan pada besaran angka, misalnya berapa luas wilayah yang bisa dijangkau oleh media massa, berapa rasio penduduk dengan ketersediaan media massa, dan sebagainya. Pemerintah Orde Baru sejak awal menerapkan

---

[26] Kaufman, M 1997. "Community Power, Grassroots Democracy, and the Transformation of Social Life," in M Kaufman & H D Alfonso (eds.),

[27] Para perancang pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada tahun 1960-an memandang bahwa ketertinggalan mereka dapat diatasi melalui penggunaan teknologi modern yang diharapkan dapat mendorong gerak pembangunan. Angka pertumbuhan menjadi patokan dalam penilaian keberhasilan pembangunan. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah pembenaran pada aspek kuantitatif pembangunan nasional. Tidak mengherankan jika kemudian angka pertumbuhan menjadi litani karena sering muncul dalam retorika para pejabat untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah (http://antonbirowo.blogspot.co.id/2008/11/melawan-hegemoni-media.html)

kebijakan yang menguntungkan bagi kehadiran big media, media dalam skala besar, baik dari jumlah modal yang ditanamkan, wilayah cakupan, serta sumber daya manusianya. Prinsip arus pesan bertumpu pada satu untuk semua sehingga bisa dikatakan pemerintah yang menerapkan prinsip sentralistik semacam ini akan menggunakan media sebagai alat propaganda supaya status quo atau kekuasaan pemerintah terjaga. Sebagai konsekuensinya, selama pemerintah menjalankan kebijakan pengembangan media yang bertumpu pada big media maka pola arus informasi yang berjalan secara otomatis bersifat linear dan vertikal.

Paradigma di balik arus informasi ini pada akhirnya memberi penekanan lebih banyak pada hal-hal yang bersifat superficial atau hanya permukaan. Sedangkan capaian yang bersifat mendasar, seperti bagaimana partisipasi masyarakat dalam produksi dan penerimaan pesan, kurang mendapat prioritas. Dalam kondisi demikian masyarakat lebih diarahkan sebagai konsumen media yang lebih dipandang sebagai pasar atau obyek dari proses produksi pesan (komersial).

Pilihan penggunaan media besar tidak terlepas dari strategi politik pemerintah yang menerapkan sentralisasi kekuasaan[28]. Walau begitu pemerintah memegang kendali

---

[28] Tujuan penyelenggaraan media massa seperti TVRI adalah untuk pembangunan karakter nasional sehingga wilayah cakupan siarannya sangat luas. Untuk menunjang siaran nasional TVRI, pemerintah kemudian mengoperasikan Satelit Palapa pada tahun 1976. Pihak swasta semula hanya diijinkan untuk mengelola media

atas penggunaan frekuensi dengan alasan frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas. Pertanyaannya apakah penggunaan frekuensi telah mengarah sepenuhnya kepada kepentingan masyarakat? Bagaimana kontrol atas penggunaan frekuensi itu? Berbagai pertanyaan semacam ini akan mengemuka ketika kita berhadapan dengan persoalan demokrasi komunikasi, dimana proses pengambilan keputusan untuk kepentingan publik ditentukan oleh publik itu sendiri.

C. Politik Ekonomi dan Media Massa Modern

Ekonomi dipahami sebagai salah satu pertimbangan kajian yang menelaah kekuatan atau kemampuan yang melokasikan sumber untuk memenuhi kebutuhan yang diperaingkan. Dalam perkembangan media massa, yang turut juga dipengaruhi oleh masalah produksi dan distribusi massal. Ada beberapa tipe masyarakat ekonomi yang membentuk perkembangan media massa, yaitu: *Pertama,* Masyarakat pertanian di mana produksi dan distribusi ditandai dengan dinamika produksi dan distribusi yang bersifat lokal dan kedaerahan. *Kedua,* Masyarakat industri yang ditandai dengan standarisasi dan pengolahan produksi dan distribusi massal. Dan *Ketiga* Masyarakat informasi yang ditandai internasiona-lisasi dan komersialisasi informasi yang ada dalam masyarakat.

---

penyiaran radio[iii], namun di penghujung dekade 1980-an, pihak swasta diijinkan menyelenggarakan media penyiaran televisi. (http://antonbirowo. blogspot.co.id/2008/11/melawan-hegemoni-media.html)

Tentu saja, ruang lingkup dan ukuran pasar pun berkembang dari yang bersifat lokal kedaerahan, regionalisasi dan nasional sampai ke level internasional. Perkembangan media massa berkembang melalui pembangunan skala ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dari pasar yang lebih luas. Pada dasarnya media massa mengikuti model ekonomi industrial yang ditandai dengan akselerasi banyaknya media dan hasil-hasilnya untuk mendapatkan biaya yang murah untuk produksinya. Ketika produksi semakin besar diharapkan juga perkembangan pembeli dan cakupan daerah yang dapat membelinya. Dalam perkembangan selanjutnya, media massa juga tidak dapat dipisahkan dengan hukum persaingan karena industri media massa yang didirikan tidak lagi sebagai pemain tunggal. Persaingan tidak dilihat sebagai hal yang negatif tapi harus dipahami sebagai hal yang membangun baik dari segi produksi dan distribusi media massa itu sendiri. Dalam iklim ekonomi, tidak menutup kemungkinan terjadinya monopoli[29]. Atmosfer monopoli ini terjadi bisa terjadi karena sistem persaingan yang keras sehingga diperlukan pemain ekonomi yang kuat.

---

[29] Monopoli media bisa berbentuk dalam beberapa ragam: *Pertama,* Duopoli, sebuah sistem ekonomi yang juga bisa berlaku dalam media ketika hanya terdapat dua pemain utama yang menguasai dan mendominasi lima puluh persen pasar, *Kedua,* Oligopoli, sebuah sistem ekonomi yang juga bisa ber-laku dalam industri media ketika terdapat beberapa industri yang menguasai dan mendominasi tiga puluh persen pasar, dan *Ketiga,* Monopoli, sebuah sistem ekonomi yang memperlihat-kan satu pemain industri yang mendominasi dan menguasai hampir Sembilan puluh persen pasar

Hal ini bisa mengakibatkan sistem permainan ekonomi dalam media massa juga. Sistem kepemilikan merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan ekonomi media. Hanya memang ada masalah yang berkaitan dengan atmosfer ekonomi ini, yaitu masalah kepemilikan media massa yang justru melemahkan peran dan fungsi sosial media massa, dalam hal ini melemahkan proses diversitas informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Tapi yang jelas dari sekian motif ekonomi yang muncul, yang paling pokok adalah motif keuntungan. Faktor keuntungan adalah faktor yang mengoperasionalisasikan industri media sampai ke organisasi-organisasinya. Dalam sebuah industri, termasuk di dalamnya industri media massa, faktor keuntungan adalah faktor penting. Faktor keuntungan ini yang sering bertabrakan dengan masalah kepentingan publik yang juga diemban oleh media massa. Untuk "menggenjot" keuntungan ini, media massa mempunyai banyak strategi dari hanya pemotongan pegawai sampai pemanfaatan iklan secara besar-besaran pada setiap produk media massa yang dihasilkan. Tapi apakah semua media massa harus mencari keuntungan? Ternyata tidak semua, ada beberapa pelaku media (PBS, misalnya) yang tetap mengandalkan subsidi publik untuk kelangsungan hidupnya.

D. Kepentingan Modal atas Regulasi Media

Pada awal pembahasan revisi UU Penyiaran, fokus keberatan banyak pihak banyak tertuju pada soal peran dominan negara yang dikhawatirkan kembali lewat kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sejumlah

peran yang dibawakan oleh KPI, sebagaimana disusun dalam draft UU Penyiaran versi DPR, mendapat banyak kritik dari berbagai kelompok, misalnya soal pemberian ijin penyiaran, otoritas untuk mencabut ijin penyiaran, posisi sebagai pembina dan pengontrol isi siaran. Penolakan atas masalah kepemilikan silang baru mencuat ketika draft ini beredar di masyarakat dan segera saja berbagai kelompok ad hoc dibentuk dan merespon pembatasan yang direncanakan dalam UU yang akan datang tersebut. Sebagai reaksi, kemudian sejumlah kelompok industriawan penyiaran seperti ATVSI, dan Komteve menyiapkan draft RUU tandingan yang membela kepentingan televisi swasta.

Mereka menginginkan bahwa televisi swasta menjadi independen dan tidak lagi dicampuri oleh intervensi pemerintah. Kelompok-kelompok yang mengritik RUU Penyiaran versi DPR juga menggunakan argumentasi soal "kebebasan pers", "pengkhianatan terhadap reformasi", dan "sinergi dalam industri media" sebagai alasan mereka untuk menolak pelarangan kepemilikan silang dalam industri media. Sumber argumentasi tentang sinergi dalam industri media, rupanya berujung pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh *World Association of Newspaper* (WAN) meeting di Brazil tahun 2000. Namun tak banyak kelompok mencoba mengejar lebih jauh argumentasi tersebut. Implikasi RUU Penyiaran ini terhadap para pekerja industri media, belum banyak dikemukakan, yang lebih banyak muncul adalah argumentasi yang dikeluarkan oleh para pemilik media. Di sini menjadi penting untuk mengamati secara cermat, siapa bicara apa, karena bagaimanapun juga posisi struktural

(dalam hal kepemilikan modal; antara pemilik modal dan kelompok pekerja) membedakan kepentingan yang dibawakannya.

Dilema regulasi media di Indonesia terletak pada bentuk kasar yang dilakukan oleh Negara dalam mengontrol isi, kepemilikan dan mati hidupnya media, telah membuat banyak kalangan terlena dan trauma dengan besarnya kekuasaan negara, namun lupa bahwa kekuasaan modal memiliki kekuatan yang tak kalah dashyat, bahkan mungkin lebih dashyat daripada kekuasaan negara itu sendiri. Kekuasaan modal bisa berkolaborasi dengan jenis kekuasaan macam pun dan jenis kapitalis apapun. Menentang intervensi negara dalam industri media adalah salah satu hal, namun memberikan fungsi baru kepada negara (dalam hal menjadi *regulatory body*) adalah hal yang lain lagi. Dan pada titik inilah juga persoalannya luput dibahas dalam perdebatan RUU Penyiaran itu.

Ada tendensi yang sangat besar untuk se-ekstrim mungkin menentang fungsi apapun dari negara, bahkan jika mungkin direduksi ke titik nol sekalipun. Padahal masalahnya bukan cuma soal intervensi negara dalam industri media, tapi juga mentransformasi peran baru dari negara, dari yang pengatur segalanya, menjadi pengatur untuk kepentingan publik. Kira-kira semacam peran yang dilakukan di negeri-negeri yang menganut *system welfare state*. Dan yang patut dilihat secara cermat adalah kecerdikan kelompok pemodal untuk menutupi kepentingan ekspansi modal mereka dengan jargon-jargon yang seolah-olah membela kebebasan pers, membela akses masyarakat

terhadap informasi, hingga membela proses reformasi dan demokratisasi.

Di sinilah dilema terbesar yang akan dihadapi oleh negara-negara yang mengalami situasi transisional, dimana kekuatan negara mulai terpecah atau bahkan diganti secara keseluruhan, namun di sisi lain kekuatan modal lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, dan bahkan dengan sangat mudah beradaptasi dengan kekuasaan baru, dan praktis kekuatan modal tidak memiliki jaringan birokrasi yang seluas birokrasi negara, yang memudahkan kekuatan modal untuk mengontrolnya, apakah mereka akan bisa berjalan bersama dengan pemerintahan baru, ataukah mereka akan mencari tempat lain dimana kekuatan negara bisa bekerjasama dengannya. Dalam situasi globalisasi, hal ini menjadi sangat dimungkinkan, dimana pergerakan kapital menjadi sangat mudah dan khusus dalam situasi seperti di Indonesia, ada kelompok pengusaha yang diuntungkan dengan situasi yang berubah dan ada pula pengusaha yang tidak diuntungkan. Industri media termasuk salah satu yang mengalami keberuntungan dengan perubahan situasi ini karena dengan deregulasi dan liberalisasi yang terjadi dalam sector media, maka mereka segera menjadi kapitalis-kapitalis baru atau semakin memperkuat posisi mereka untuk tumbuh di Indonesia.

Di satu sisi memang, masalah monopoli informasi adalah hal yang masih banyak diperdebatkan, namun memiliki 100 buah penerbitan di 30 buah propinsi di Indonesia, bukanlah pertanda yang sehat untuk perkembangan

industri media yang lebih beragam dan membuka pilihan yang lebih baca kepada konsumen. Kelompok media besar pun cenderung bungkam atas isu ini, dan perdebatan soal kepemilikan silang ini nyaris luput dari perhatian, dan energi banyak dihabiskan untuk membahas situasi dilematis dari KPI. Persoalan modal memang merupakan persoalan yang cukup pelik, karena hal ini cenderung diabaikan dalam berbagai literatur soal demokrasi. Problem demokrasi lebih banyak berurusan dengan kondisi represif negara terhadap warganya dan berbagai usaha untuk mendobrak dominasi tersebut.

Namun apa yang terjadi dengan perkembangan modal dan bagaimana ia pun menelikung berbagai problem lain, jarang diberikan perhatian secara proporsional. Kasus yang ditunjukkan di atas barulah bicara dalam tataran kepentingan modal 'lokal' dan belum lagi bicara dalam konteks modal 'global' yang masuk dalam industri media di Indonesia, dengan segala sifatnya yang tidak mengenal batas wilayah, capital yang sangat mobile, dan juga capital yang bisa mempengaruhi factor-faktor kehidupan dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Masih banyak hal yang perlu dipelajari untuk mengenal karakter modal dan bagaimana dilematisnya posisi soal modal dalam industri media ini, terutama dalam situasi masyarakat post-authoritarian (atau kondisi yang akan kembali menjadi *authoritarian*?).

Setidaknya kasus ini hendak memberikan suatu ilustrasi bahwa problem kebebasan pers, bukan semata-mata bagaimana ia bisa bernegosiasi dengan kekuasaan negara yang

represif, tapi juga ia harus berhadapan dengan kepentingan pemilik modal, karena bagaimana pun juga industri media lain dengan industri-industri lainnya, berurusan dengan soal pembentukan citra yang dimediasi lewat media-media yang ada. Lalu implikasinya kepada para pekerja media, pada kehidupan masyarakat luas dan lain-lain, masih harus diselidiki lebih jauh. Sejak ekonomi informasi berkembang pada era 1960-an ditandai dengan ledakan informasi yang kemudian menumbuhsuburkan bisnis media, tak dapat dipungkiri, bahwa kuku kapitalisme pun telah menancap di dunia permediaan. Media tidak lagi hanya menjadi mesin ideologi informasi yang memiliki spektrum tanggung jawab sosial dan partisipasi politis dalam mengritisi kebijakan-kebijakan penguasa, tetapi media pun telah menjadi mesin pencetak uang dan modal, tak ubahnya seperti lembaga-lembaga bisnis yang lain. Ideologi bisnis bergerak koheren dengan ideologi politik, sosial-budaya, agama dan ideologi kepentingan lainnya.

Bahkan, dalam tidak sedikit kasus, kepentingan bisnis menjadi yang terdepan. Terlebih dengan makin ketatnya persaingan bisnis antarmedia. Persaingan ini pula yang menjadikan kepemilikan media tidak lagi dalam satu warna, sehingga menarik untuk ditelaah. Yang awalnya pesaing, dengan logika bisnis dapat berubah seketika menjadi mitra bahkan saudara seatap. Demikian pula sebaliknya, yang tadinya saudara atau mitra strategis, dapat serta-merta berubah menjadi pesaing utama. Sukses-gagal, mati-tumbuh ataupun sakit-segar menjadi dinamika tersendiri dalam fenomena perkembangan bisnis dan kepemilikan media.

Dan yang menarik, konglomerasi kepemilikan media di Indonesia lebih didorong oleh persaingan dalam perebutan iklan serta efisiensi produksi, dan terakhir sekarang adalah kepentingan pemiliknya dalam kontestasi politik (ini yang berbahaya). Sedangkan konglomerasi global lebih bermotifkan kapitalisasi informasi, sehingga penekanan pada "bisnis informasi" menjadi sangat dominan. Media tidak hanya sebagai penayang, tetapi juga pemasok informasi atau isi tayangan ke media-media lain. Dengan demikian, iklan tidak menjadi "panglima" bisnis, tetapi informasilah yang menjadi panglimanya. Mereka menjual hak siar di mana-mana dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Iklan menyusul.

Bisnis media di Indonesia belum mencapai taraf menjadikan informasi sebagai *core business*. Indonesia masih lebih banyak mengandalkan "kue" iklan yang pada tahun 2008 diprediksi Rp 60 triliun (14). Uniknya, meskipun salah satu alasan konglomerasi media yang ditandai dengan aksi akuisisi dan merger—adalah perebutan iklan, namun pengiklan tidak serta-merta menjadikan kepemilikan tersebut sebagai dasar dalam penentuan strategi pemasangan iklan. Faktor *rating* acara masih tetap menjadi pertimbangan utama. Sehingga, kepemilikan media yang didasarkan atas perebutan iklan patut dipertanyakan. Teknologi komunikasi mungkin menjadi hal yang sangat menarik bagi para pengusaha untuk berinvestasi. Buktinya, banyak sekali terjadi konglomerasi atas media. Konglomerasi – satu perusahaan besar menaungi beberapa media sekaligus.

Dengan penyamaan atas isi media ini, orang-orang tidak akan memiliki kebebasan untuk memilih content media yang mereka inginkan. Hal ini juga akan sangat berkaitan erat dengan tumbuhnya semangat kapitalisme dalam industri media. Industri media yang dibangun dengan semangat kapitalisme tentu akan menghasilkan pesan atau produk media yang berorientasi pada bertambahnya modal. Bukti untuk produk media berorientasi modal adalah banyaknya iklan komersial dan besarnya pengaruh iklan dalam penentuan suatu program. Selain itu isi media sekarangpun menjadi kurang berkualitas dan hanya mementingkan keuntungan. Industri media sangat erat kaitannya dengan tumbuhnya semangat kapitalisme.

Munculnya konglomerasi media, dianggap sebagai aktivitas pemusatan modal dalam industri media. Pertanyaan yang seringkali diajukan adalah apakah industri media memberi andil besar menyebarkan virus kapitalisme dalam urat kehidupan masyarakat. Atau justru semangat kapitalisme yang mengawali tumbuh suburnya industri media raksasa, di samping faktor regulasi. Tidak mudah menjawab pertanyaan tersebut, karena fenomena tersebut terjadi bukan di ruang hampa, bukan hanya permasalahan antara media dan kapitalisme saja. Tetapi juga melibatkan komponen lain dalam kehidupan sosial. Sehingga yang terjadi bukanlah sebuah proses linear melainkan kesalingterkaitan antar komponen dalam sistem sosial yang jika divisualisasikan mungkin akan menjadi bentuk coretan semrawut. Industri media yang dibangun dengan semangat kapitalisme tentu akan menghasilkan pesan atau produk media yang ber-

orientasi pada bertambahnya modal. Bukti untuk produk media berorientasi modal adalah banyaknya iklan komersial dan besarnya pengaruh iklan dalam penentuan suatu program. Mungkin sebagian besar isi media tidak secara eksplisit menunjukkan keberpihakannya. Tetapi secara halus pesan-pesan kapitalisme yang menuntun pada perilaku konsumtif masyarakat disisipkan melalui tayangan sinetron, acara gosip, kuis berhadiah, polling sms dan lain sebagainya. Selain pesan/produk media yang pro-kapitalisme, sebaliknya ada juga pesan media anti-kapitalisme yang nantinya akan diresepsi oleh audiens.

Pesan anti-kapitalisme bisa berbentuk kritik atas pesan/produk media kapitalisme atau praktek kapitalisme oleh media. Dalam kaitannya dengan hubungan dalam institusi media, konglomerasi media sedikit banyak mempengaruhi kondisi, cara dan hasil kerja para pekerja media. Misalnya saja, satu pesan/produk media, yang seharusnya untuk ditayangkan oleh satu stasiun TV saja, bisa ditayangkan juga di stasiun TV lain yang masih dalam satu korporasi. Ibaratnya seorang pekerja bekerja untuk dua atau lebih perusahaan dengan standar gaji satu perusahaan. Kondisi ini jelas mempengaruhi cara kerja pekerja media yaitu keseragaman pesan, timbulnya persaingan tidak sehat antarpekerja bahkan berpotensi menjadi perbudakan pegawai media.

Pesan-pesan media tersebut, baik pro maupun anti-kapitalisme, pasti membawa dampak pada audiens meski dengan tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang sebatas pada pengetahuan tentang pengertian dan praktek kapitalisme, ada yang sudah mengambil sikap terhadap kapitalisme

dengan mendukung atau menolak, ada pula yang menjadi pelaku dalam bisnis kapitalisme, bahkan ada yang sudah terjerat masuk dalam lingkaran kapitalisme tapi tidak menyadarinya. Golongan yang terakhir adalah pihak yang sering kita sebut sebagai korban kapitalisme. Biasanya berasal dari golongan menengah ke bawah dengan ciri pola konsumsi tinggi. Perbedaan pengaruh tersebut wajar terjadi karena tiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami dan mengkonstruksi pesan. Mungkin saja untuk audiens mendapatkan informasi yang berlainan dengan pesan kapitalisme misalnya norma agama, sosial, adat budaya yang mengajarkan tentang hidup sederhana, hemat, kesetiakawanan.

E. Jurnalisme Pesantren sebagai Media Alternatif

Sejalan dengan perkembangan media, terutama dalam konteks demokrasi, globalisasi dan hegemonisasi isi media ini dipandang bisa berakibat melenyapkan pluralitas atau keberagaman yang dibutuhkan bagi tumbuhnya wacana-wacana alternative dalam ruang media. Ida Subandy Ibrahim dan Bachrddin ali Akhmad melalui karya bukunya tentang Komunikasi dan Komodifikasi (mengkaji media dan budaya dalam dinamika globalisasi)[30] mempertegas bahwa perkembangan media alternatif menjadi logis dan penting dalam rangka memberikan ruang bagi suara-suara alternative yang tidak memiliki tempat di media umum atau arus-

[30] Ida Subandy Ibrahim dan Bachrddin ali Akhmad, *Komunikasi dan Komodifikasi* (mengkaji media dan budaya dalam dinamika globalisasi), 2014, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 194.

utama (*Mainstream media)* yang sebagian besar dikuasai oleh korporasi media besar. Ada yang menyebutkan bahwa media alternative ini sebagai media atau penerbitan *independen, disiden, radikal, underground, subversive, non-korporat, progresif, akar rumput (grassroots), akrivis, anarkis, kecil, pinggiran, etnik, subkultur, komunitas dan alternative.*

Dalam sejumlah pembahasan teoretis mengenai media alternatife, ada pandangan misalnya, yang melihat bahwa media jenis ini muncul sebagai repons atau reaksi terhadap kapitalisasi media dan dominasi media arus utama dalam ruang pemberitaan. Dalam hal ini media alternatif menjadi suara alternatif ditengah suara-suara media arus utama yang dikontrol oleh media korporat. Media alternatif mencoba menyarakan dialog publik dan member ruang bagi kaum pinggiran atau marjinal ditengah-tengah dominasi wacana arus-utama.

Tim O'Sullivan (1994), misalnya, mendefinisikan media alternative sebagai bentuk komunikasi massa yang dipandang menolak atau menentang politik yang mapan dan terlembagakan, dalam pengertian bahwa mereka semua menyokong perubahan dalam masyarakat, atau sekurang-kurangnya melakukan penelitian kritis terhadap nilai-nilai tradisional. Karena itu media alternatif juga sering disebut media "radikal" atau media "bawah tanah", lantaran sering bersikap kritis dan berseberangan dengan produksi berita arus utama, dengan merepresentasikan doktrin-doktrin sosial dan politik yang terletak diluar batas-batas yang didefinisikan oleh konsesus.

Masih dalam karya Ida Subandy Ibrahim dan Bachrddin ali Akhmad, dijelaskan bahwa dalam berbagai momen, media alternatif menjadi kekuatan prodemokrasi yang bergerak dibawah tanah dan menggalang suara alternative untuk menumbangkan kekuatan tiranik. Media alternatif biasanya digerakkan oleh berbagai gerakan politik akar-rumput, bawah tanah, kelompok radikal, komunitas etnik, atau subkultur, yang bermaksud memberikan "suara lain" dalam ruang publik. Sebagai media perlawanan, ia melawan hegemoni pemberitaan dan sumber berita yang menopang *status quo.* John D.H Downing menyebut media radikal sebagai media "*that is generally small-scale and … that expresse an alternative vision to hegemonic policies, priorities and perspectives*"[31].

Banyak bentuk media alternatif yang muncul dalam berbagai latar sosial politik dan konteks masyarakatnya. Baik dalam menanggapi sebuah kapitalisasi media korporat maupun dalam berhadapan dengan kekuasaan politik yang dianggap korup dan menindas. Tak heran kalau kemudian muncul berbagai media alternatif baik mengacu pada isi, cakupan, gaya penulisan, maupun sistem distribusi yang secara konsisten berbeda dari lingkungan media dominan atau media arus-utama.

Media alternatif juga bisa muncul sebagai jawaban atas dominasi budaya arus-utama yang membosankan yang sekianlama dianggap telah mendiktekan criteria budaya,

---

[31] Ida Subandy Ibrahim dan Bachrddin ali Akhmad, *Komunikasi dan Komodifikasi* (mengkaji media dan budaya dalam dinamika globalisasi), 2014, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 195

moral, dan nilai dalam masyarakat. Munculnya mdia alteratif dari kelompok-kelompok subkultur biasanya Karena alasan ideologis seperti ini dengan klaimnya yang tak jarang berseberangan dengan pandangan umum atau status *quo.* Sementara itu, gerakan-gerakan alternative dan cultural yang muncul diberbagai media bagi penguatan *civil society* selain menjadi saluran aktifitas bagi para aktivis lingkungan dan pendidikan juga menyebarkan gagasan-gagasan dan progam-progam mereka ke kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menjadi sasaran khusus (*target audiences*) gerakannya. Pesan-pesan media jenis ini biasanya tidak hanya menyuarakan ideologi gerakannya, melainkan juga mengajak khalayak pembacanya untuk bertindak. Dengan memperhatikan kandungan pesan dan latar belakang pemebntukannya, media alternatif jelas bersifat anti-kemapanan (*anti-establishment*). Jadi dalam konteks ini, media alternatis bisa dikatan sebagai media pemberdayaan atau media pembebasan dari struktur yang menindas.

F. Ideologi Pemberitaan Jurnalisme Pesantren

Disadari atau tidak, sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menjadikan media sebagai salah satu jembatan informasi tentang berbagai hal yang terjadi dalam masyarakat, baik yang sedang menjadi perhatian maupun yang luput dari perhatian mereka. Kenyataan menunjukkan, keterlibatan media dalam membentuk suatu opini publik adalah sebuah kekuatan tersendiri yang dimilikinya dan itu sangat berpengaruh dalam tatanan kehidupan di masya-

rakat. Namun, seiring dengan kebebasan pers yang didengungkan dalam reformasi 1998 silam, membuat sebagian media kebablasan menyikapi eforia kebebasan tersebut. Independensi dan kode etik kadang telah tertutupi oleh orientasi bisnis dan keuntungan, sehingga saat ini ¨dapur¨ media telah dimasuki pengaruh kekuasaan, finansial dan kepentingan politik sebagaimana dipertegas dalam konsep hegemoni diatas, Padahal, media sangat memberi andil dan peran penting dalam memberikan informasi terhadap masyarakat dan kecenderungan ini kadang membuat media dalam menyajikan informasinya cenderung membuka peluang untuk terjadinya dramatisasi, manipulasi, spekulasi ataupun justru berusaha untuk tidak menyingkap kebenaran sesuai fakta sesungguhnya.

Oleh karenanya, segelintir masyarakat berusaha memanfaatkan media alternative termasuk dalam hal ini adalah media yang diproduksi oleh kalangan pesantren atau dalam tulisan ini (red. Penulis) sebut sebagai jurnalisme pesantren untuk suatu tujuan sesuai kepentingannya, meskipun hingga kemudian media menjadi sangat sulit memisahkan antara independensi dan keuntungan bisnis, dan terkadang dua kepentingan tersebut membuat media terperosok ke dalam penyajian informasi yang tidak berimbang dan cenderung berpihak pada golongan tertentu. Sesuai dengan pengertiannya, independensi diartikan sebagai kemandirian, dalam artian melepaskan diri dari berbagai kepentingan, mengungkapkan fakta dengan sesungguhnya dan tidak ada bentuk intervensi dari pihak tertentu dalam penyajian informasi. Sehingga dalam membangun

suatu independensi, media alternative harus menyadari bahwa loyalitas utama adalah kepada masyarakat, dan intisari jurnalisme adalah verifikasi data yang akurat, menghindari terjadi benturan kepentingan yang berpotensi kepada pembohongan publik.

Oleh karenanya, kalangan jurnalis santri sebagai seorang jurnalis dalam menjalankan fungsinya, dibarengi sikap kejujuran dalam komitmen, karenanya informasi haruslah tersaji dalam konteks kebenaran, mengetahui urutan sumber berita, transparansi dalam informasi, dan verifikasi berita secara aktual sebelum menyajikannya ke masyarakat. Bila hal tersebut bisa diwujudkan, maka jurnalisme pesantren sebagai media alternative telah melakukan independensi dalam penyampaian informasi.

Diakui bahwa, berdasar pada sejumlah referensi yang ada, sehingga penulis melihat bahwa saat ini, ancaman independensi media sangat beragam, diantaranya adalah: Kekuasaan tidak sepenuhnya dapat di kontrol oleh media sehingga seringkali berbagai kasus penyimpangan yang terjadi hanya dapat diketahui bila ada di antara mereka (dalam lingkup kekuasaan) yang membeberkan kepada media. dan, Adanya konglomerasi atau kepemilikan media yang bersentuhan dengan penguasa, sehingga informasi yang disajikan hanya berdampak pada keuntungan pihak media dan yang bersentuhan langsung dengan-nya.

Ancaman lain pada independensi media adalah Kewenangan redaksi dalam mempublikasikan berita yang diperoleh dari wartawan kadang menimbulkan munculnya intervensi kepada pihak redaksi oleh orang-orang tertentu

yang menganggap pemberitaan tersebut menyudutkan diri atau lingkup sosialnya, Masih maraknya tindak kekerasan dan pengerahan massa oleh kelompok tertentu,sehingga kalangan warta-wan masih khawatir akan keselamatan dirinya dalam peliputan, Terjalinnya hubungan emosional antara wartawan dengan sumber berita, baik hubunganpertemanan, kekeluargaan, suku, maupun profesi sehingga bila ada pemberitaan yangmenyudutkan sumber tersebut ber-usaha untuk segera di tutup tutupi, Masih maraknya budaya amplop dan telepon, utama-nya bagi golongan masyarakat yangmapan dari segi finansial, sehingga mampu mengunci akses pem-beritaan, Upah wartawan yang tidak sebanding dengan resiko pekerjaan, hingga kadangnarasumber melakukan penyuapan kepada mereka.

Selain itu ancaman pada independensi juga ditandai dengan adanya wartawan yang kurang profesional, baik dari segi penyajian berita ataupunpengolahan kata, sehingga masyarakat tidak memahami alur informasi yang diberikan dan bisa menimbulkan adanya kesalahan persepsi dan penafsiran, Masih ditemukannya oknum wartawan yang meng-anggap profesi wartawan sebagai ladang mencari nafkah, sehingga kadang dalam peliputan berita sering melakukan "penjualan" berita kepada narasumber, serta Adanya sikap masa bodoh wartawan tentang kebenaran dan sumber berita (pokoknya yang penting ada berita) menyebabkan seringnya muncul sistem *Cloning* atau *copy-paste* berita oleh sesama wartawan.

Bertolak dari hal tersebut, seyogyanya dalam membangun suatu idealisme dan independensi jurnalistik, media alternatif dituntut untuk menyajikan suatu informasi yang berimbang, tidak memihak apalagi memicu keresahan di masyarakat, tidak mengakomodasi suara-suara yang berbau kekerasan, pesimistis, menghujat, dan mencela golongan tertentu. Menyajikan informasi sesuai fakta sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa melihat latar belakang sumber berita. Manajemen media haruslah memisahkan antara redaksi pemberitaan dan unsur bisnis, sehingga menghindari adanya intervensi pemberitaan karena faktor bi snis dan tidak kalah pentingnya adalah media harus pula memperhatikan kesejahteraan wartawan, sehingga idealisme mereka tidak di kotori oleh kepentingan tertentu. Jika ini telah di lakukan, maka kekuatan media dapat menjadi sebuah kekuatan besar yang sangat disegani oleh semua pihak, dan masyarakat akan semakin menaruh kepercayaan penuh pada keberadaan sajian informasi media.

G. Menjadikan sebagai Perlawanan Alternatif

Seiring dengan ragam ancaman pada independensi media baik yang dipengaruhi oleh kekuasaan yang tidak selalu sepenuhnya dapat di kontrol oleh media sehingga seringkali memicu berbagai kasus penyimpangan yang terjadi sehingga hanya dapat diketahui apabila ada di antara mereka (dalam lingkup kekuasaan) yang membeberkan kepada media. dan, Adanya konglomerasi atau kepemilikan media yang bersentuhan dengan penguasa, sehingga informasi yang disajikan hanya berdampak pada

keuntungan pihak media dan yang bersentuhan langsung dengannya.

Seolah menjadikan keberadaan jurnalisme pesantren sebagai media alternatif menjadi bagian dari perlawanan atas keberadaan media mainstream sebagai arus utama informasi massa. Penulis mempertegas bentuk perlawanan dalam konsep jurnalisme warga ini buka berarti dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tidak terkontrol tetapi perlawanan ini menjadi bagian dari resistensi atas keberadaan media mainstream.

Sementara Konsepsi tentang resistensi penulis mendasarkan pada uraian seperti dikemukakan oleh Stuart Hall yaitu "*as challenges to and negotiations of the dominant order which could not be assimilated to the traditional categories of revolutionary class struggle*[32]". Penegasan lain tentang resistensi penulis juga memahami pendapat Fiske sebagaimana diuraikan oleh Eni Maryani dalam karya bukunya tentang Media dan Perubahan Sosial[33] yaitu memahaminya dalam dua tipe yang berkaitan dengan dua bentuk kekuasaan sosial. Pertama, semiotic power adalah kekuatan untuk mengonstruksikan makna, kesenangan, dan identitas sosial. Kedua, kekuasaan sosial yaitu kekuasaan untuk mengonstruksikan sistem sosial ekonomi.

Dikatakan Hall bahwa resistensi bukan suatu kualitas tindakan yang tetap melainkan sebagai sesuatu yang

---

[32] Barker, Cris, *Cultural Studies: Theory and Practice,* First published, Sage Publication, Londonn, 2000.hal 341

[33] Eni Maryani, 2016, *Media dan Perubahan Sosial, Suara Perlawanan melalui Radio Komunitas,* PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal. 59

relasional dan konjungtural. Artinya, resistensi tidak dipahami sebagai sesuatu yang tunggal dan universal. Resistensi adalah sesuatu yang terbentuk oleh berbagai repertoar yang maknanya bersifat khas untuk waktu, tempat dan hubungan sosial tertentu. Sejalan dengan pendapat Hall maka pengertian resistensi seharusnya didasarkan pada pemahaman tentang konteks dan historis masyarakatnya, terutama ketika berusaha memahami resistensi yang dilakukan sebuah komunitas[34].

Inilah yang menuntut Scott sebagaimana diuraikan oleh Eni Maryani meninjau pengertian resistensi secara umum yang menafikan situasi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Karena seringkali pengertian resistensi yang digunakan justru ada dalam kerangka kelompok dominan sehingga tidak mampu menangkap fenomena resistensi yang sebenarnya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertindas atau termarjinalkan.

Mengawali upaya untuk memahami pengertian resistensi yang mampu menangkap gejala resistensi yang dilakukan oleh kelompok yang tertindas atau termarjinalkan Scott menyimpulkan berbagai pandangan tentang resistensi. Berdasarkan berbagai pengertian dan konsep yang ada Scott menyimpulkan bahwa ada dikotomi antara pengertian tentang aksi atau tindakan yang dimaknai sebagai perlawanan yang real dengan aksi kecil-kecilan, insidental bahkan dianggap sebagai gejala sekunder suatu kejahatan.

---

[34] Barker, Cris, *Cultural Studies: Theory and Practice,* First published, Sage Publication, Londonn, 2000.hal 455

Perlawanan diartikan sebagai sesuatu yang bersifat a) organik, sistematik, kooperatlf, b) berprinsip tidak mementingkan diri sendiri, c) berkonsekuensi revolusioner dan atau d) mencakup gagasan atau maksud-maksud yang meniadakan basis dominasi itu sendiri. Berlawanan dengan itu kegiatan kecil-kecilan, insidental atau yang bersifat gejala kejahatan adalah a) tidak teratur, tidak sistematik dan terjadi secara individual, b) bersifat opurtunistik dan mementingkan diri sendiri, c) tidak berkonsekuensi revolusioner dan atau, d) menyiratkan dalam maksud dan arti mereka, akomodasi terhadap sistem dominasi.

Berdasarkan pengertian resistensi yang ada dan realitas media mainstream, resistensi yang bisa dilakukan oleh kalangan komunitas santri melalui jurnalisme pesantren tampaknya tidak dapat dilepaskan dengan fenomena dominasi dan hegemoni media –media mainstream. resistensi tidak selalu dilakukan oleh komunitas pesantren dalam bentuk perlawanan terbuka. Karena resistensi juga memiliki beragam bentuk baik secara kelompok maupun individu. Secara kelompok resistensi dalam komunitas pesantren dapat diwujudkan secara struktural melalui kegiatan-kegiatan jurnalisme pesantren yang dinilai memiliki kekuatan untuk mempertahankan eksistensinya. SementarasSecara individual boleh jadi terlihat hanya untuk menjaga kelangsungan hidup bagi kalangan santri dan pesantren, akan tetapi sebenarnya perlawanan individu ini terkait atau berakibat pada struktur dominanasi dan hegemoni pada media –media mainstream. []

Bab III
Jurnalisme Pesantren: Media Alternatif Pesantren

A. Journal, Jurnalistik, Jurnalisme

Pemaknaan tentang jurnal, jurnalistik, dan jurnalisme tidak bisa dilepaskan dengan arti harfiyah, konseptual, dan pengertian praktis. Sebab, ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling terkait. Sebagaimana dinyatakan Kusumaningrat[35], jurnalistik atau *juornalisme* berasal dari perkataan *journal*, artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-

[35] Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 15.

hari, atau bisa juga berarti surat kabar. *Journal* berasal dari perkataan Latin *diurnalis*, artinya harian atau tiap hari. Dari perkataan itu lahir kata jurnalis, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. Kusumaningrat mengutip pandangan McDougall yang menyebutkan bahwa *journalisme* adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa.

Menurut Romli[36], secara harfiyah, jurnalistik (*journalistic*) artinya kewartawanan atau hal-ikhwal pemberitaan. Kata dasarnya "jurnal" (journal), artinya laporan atau catatan, atau "Tour" dalam bahasa Perancis yang berarti "hari" (*day*) atau "catatan harian" (*diary*). Dalam bahasa Belanda, *journalistiek* artinya penyiaran catatan harian. Asal muasal istilah jurnalistik berasal dari bahasa Yunani kuno, "du Tour" yang berarti hari, yakni kejadian hari ini yang diberitakan dalam lembaran tercetak, merujuk pada asal mula munculnya media massa yang disebut *Acta Diurna* pada zaman Romawi kuno di bawah pemerintahan Raja Julius Cesar.

Sekitar 60 tahun Sebelum Masehi (SM) di zaman Romawi kuno sudah muncul media untuk pernyataan umum yang kemudian dikenal sebagai surat kabar, seperti yang kita kenal

---

[36] Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Terapan* (Bandung: Batic Press, 2005), 1-2. Romli juga menyebutkan pengertian itu menurut kamus bahasa Inggris bahwa kata journal diartikan sebagai pelaporan, pencatatan, penulisan, atau perekaman kejadian. Kamus *The Oxford Paperback Dictionary* mengartikan *journal* sebagai "sebuah rekaman berita, kejadian, atau transaksi bisnis sehari-hari (*a diary record of news or event or bbusiness transaction*) dan surat kabar atau berkala (*a newspaper or periodical*)". John M. Echols dan Hasan Shadily dalam Kamus Inggris-Indonesia mengartikan *journal* dengan majalah, surat kabar, dan *diary* atau buku catatan harian. *Journalistic* sendiri diartikan sebagai "mengenai kewartawanan".

saat ini. Adapun media tersebut diberi nama Acta Senatus atau Acta Diurna Populi Romawi. Avta Diurna Populi Romawu yang disingkat dengan Acta Diurna terbit setiap hari dan isinya memuat pengumuman dari Kaisar Roma dan berita-berita kegiatan kekaisaran lainnya yang ditempel atau dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum. Pada mulanya Avta Diurna ditulis di meja dan setiap orang yang melintasinya dapat membacanya. Orang yang tidak mendapat kesempatan membaca langsung disana atau pun tidak sempat datang ke Roma untuk mengunjungi meja itu dapat memesan kepada orang lain untuk mencatat isi beritanya. Orang yang mencatat disebut Actuari atau pencatat berita[37].

Berdasarkan arti teks tersebut, menurut penulis, istilah jurnalisme bisa dimaknai sebagai bentuk paham jurnalistik mengingat kata-kata *isme* berarti paham, ajaran, atau kepercayaan[38]. Dalam konteks lain, dapat pula dinyatakan bahwa jurnalisme merupakan paham yang mengajarkan tentang tindakan seorang wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Sedangkan jurnalistik berarti kegiatan sebagai bentuk kata sifat atau *ajektif* dari jurnalisme itu sendiri. Apabila mengacu kepada undang-undang pers, maka aktivitas jurnalistik memiliki makna yang khusus (*lex specialis*), yakni kegiatan jurnalistik yang sudah dibatasi realitasnya dalam definisi tersebut, sehingga berbeda dengan bentuk kegiatan komunikasi yang lain. Mengenai kekhususan kegiatan

---

[37] Sedia Willing Barus, *Jurnalistik; Petunjuk Teknis menulis Berita* (Jakarta: Erlangga, 2010), 4.

[38] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online disebutkan *isme* sebagai sufik pembentuk nomina diartikan sebagai sistem kepercaya-an berdasarkan politik, sosial atau ekonomi. Contohnya, terorisme, liberalisme, komunisme. http://kbbi.web.id/-is%20isme, 28 Mei 2016.

jurnalistik tersebut dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 bahwa kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia[39]. Berdasarkan pandangan dalam undang-undang pers tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.
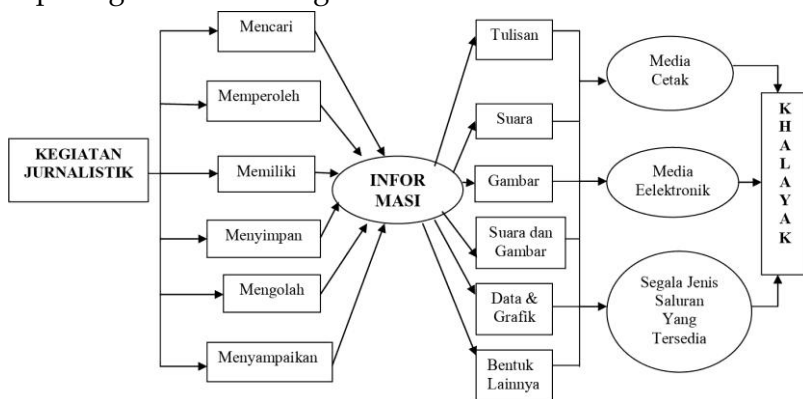
Sumber: Diolah penulis 2016.

Secara konseptual, menurut Romli, jurnalistik dapat dipahami dari tiga sudut pandang, yakni sebagai proses, teknik, dan ilmu. *Pertama*, sebagai proses, jurnalistik adalah "aktivitas" mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh wartawan (jurnalis). *Kedua*, sebagai teknik, jurnalistik adalah "keahlian" (*expertise*) atau "keterampilan" (*skill*) menulis

---

[39] Kun Wazis, *Media Massa dan Konstruksi Realitas* (Malang: Aditya Media Publisihing, 2012), 184.

karya jurnalistik (berita, artikel, feature) termasuk keahlian dalam pengumpulan bahan penulisan seperti peliputan peristiwa (reportase) dan wawancara. *Ketiga*, sebagai ilmu, jurnalistik adalah "bidang kajian" mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi (peristiwa, opini, pemikiran, ide) melalui media massa. Jurnalistik termasuk ilmu terapan (*applied science*) yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan dinamika masyarakat itu sendiri[40].

Pandangan Romli dapat merepresentasikan bagaimana dunia jurnalistik tersebut bekerja. Sebagai sebuah proses, jurnalistik merupakan aktivitas khusus yag terkait dengan "kata-kata" atau produk teks, produk pesan,

Romli menegaskan, secara praktis, jurnalistik adalah proses pembuatan informasi atau berita (*news procesing*) dan penyebarluasannya melalui media massa. Dari pengertian kedua ini, kita dapat melihat adanya empat komponen dalam dunia jurnalistik: 1) informasi, yakni keterangan, pesan, gagasan, atau pemberitahuan tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam definisi jurnalistik di atas, informasi yang dimaksud adalah *news* (berita), *views* (pandangan atau opini), dan karangan khas yang disebut *feature*; 2) penyusunan informasi, aktivitas penulisan atau penyusunan berita, opini, dan feature untuk dipublikasikan atau dimuat di media massa; 3) penyebarluasan informasi, adalah penyebarluasan media massa yang berisikan berita, opini, feature yang ditulis oleh wartawan atau penulis; 4) media massa, merupakan *channel of*

---

[40] Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Terapan* (Bandung: Batic Press, 2005), 1-2.

massa communications, yaitu saluran, alat, atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa[41].

Pandangan mengenai jurnalisme atau jurnalistik dikemukakan ilmuwan komunikasi Effendy[42] yang menilai bahwa istilah *jurnalisme* dimaknai sama dengan jurnalistik dalam bahasa Indonesia dan *Journalistiek* dalam istilah bahasa Belanda. Artinya adalah kegiatan mengelola berita, mulai dari peliputan peristiwa melalui penyusunan kisah berita sampai pada penyebaran berita yang sudah tuntas kepada khalayak. Istilah *journal* sendiri dimaknai dalam dua hal, yakni 1) penerbitan yang tidak termasuk surat kabar dan majalah, yang beredar secara teratur; 2) acara siaran radio atau televisi yang bersifat informatif yang diudarakan setiap hari secara berangkai mengenai suatu peristiwa yang diselenggarakan secara berencana, misalnya jurnal pekan olahraga nasional atau internasional. Sedangkan istilah *journalis* (jurnalis/ wartawan) berarti seorang petugas media massa surat kabar, majalah, radio, atau televisi yang profesinya mengelola pemberitaan,

---

[41] Ibid, 3-5.

[42] Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 195. Berbagai istilah jurnalistik juga disebutkan Effendy, misalnya *journalistic conscience* (hati nurani jurnalistik) yang diartikan sebagai kesadaran seorang wartawan dalam melaksanakn profesi jurnalismenya akan tanggung-jawabnya terhadap dirinya sendiri, kepada masyarakat, kepada negara, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa; *journalistik communications* (komunikasi jurnalistik) diartikan sebagai komunikasi yang berkaitan dengan kegiatan pemberitaan melalui media massa pers, radio, dan televisi; dan *journalistic style* (gaya bahasa media massa) yang diartikan sebagai gaya bahasa khas media massa, yang berbeda dari tulisan lainnya, disebabkan sifatnya yang informatif mengenai kejadian sehari-hari untuk khalayak berpendidikan rata-rata dengan memperhitungkan keterbatasan halaman serta jenis ukuran huruf.

yakni meliput peristiwa yang terjadi di masyarakat, menyusun kisah berita, dan menyebarkan berita yang sudah tuntas kepada khalayak.

Jenis-Jenis Jurnalisme

Berdasarkan makna tersebut, Effendy[43] memaparkan berbagai jenis jurnalisme dalam bukunya Kamus Komunikasi (1989), yaitu jurnalisme alkohol (*alcohol journalism*), jurnalisme baru (*new journalism*), jurnalisme jazz (*jazz journalism*), jurnalisme komprehensif (*Comprehensive journalism*), jurnalisme pembangunan (*Development journalism*), jurnalisme permusuhan (*adversary journalism*), jurnalisme presisi (*precision journalism*), jurnalisme sogokan (*checkbook journalism*), jurnalisme tak berpribadi (*goverment Say-So-Journalism*). Lebih lanjut Effendi menjelaskan pengertian dari masing-masing jenis jurnalisme sebagai berikut.

1. Jurnalisme alkohol (*alcohol journalism*), kegiatan mengolah berita yang dilakukan seorang wartawan tanpa memperdulikan kehormatan suatu bangsa atau lembaga[44].

---

[43] *Ibid*, 425. Dalam pandangan yang lain disebutkan ada 15 jenis jurnalisme yang dikenal, diantaranya jurnalisme suci, jurnalisme revolusioner, jurnalisme profetik, jurnalisme proses, jurnalisme pro pemerintah, jurnalisme pembangunan, jurnalisme oposisi, jurnalisme jazz, jurnalisme kasak-kusuk, jurnalisme got, jurnalisme foya-foya, jurnalisme damai, jurnalisme buku cek, jurnalisme baru, dan jurnalisme alkohol. Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Terapan* (Bandung: Batic Press, 2005), 20-23.

[44] Ibid, 13. Berita diartikan sebagai laporan mengenai hal atau peristiwa yang baru terjadi, menyangkut kepentingan umum, dan disiarkan secara cepat oleh media massa: surat kabar, maalah, radio siaran, dan televisi siaran. Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 238.

2. Jurnalisme baru (*new journalism*), kegiatan mengolah berita tidak berdasarkan fakta semata-mata yang dilihat seorang wartawan dengan mata secara inderawi, melainkan memadukannya dengan pendapat dan perasaannya dalam dimensi ruang dan waktu, sehingga khalayak selain menjadi tahu, juga berpandangan dalam cakrawala yang luas; kadang-kadang disebut jurnalisme sastra atau jurnalisme novel[45].
3. Jurnalisme jazz (*jazz journalism*), kegiatan mengolah berita yang dilakukan seorang wartawan dengan memasukkan unsur-unsur yang membuatnya menjadi sensasional[46].
4. Jurnalisme komprehensif (*Comprehensive journalism*), kegiatan mengolah berita yang dilakukan seorang wartawan secara lengkap meliputi semua unsur, faktor, dan aspek yang terkait dengan peristiwa yang dilaporkan[47].
5. Jurnalisme pembangunan (*Development journalism*), kegiatan meliput, mengolah, dan menyiarkan laporan peristiwa untuk mengubah sikap, pandangan, dan perilaku khalayak, dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasaan batiniah, yang dalam keselarasannya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat[48].

---

[45] Ibid, 237-238.

[46] Ibid, 194. Dalam pengertian yang lain disebutkan *jurnalistik jazz* yang mengacu pada pemberitaan hal-hal yang sensasional, menggemparkan atau menggegerkan, seperti meramu gosip atau rumor. Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Terapan* (Bandung: Batic Press, 2005), 22.

[47] Ibid, 67-68.

[48] Ibid, 94.

6. Jurnalisme permusuhan (*adversary journalism)*, kegiatan mengolah berita yang dilakukan seorang wartawan, yang sifatnya menentang kebijaksanaan pemerintah[49].
7. Jurnalisme presisi (*precision journalism*), jurnalistik yang dilancarkan, baik oleh media massa cetak maupun media massa elektronik, dengan didasari hasil penelitian empiris[50].
8. Jurnalisme sogokan (*check book journalism*), kegiatan mengolah berita yang dilakukan seorang wartawan, yang bahannya diperoleh dari sumber dengan jalan memberi uang[51].
9. Jurnalisme tak berpribadi (*goverment Say-So-Journalism*), kegiatan mengolah berita yang dilakukan seorang wartawan, yang demi keamanan diri si wartawan dan lembaga yang diwakilinya, bernada menyenangkan pemerintah[52].

Keberagaman jurnalisme tersebut memberikan indikasi bahwa jurnalistik bermakna cair, dinamis, dan tidak tunggal. Istilah yang melekat setelah kata jurnalisme menunjukkan masih terbukanya ruang jurnalisme "gaya baru" sebagai bentuk

---

[49] Ibid, 8.

[50] Ibid, 280. *Mass media* (media massa) diartikan sebagai media komunikasi yang mampu menimbulkan keserempakan, dalam arti kata khalayak dalam jumlah yang relatif sangat banyak secara bersama-sama pada saat yang sama memperhatikan pesan yang dkomunikasikan melalui media tersebut; misalnya surat kabar, radio siaran, televisi siaran, dan film teatrikal yang ditayangkan di gedung bioskop. Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 217.

[51] Ibid, 48.

[52] Ibid, 153.

yang dapat dialamatkan dalam konteks tertentu. Sebagaimana dinyatakan Romli bahwa ada 15 jenis jurnalisme---yakni paham, aliran, teknik, desain, atau gaya pemberitaan atau pelaporan---yang menjabarkan visi dan misi sebuah perusahaan pers. Diantaranya jurnalisme damai (*peace journalism*), yakni jurnalistik yang memperjuangkan tegaknya perdamaian atau persahabatan dengan isi pemberitaan yang tidak memanaskan situasi, tetapi mencoba mencari titik temu antara pihak-pihak yang bertikai. Jurnalisme foya-foya (*jungket journalism*), praktek jurnalistik dengan mengadakan perjalanan atau kunjungan yang diongkosi si pengundang. Jurnalisme Got (*gutter journalism*), gaya jurnalistik yang lebih menonjolkan pemberitaan tentang dunia hitam atau dunia kotor, yakni seks dan kejahatan (*sex and crime journalism*), yang kemudian menghasilkan *Yellow Papers* (koran kuning)[53]. Jurnalisme revolusioner (*revolutionary journalism*), aliran jurnalistik yang pemberitaannya berisi perlawanan terhadap kekuasaan asing (penjajah) atau penguasa zhalim, memperjuangkan masyarakat yang adil, mendorong adanya perubahan, mengatasi keadaan yang meletup-letup, atau memperjuangkan perbaikan kehidupan masyarakat.

Istilah lain yang dapat ditemukan adalah jurnalisme empati (*empathy journalism*), yakni istilah jurnalisme yang erat kaitannya dengan rasa empati dan iba dalam diri wartawan yang tumbuh ketika tengah melakukan tugas jurnalistik (meliput berita). Untuk melakukan ini jurnalisme ini, wartawan

---

[53] Istilah lain yang muncul adalah *Yellow Journalism*, yakni berita yang menekankan pada kejahatan, seks, dan kekerasan; disebut juga jazz journalism dan jurnalisme tabloid. Shirley Biagi, *Media Impact* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 73.

harus bisa membangun empati dengan narasumbernya sehingga menghilangkan jarak antara wartawan dan nara sumber. Jurnalisme advokasi (*advocacy journalism*) merupakan kegiatan jurnalistik yang dilakukan seorang wartawan dengan cara menyuntikkan opini ke dalam berita. Berdasarkan hasil reportase, wartawan mengarahkan fakta untuk membentuk opini[54].

Fenomena jurnalisme juga disuarakan oleh kalangan akademisi dengan mendasarkan pada realitas yang dilaporkan media massa tersebut. Sebagaimana dinyatakan Nurudin[55], bahwa kebebasan pers yang diberikan ternyata juga berimplikasi negatif. Salah satnya adalah berkembanganya jurnalisme "lher" yang pernah berkembang pada tahun 80-an. Pers seolah kehilangan kendali karena hanya menuruti permintaan pasar semata. Jurnalisme "*lher*" yang dimaksudkan adalah suatu bentuk pemberitaan/ foto/ judul yang disamping menampilkan paha dan dada wanita dari berbagai pose yang mencolok juga disertai judul-judul asosiatif buat pembacanya yang mengarah kepada seks. Meskipun, judul-judul itu hanya berhubungan dengan profesi keartisan. Pandangan Nurudin tersebut pada perkembangannya juga masih saja terjadi seiring banyaknya media massa yang bermunculan dengan mengusung tema "seks dan kekerasan" sehingga muncul istilah jurnalisme porno atau jurnalisme cabul.

Media TVRI juga menggunakan istilah jurnalisme khalayak untuk mendekatkan media dengan pemirsa. Caranya,

---

[54] Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Terapan* (Bandung: Batic Press, 2005), 20-23

[55] Nurudin, *Pers dalam Lipatan Kekuasaan* (Malang: UMM Press, 2003), 88-89.

TVRI mengajak khalayak pemirsa untuk mengirimkan video peristiwa yang berhasil diliput warga melalui email. Melalui pesan *running text* yang muncul di layar TVRI (dilihat penulis Kamis, 9 Juni 2016), video hasil kiriman pemirsa tersebut akan ditayangkan TVRI dalam program Jurnalisme Khalayak setiap hari Kamis, pukul 13.30. Selengkapnya pesan tersebut berbunyi, *"Kirimkan video jurnalistik Anda ke email: beritaredaksi@tvri.co.id. Video kiriman Anda akan Kami tayangkan pada program Jurnalisme Khalayak setiap Kamis pukul13.30 WIB,"* Hal ini menunjukkan bahwa jurnalisme telah berkembang sangat luas. Jauh sebelumnya, sebelumnya, Metro TV juga sudah mempunyai program serupa dengan nama Jurnalisme Warga yang memuat tentang tayangan hasil reportase masyarakat umum yang dianggap merepresentasikan peristiwa di berbagai tempat. Media Kompas memiliki Kompasiana yang merupakan bentuk dari Jurnalisme Warga, sebagaimana koran Surya yang terbit di Jawa Timur memiliki kolom Citizen Journalism untuk mengapresiasi laporan atau reportase dari masyarakat langsung. Dalam rangka mendekatkan dengan khalayaknya, sebagian besar media massa menyediakan ruang jurnalisme warga tersebut.

Jenis jurnalisme yang populer di kalangan wartawan adalah jurnalisme investigasi. Santana dan Laksono memaparkan mengenai jurnalisme investigasi tersebut dalam bukunya. Santana[56] menyebut bahwa terminologi *investigative journalism* memberikan atribut penyelidikan, keingintahuan, dan misi tertentu dari para wartawannya. Mengutip pendapat Burgh, pelbagai kasus-kasus investigasi itu meliputi permasalahan,

---

[56] Septiawan Santana K., *Jurnalisme Investigasi* (Jakarta: Yayasan Obor, 2003), 97-98.

yaitu: 1) hal-hal yang memalukan, biasanya terkait dengan hal yang ilegal, atau pelanggaran moral; 2) penyalahgunaan kekuasaan; 3) dasar faktual dari hal-hal aktual yang tengah menjadi pembicaraan publik; 4) keadilan yang korup; 5) manipulasi laporan keuangan; 6) bagaimana hukum dilanggar; 7) perbedaan antara profesi dan praktisi; dan 8) hal-hal yang sengaja disembunyikan. Sedangkan Laksono[57] memberikan batasan mengenai elemen jurnalisme investigasi sebagai berikut: 1) mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik atau tindakan yang merugikan orang lain; 2) skala dari kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas atau sistematis (ada kaitan atau benang merah); 3) menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan memetakan persoalan dengan gamblang; 4) mendudukkan aktor-aktor yang terlibat secara lugas, didukung bukti-bukti yang kuat; 5) publik bisa memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan dan bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan itu.

B. Ciri-Ciri Jurnalisme

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, kehadiran jurnalisme memiliki karakter yang bisa diidentifikasi dari definisi atau makna yang dimaksudkan. Identitas jurnalisme dapat dilihat dari pembentukan (konstruksi) berita, jurnalis yang memproduksi berita, media yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan, dan khalayak yang menjadi sasaran media tersebut. Jurnalisme mensyaratkan berita sebagai kegiatan utama, orang-orang yang melaporkan peristiwa

---

[57] Dandhy Dwi Laksono, *Jurnalisme Investigasi* (Bandung: Kaifa, 2010), 23-24.

(wartawan) memiliki keahlian tertentu, media komunikasi yang digunakan memiliki visi dan misi tertentu, serta heterogenitas khalayak merupakan orang-orang yang memilih media sesuai dengan kebutuhannya. Agar memenuhi suatu kriteria sebuah jurnalisme, maka berita, jurnalis, media massa harus menjadi syarat utama. Ketiganya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Untuk membangun sebuah jurnalisme membutuhkan jurnalis, jurnalis membutuhkan media massa, dan berita yang disebarluaskan. Pemaknaan ini bisa digambarkan sebagai berikut.
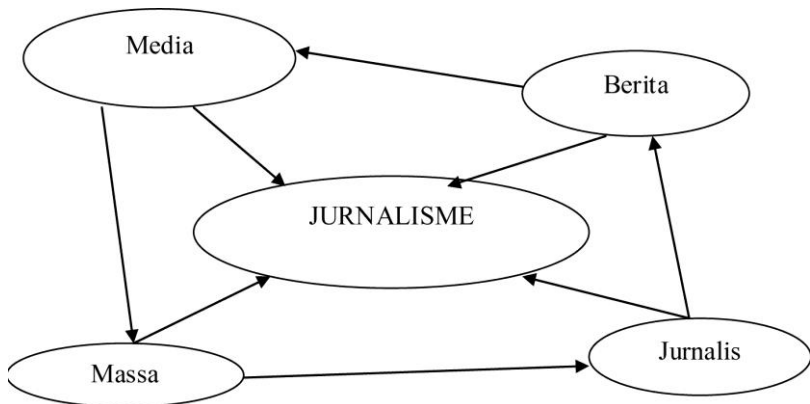
Sumber: Diolah penulis, 2016.

Berdasarkan bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa jurnalisme dibangun atas berita, jurnalis, media, dan massa. Keempat elemen tersebut saling mendukung dan saling terkait. Untuk memproduksi berita, sebuah media membutuhkan jurnalis yang bertugas untuk menggali data di lapangan. Jurnalis tidak bisa mendapatkan sumber data yang lengkap jika tidak ada massa (nara sumber) yang dapat dipilih sebagai sumber berita yang representatif. Demikian juga, media yang sudah selesai dikerjakan tidak akan ada manfaatnya ketika

massa (sebagai penikmat) media tidak memilihnya sebagai produk yang layak dinikmati. Massa sendiri membutuhkan jurnalis agar kegiatan yang dilakukan dapat disosialisasikan ke tengah-tengah khalayak melalui media yang memberitakan kegiatan massa.

Berita Media

Berita berasal dari bahasa Sansekerta "*Vrit*" yang dalam bahasa Inggris disebut "*Write*", arti sebenarnya ialah "Ada" atau "Terjadi". Ada juga yang menyebut dengan "*Vrtta*" artinya "Kejadian" atau "Yang telah terjadi". *Vritta* dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi "Berita" atau "warta". Menurut Kamus Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwodarminto, berita berarti kabar atau warta. Kamus Besar Bahasa Indonesia rumusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, memperjelas arti berita, yakni laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi menurut artinya, berita dapat dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi[58].

Kata kunci berita dalam definisi tersebut adalah peristiwa yang terjadi. Namun, dalam perkembangannya, berita yang sedang terjadi pun dapat menjadi liputan yang menarik. Dalam banyak kasus, televisi melaporkan kejadian-kejadian yang sedang terjadi secara *live* sehingga menarik perhatian publik. Bahkan, media massa online saat ini juga saling berlomba untuk memberitahuan peristiwa yang diliputnya secara online, misalnya melalui program streaming. Aktualitas peristiwa akhirnya berkembang tidak hanya yang sudah terjadi, tetapi

---

[58] Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 1.

yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi pun dapat menjadi berita yang menarik.

Berita adalah laporan atau pemberitahuan tentang peristiwa aktual yang menarik perhatian orang banyak. Peristiwa yang melibatkan fakta dan data yang ada di alam semesta ini, yang terjadinya pun aktual dalam arti "baru saja" atau hangat dibicarakan orang banyak. Adapun cara melaporkan atau memberitakan sesuatu, supaya menarik perhatian orang banyak, orang lazim melakukannya dengan gaya "*to the point*" atau "diplomatis". Demikian pula dalam hal membuat dan menyajikan berita secara jurnalistik, ada jenis berita yang langsung (*to the point*) dengan mengemukakan fakta yang terlibat didalamnya dan disebut straight news, serta yang tidak langsung dalam arti dibumbui kata-kata berbunga (diplomatis) sehingga fakta yang tampaknya sepele menjadi menarik untuk diminati dan dinikmati dan jenis ini disebut *features*[59].

Sebuah berita dikatakan menarik perhatian khalayak jika terdapat ukuran-ukuran yang jelas. Sebab, menarik bersifat relatif, tergantung pada perspektif seseorang dalam melihat realitas. Sudut pandang yang beragam ini pula yang kemudian memunculkan berbagai jenis berita, seperti berita politik, berita

---

[59]Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik* (Bandung: Nuansa, 2010), 103-104. Mengutip Van Haeringen dan Wojowasito, Suhandang mengungkapkan, secara etimologis istilah "berita" dalam bahasa Indonesia mendekati istilah "bericht (en)" dalam bahasa Belanda. Besar kemungkinan kedua istilah itu berketurunan mengingat Indonesia lama dijajah Belanda. Dalam bahasa Belanda istilah "bericht (en)" dijelaskan sebagai "medeling" (pengumuman) yang berakar kata dari "made (delen)" dengan sinonim pada "beken maken" (memberitahukan, mengumumkan, membuat terkenal) dan "vertelen" (menceritakan atau memberitahukan).

ekonomi, berita sosial, berita budaya, berita pendidikan, berita olahraga, berita korupsi, berita kriminal, berita seni, berita pertanian, dan beragam jenis berita. Dengan demikian, masing-masing media memiliki standar berita yang berbeda dengan media lainnya. Jawa Pos misalnya, memiliki cara pandang yang menarik terhadap peristiwa yang diberitakan dengan ukuran-ukuran, seperti baru, unik, dramatik, aktual, proximity (kedekatan), magnitude (daya tarik), tokoh, eksklusif, kontro-versi, mission. Hal ini menunjukkan bahwa realitas berita bersifat cair, ganda, dan tidak bisa dimaknai secara tunggal. Perspektif menarik terhadap peristiwa dengan ukuran yang berbeda-beda tersebut meneguhkan bahwa realitas peristiwa yang dibuat oleh media massa tidak bisa disamakan.

Berita merupakan sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan media massa. Faktor peristiwa atau keadaan menjadi pemicu utama terjadinya sebuah berita. Dengan kata lain, peristiwa atau keadaan itu merupakan fakta atau kondisi yang sesungguhnya terjadi, bukan rekaan atau fiksi penulisnya[60]. Perspektif yang lain, Soehoet menyebutkan pengertian (definisi) berita sebagai berikut: a) berita adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia; b) berita bagi seseorang adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia yang perlu baginya untuk mewujudkan filsafat hidupnya; dan c) berita bagi surat kabar adalah

---

[60]Husnun N. Djuraid, *Panduan Menulis Berita* (Malang: UMM Press, 2006), 11.

keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan yang perlu bagi pembacanya untuk mewujudkan filsafat hidupnya[61].

Dengan demikian jelas, bahwa berita dibuat oleh seorang wartawan yang terjun ke lapangan untuk melihat peristiwa tersebut, kemudian diolah dengan standar redaksional sebelum dimuat di media massa. Pekerjaan utama wartawan adalah mengisahkan hasil reportasenya kepada khalayak. Dengan demikian, mereka selalu terlibat dalam usaha-usaha mengontruksikan realitas, yakni menyusun fakta yang dikumpulkannya ke dalam suatu bentuk laporan jurnalistik berupa berita (*news*), karangan khas (*feature*), atau gabungan keduanya (*news feature*). Karena menceritakan pelbagai kejadian atau peristiwa itulah, maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa seluruh isi media adalah realitas yang telah di-konstruksikan (*constructed reality*)[62].

Jurnalis

Jurnalisme tidak bisa terwujud tanpa adanya jurnalis atau wartawan atau reporter yang melakukan kegiatan jurnalistik. Untuk mengetahui idealitas profesi wartawan, penulis sepakat bahwa kode etik jurnalistik yang disepakati 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia pada 14 Maret 2006 di Jakarta sebagai standar bagaimana seharusnya wartawan bekerja[63]. Meskipun pada kenyataannya, ada saja oknum wartawan yang bekerja menabrak aturan dalam kode

---

[61]Hoeta Soehoet, *Dasar-Dasar Jurnalistik* (Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta-IISIP,), 23.

[62]Alex Sobur, *Analisis Teks* Media (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 89

[63] Kun Wazis, *Media Massa dan Konstruksi Realitas* (Malang: Aditya Media Publisihing, 2012), 193-199.

etik jurnalistik Indonesia yang terdiri dari 11 pasar tersebut. Secara ringkas kesebelas pasal dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Penafsiran terhadap pasal ini adalah: a) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers; b) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi; c) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara; dan d) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran terhadap pasal 2 ini bahwa cara-cara yang profesional adalah: a) menunjukkan identitas diri kepada narasumber; b) menghormati hak privasi; c) tidak menyuap; d) menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; e) rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; f) menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; g) tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; h) penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga

tak bersalah. Penafsiran terhadap pasal 3 ini adalah : a) Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu; b) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional; c) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta; dan d) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsiran terhadap pasal 4 ini adalah: a) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi; b) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk; c) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan; d) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi; e) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Menurut penulis, meski sudah banyak ditaati, namun masih ada beberapa media yang menggambar-kan peristiwa kejahatan secara sadis dalam deskripsi pem-beritaannya, misalnya dalam kasus pemerkosaan atau pem-bunuhan.

Kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran terhadap pasal 5 ini adalah: a) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang

yang memudahkan orang lain untuk melacak; b) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Menurut penulis, makna pasal ini terkait dengan aspek kemanusiaan agar tidak berdampak pada pengaruh traumatik-psikologis---sebagaimana banyak disampaikan para psikolog---pada anak yang melakukan kejahatan, seperti kasus pemerkosaan, pencabulan, dan seks bebas. Dengan alasan tersebut, tampilan gambar tidak boleh ditampilkan wajah penuh atau dengan teknik manipulasi foto. Hanya saja, masih ada media massa yang kurang jeli, sehingga masih lolos editing.

Keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran terhadap pasal 6 ini adalah: a) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum; b) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Menurut penulis, makna yang dapat dipahami dari pasal ini menegaskan bahwa pekerjaan wartawan adalah profesionalitas, sehingga harus dibedakan antara kepentingan pribadi dengan tugas. Kasus pemerasan yang dilakukan oknum wartawan kepada sumber berita adalah tindakan pidana, bukan kegiatan jurnalistik, sehingga pengusutannya adalah hukum pidada.

Ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "*off the record*" sesuai dengan kesepakatan. Penafsiran atas pasal 7 ini adalah: a) Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan

keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya; b) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber; c) Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya; d) "*Off the record*" adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Kedelapan, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Penafsiran terhadap pasal 8 ini adalah: a) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas; b) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Menurut penulis, pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam media massa. Bukan karena memiliki kekuatan kapital besar, mereka mendominasi isi pemberitaan media, sehingga mereka yang tidak bisa menguasai media dianggap sebagai kaum lemah. Keadilan dalam bermedia harus ditegakkan agar suara "kebenaran" tidak hanya perspektif orang yang sering muncul di media saja.

Kesembilan, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran terhadap pasal 9 ini adalah: a) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati; b) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait

dengan kepentingan publik. Menurut penulis, etika dalam pasal ini penting dijaga karena banyak kasus pemberitaan media massa yang menjadi kehidupan pribadi sebagai komoditas publik, dengan alasan sumber berita menjadi publik figur. Komitmen wartawan untuk menghormati kehidupan pribadi juga bermaksud agar berita tidak bias terhadap kasus yang sedang diangkat.

Kesepuluh, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran terhadap pasal 10 ini adalah: a) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar; b) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Menurut penulis, terhadap pasal ini, memang masih multitafsir mengenai besar kecilnya halaman permohonan maaf terhadap berita yang keliru tersebut. Sejumlah kasus menyebutkan bahwa permintaan maaf sering kali tidak proporsional dengan berita yang dimuat sebelumnya dan menjadi reportase penting media tersebut, sehingga menjadi "berita besar" di media tersebut. Akibatnya, permohonan maaf belum sepenuhnya menjawab realitas yang keliru, apalagi jika pemerhati media massa tidak membaca pada edisi permohonan maaf tersebut.

Kesebelas, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran terhadap pasal 11 adalah: a) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya; b) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan

kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain; c) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Menurut penulis, sejumlah media massa masih belum proporsional dalam melakukan koreksi terhadap kesalahan pemberitaan karena antara berita yang "salah" dengan koreksi berita tidak berimbang. Bahkan, menyangkut berita yang salah ditempatkan di halaman depan, tetapi hasil koreksi diletakkan di halaman dalam dengan kolom yang kecil.

Media Massa

Jurnalisme mensyaratkan media massa. Sebab, media massa merupakan sarana atau saluran (*channel*) untuk menyampaikan pesan (message) berupa produksi berita awak redaksi kepada khalayak pemerhatinya. Menurut Bungin[64] media massa adalah institusi yang berperan sebagai *agent of change*, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. Dalam menjalankan paradigmanya media massa berperan: a) sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi. Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju; b) media massa juga menjadi media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat; c) media massa sebagai media hiburan. Sebagai *agent of change*, media massa juga menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang setiap saat menjadi corong kebudayaan, katalisator perkembangan budaya.

---

[64]Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 85-86.

Menurut Djuroto[65] pengertian media massa itu sendiri ada dua, yakni media massa dan media nirmassa. Media artinya alat komunikasi, sedangkan massa kependekan dari kata masyarakat (orang banyak). Media massa berarti alat komunikasi yang boleh dimanfaatkan semua orang. Istilah boleh yang dimaksudkan Djuroto adalah bermakna tidak ada larangan. Misalnya, satu surat kabar dapat atau boleh dibaca dan dimanfaatkan oleh semua orang. Pers juga sering disebut media massa, karena pers juga termasuk media elektronik, seperti radio, televisi, internet, dan sebagainya. Dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers disebutkan bahwa pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut.

Dalam perspektif yang lain, media massa dimasukkan sebagai produk pers, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran, dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah, dan bulletin kantor berita. Baik media massa cetak maupun media massa elektronik termasuk komunikasi massa karena komunikasinya menggunakan media massa, prosesnya berlangsung satu arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, medianya menimbulkan keserempakan, dan komunikannya heterogen. Kendatipun demikian, antara media massa cetak dan media massa

---

[65]Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 10-11.

elektronik memiliki perbedaan yang khas, yakni pesan-pesan yang disiarkan oleh media massa elektronik diterima oleh khalayak hanya sekilas dan khalayak harus berada di depan pesawat, sedangkan pesan-pesan yang disiarkan media cetak dapat diulangkaji dan dipelajari serta disimpan untuk dibaca pada tiap kesempatan[66].

Media massa sebagai saluran komunikasi massa memiliki dampak yang efektif dalam mempengaruhi khalayak (komunikan) karena memiliki sifat yang khusus, yaitu (a) bahwa komunikasi massa berlangsung satu arah; (b) pihak komunikatornya dianggap merepresentasikan institusinya dan bukan atas nama pribadi; (c) pesan-pesan yang disampaikan bersifat umum dan serempak sehingga berpeluang dibaca khalayak yang lebih luas; (d) khalayak pembacanya bersifat heterogen, tersebar secara geografis dan terpisah berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya[67].

Media massa sebagai industri informasi (pesan) bekerja berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian, peristiwa itu diliput dan diolah oleh pekerja redaksi (wartawan dan redaktur), lalu diproduksi dan didisribusikan kepada khalayak (pembaca, pendengar, dan pemirsa). Tidak semua peristiwa dapat diliput, diolah, diproduksi, dan didistribusikan oleh media massa, selain karena keterbatasan ruang dan waktu, juga terutama karena urgensi dan aktualitasnya[68]. Dengan demikian, media massa memiliki

---

[66]Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 145.

[67]Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara), 18.

[68]Anwar Arifin, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 100.

"standar tertentu" untuk menentukan kelayakan sebuah peristiwa menjadi berita. Tidak semua peristiwa yang terjadi bisa diberitakan tergantung menarik tidaknya peristiwa tersebut menurut media massa. Apa yang disebut menarik oleh khalayak belum tentu "laku jual" menurut perspektif media. Demikian juga ketika realita/ atau peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak serta merta ditulis dan dimuat di media massa. Ada serangkaian proses konstruksi realita yang ditulis oleh seorang jurnalis sebelum menjadi fakta yang akan diberitakan. Setelah fakta tersebut dilakukan editing oleh para redaktur dan dipastikan layak dimuat, maka realita dan fakta tersebut menjadi data yang terdokumentasi melalui media massa tersebut.

Adapun bentuk media massanya berkembang dari waktu ke waktu sehingga memunculkan paradigma lama dengan paradigma baru yang menurut Nurudin[69] dapat dibedakan sebagai berikut.

Perbandingan Bentuk Media Massa

Unsur Jurnalisme	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Media atau Alat Komunikasi Massa	Surat Kabar Majalah Tabloid Buku Radio Televisi Kaset/CD Film	Surat Kabar Majalah Tabloid Internet Radio Televisi

Sumber: Nurudin, 2013. Diadaptasi Penulis 2016.

[69]Nuruddin, *Pengantar Komunikasi Massa* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 13-14.

Terdapat perbedaan mencolok antara paradigma lama dengan paradigma baru. Dalam paradigma lama yang disebut alat komunikasi massa, meliputi surat kabar, majalah, tabloid, buku, televisi, radio, kaset/CD, dan film. Sementara, dalam paradigma baru ada penambahan dan pengurangan, yakni surat kabar, majalah, tabloid, radio, dan internet. Perubahan tersebut dimungkinkan karena perkembangan teknologi komunikasi massa yang kian cepat. Perubahan tersebut akan membawa konsekuensi perubahan ciri yang melekat pada media massa tersebut.

Mengacu pada ciri komunikasi massa tersebut, maka ada media massa yang gugur dan ada pula yang muncul. Salah satu ciri komunikasi massa adalah keserempakan. Zaman dahulu, buku, film, dan kaset/ CD sangat mungkin punya keserempakan yang tinggi jika dilihat pada kondisi waktu itu. Akan tetapi, dengan ditemukannya alat-alat komunikasi yang kian canggih, keserempakan tersebut sudah harus ditinjau ulang. Kita tidak bisa membayangkan kalau internet, radio, dan televisi adalah media massa baru yang punya keserempakan tinggi. Bahkan, surat kabar, tabloid, dan majalah tingkat keserempakan pada massa-masa yang akan datang sangat mungkin direvisi pula. Beruntung saat ini tiga media massa itu sudah didukung penyebarannya melalui internet. Dengan demikian, alat-alat komunikasi massa akan mengalami perubahan dari masa ke masa sejalan dengan tingkat perkembangan peradaban manusia dan peningkatan percepatan teknologi komunikasi[70].

[70] Ibid.

Menurut Setiati[71] media massa dapat berperan dalam mengonstruksi suatu peristiwa untuk pembentukan realitas sosial. Untuk melakukan hal ini, media massa dapat mengelola informasi menjadi lebih bermakna, dengan menggunakan analisis framing. Tujuan wartawan melakukan analisis framing adalah membuat informasi yang disampaikan oleh wartawan menjadi lebih bermakna, lebih menarik, dan pembaca pun lebih berminat mengetahui jalan peristiwanya. Oleh karena itu, wartawan dituntut cerdas dalam menganalisa suatu peristiwa yang tengah diliputnya.

Menurut Ishwara[72] menyebutkan lima ciri-ciri jurnalisme tersebut, yaitu skeptis, bertindak, berubah, seni dan profesi, dan peran pers. Secara ringkas, pandangan Ishwara dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Skeptis

Sebagai ciri khas jurnalisme, Ishwara mengutip pendapat Tom Friedman dari *New York Times* yang menyatakan bahwa skeptis merupakan sikap untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu, meragukan apa yang diterima, dan mewaspadai segala kepastian agar tidak mudah ditipu. Hal ini berbeda dengan orang sinis yang selalu merasa bahwa dia sudah mempunyai jawaban mengenai seseorang atau peristiwa yang dihadapinya. Intinya, sikap skeptis adalah keraguan, sedangkan sikap sinis adalah ketidakpercayaan.

---

[71] Eni Setiati, Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), 75-76.

[72] Luwi Ishwara, *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), 1-8.

2. Bertindak

Bertindak merupakan corak kerja wartawan. Wartawan tidak menunggu sampai peristiwa itu muncul, tetapi ia akan mencari dan mengamati dengan ketajaman naluri seorang wartawan. Peristiwa tidak terjadi di ruang redaksi. Ia terjadi di luar. Karena itu, yang terbaik bagi wartawan adalah terjun langsung ke tempat kejadian sebagai pengamat pertama.

3. Berubah

Jurnalisme itu mendorong perubahan. Perubahan merupakan hukum utama jurnalisme. Ishwhara mengutip pendapat Theodore Jay Gordon dari Future Group di Noank, Connecticut, mengatakan bahwa ada empat daya atau kekuatan yang mengubah dunia jurnalistik pasca-industrialisasi, yaitu 1) munculnya abad komputer dan dominasi elektronika; 2) globalisasi dari komunikasi, dimana geografi menjadi kurang penting; 3) perubahan demografi, terutama pertambahan jumlah orang-orang yang berumur di atas 40 tahun; dan 4) perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

4. Seni dan profesi

Jurnalisme bukan mesin. Jurnalisme adalah seni dan profesi dengan tanggung jawab profesional---*art and craft with professional responsibilities*—yang mensyaratkan wartawannya melihat dengan mata yang segar pada setiap peristiwa untuk menangkap aspek-aspek yang unik.

5. Peran pers

Pers memainkan berbagai peranan dalam masyarakat. Ishwara mengutip pendapat Kohen yang menyebutkan peran pers, yakni sebagai pelapor, sebagai interpreter, sebagai wakil dari publik, sebagai penjaga (*watcdog*), sebagai pembuat kebijaksanaan dan advokasi.

C. Prinsip-Prinsip Jurnalisme

Mengenai prinsip-prinsip jurnalisme, penting dikemukakan dalam buku ini sebagai standar untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik. Meski banyak pandangan mengenai prinsip-prinsip jurnalisme, penulis mengemukakan pandangan Gray[73] yang menyatakan bahwa jurnalisme merupakan penulisan yang ditandai dengan presentasi fakta langsung atau deskripsi kejadian tanpa upaya menafsirkan dan tanpa opini. Tujuan utama jurnalisme adalah memberikan informasi akurat dan terpercaya yang dibutuhkan publik agar berfungsi dalam masyarakat sekarang. Gray menyatakan, jurnalis zaman sekarang adalah sosok panutan. Mereka mengidentifikasi tujuan, pahlawan, dan penjahat masyarakat sembari memberikan edukasi untuk meraih perspektif yang lebih baik tentang peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Dalam menghadirkan berita terdapat sejumlah syarat lain, diantaranya menghibur, berperan sebagai pengawas publik, dan menawarkan suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Seiring waktu, jurnalis mengembangkan sembilan prinsip inti dei memenuhi tugas-tugas di atas. Kesembilan prinsip itu digambarkan sebagai teori jurnalisme, yaitu: tugas utama seorang jurnalis adalah (mengungkapkan) kebenaran; loyalitas utama adalah kepada masyarakat; esensinya adalah disiplin memverifikasi; praktisinya harus mandiri dari peristiwa yang diliput; harus berperan sebagai pengawas independen bagi kekuasaan; harus memberikan forum bagi kritik dan kompromi publik; harus menarik dan relevan; berita harus komprehensif

---

[73] Jerry D. Gray, *Dosa-Dosa Media Amerika* (Jakarta: Ufuk Press, 2006),

dan proporsional; praktisinya harus diperbolehkan menuangkan pikirannya sendiri. Secara ringkas, prinsip yang dikutip Gray tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Tugas utama seorang jurnalis adalah (mengungkapkan) kebenaran.*

Jurnalisme tidak mengejar kebenaran dalam pengertian absolut atau filosofis, melainkan praktis. "Kebenaran jurnalistik" merupakan proses yang berawal dengan disiplin profesional dalam menyatukan dan memverifikasi fakta. Dengan demikian, seorang jurnalis berusaha menuangkan paparan seimbang dan terpercaya, absah untuk saat ini, dan merupakan target investigasi lebih lanjut.

2. *Loyalitas utama adalah kepada masyarakat.*

Kendati organisasi berita menjawab berbagai khalayak, di antaranya pengiklan dan pemegang saham, para jurnalis dalam organisasi tersebut mesti memelihara kesekawanan dengan masyarakat. Kepentingan publik lebih besar dibandingkan dengan yan lain, sekiranya mereka menyediakan berita tanpa rasa takut dan berimbang. Komitmen kepada publik sebagai yang utama merupakan basis kredibilitas organisasi berita.

3. *Esensinya adalah disiplin memverifikasi.*

Jurnalis bersandar pada disiplin profesional dalam memverifikasi informasi. Jika konsep awal objektivitas berevoluasi, tidak serta merta berarti jurnalis bebas dari bias. Akan tetapi, hal ini justru merupakan panggilan untuk konsisten pada metode pengujian informasi, pendekatan yang transparan untuk pembuktian, agar bias pribadi dan budaya tidak menciderai keakuratan karya.

4. *Praktisinya harus mandiri dari peristiwa yang diliput*.

Kemandirian adalah syarat di balik jurnalisme, semacam tiang penyangga keandalannya. Berbeda dengan netralitas, kemandirian semangat dan pikiran adalah prinsip yang harus dipertahankan para jurnalis. Meski para editorialis dan komentator tidak netral, namun sumber kredibilitas mereka tetap keakuratan, keadilan intelektual, dan kemampuan menginformasikan.

5. *Harus berperan sebagai pengawas independen bagi kekuasaan*.

Jurnalisme memiliki kapasitas yang tidak laim, yakni sebagai pengawas kalangan penguasa atau kalangan yang posisinya memengaruhi banyak orang. Pendiri organisasi jurnalistik menyadari hal ini sebagai proteksi terhadap despotisme (kekuasaan total atas rakyat) jika mereka memastikan sebagai pers yang independen, diteguhkan oleh hukum, dan tempat bersandar masyarakat.

6. *Harus memberikan forum bagi kritik dan kompromi publik*.

Media berita adalah penyedia diskusi publik dan tanggung jawab inilah yang menajdikan kami istimewa. Diskusi ini mementingkan fakta, alih-alih prasangka, terkaan, atau opini. Selain itu, demi menjaga keadilan, media harus merepresentasikan beragam sudut pandang dan kepentingan yang ada dalam masyarakat dan menempatkannya sesuai konteks, alih-alih hanya menggarisbawahi sudut-sudut debat yang berkonflik.

7. *Harus menarik dan relevan*.

Jurnalis tak lain penyampaian cerita dengan tujuan tertentu. Jurnalisme harus lebih dari sekadar mengumpulkan khalayak atau mendokumentasikan hal-hal penting. Agar bisa bertahan, media cetak harus menyeimbangkan hal-hal yang diinginkan pembaca dengan hal-hal yang tidak mereka antisipasi tapi dibutuhkan. Kualitas diukur baik dengan seberapa banyak karya yang memikat pangsanya dengan karya yang mencerahkan.

8. *Berita harus komprehensif dan proporsional*.

Mempertahankan berita sesuai dengan proporsi dan tidak mengabaikan hal-hal penting juga merupakan tiang-tingan penyangga kebenaran. Jurnalisme semacam kartografi. Ia menciptakan peta bagi pembaca agar bisa bernavigasi dalam masyarakat. Membesar-besarkan peristiwa demi sensasi, mengabaikan hal-hal lain, meniru-niru, atau menyampaikan berita negatif secara tidak proporsional hanya akan membuat peta yang dihasilkan kurang bisa diandalkan.

9. *Praktisinya harus diperbolehkan menuangkan pikirannya sendiri*.

Tiap jurnalis harus memiliki rasa etika dan tanggung jawab, semacam kompas moral. Jika keadilan dan keakuratan dijadikan syarat, seluruh jurnalis harus bersedia menyuarakan beraca-aca kalangan, terlepas apakah di kolo-kolom berita ataupun di ruang eksekutif. Organisasi berita harus menumbuhkan independensi ini dengan merangsang individu menyuarakan pikirannya. Hal ini akan menstimulasi

keragaman intelektual yang dibutuhkan untuk memahami dan meliput peristiwa yang kian berkembang secara akurat.

Kesembilan prinsip jurnalisme ini dapat menjadi standar bagaimana sebuah kekuatan jurnalisme harus beroperasi di ranah publik. Elemen ini merupakan prinsip penting dipahami semua pihak agar menjadi barometer bagi khalayak dalam mengawasi dinamika organisasi pers yang beroperasi di ranah publik. Ditengah persaingan industri media massa yang sedemikian kompleks, ranah idealisme dalam sembilan prinsip tersebut diatas menjadi tidak gampang dilakukan. Semua sepakat bahwa kesembilan prinsip ini adalah "wajib" ada dalam produk jurnalisme. Tetapi, idealita dengan realita sering kali bertemu dalam bayang-bayang fatamorgana. Dalam ranah inilah dibutuhkan komitmen semua pihak, yakni media dan massa untuk bersama-sama mengaplikasikan sembilan prinsip untuk mewujudkan jurnalisme yang bermartabat.

Penting dicatat bahwa penegakan prinsip-prinsip jurnalisme ini bukanlah hal yang mudah diterapkan ketika media massa telah bergeser kepada industri, disamping banyak perspektif dalam melihat realitas jurnalisme tersebut. Hal ini disebabkan bahwa fakta atau peristiwa, media massa, jurnalis atau wartawan, dan berita memiliki identitas masing-masing sebagai sebuah realitas "yang bukan sebenarnya". Pandangan Eriyanto[74] terhadap fakta, media, wartawan, dan berita dengan perspektif konstruksionis dapat dijadikan parameter dalam melihat realitas hal tersebut.

1. Fakta/ peristiwa adalah hasil konstruksi. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana

---

[74] Eriyanto, *Analisis Framing* (Yogyakarta: LKiS, 2009),

konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan yang berbeda.

2. Media adalah agen konstruksi. Media bukanlah saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Apa yang tersaji dalam berita adalah produk dari pembentukan realitas oleh media. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak.
3. Berita bukan refleksi dari realitas. Berita adalah hasil konstruksi sosial dimana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai.
4. Berita bersifat subjektif. Berita adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Pemaknaan seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain, yang tentunya menghasilkan "realitas" yang berbeda pula.
5. Wartawan bukan pelapor. Wartawan dipandang sebagai aktor/agen konstruksi. Wartawan bukan hanya melaporkan fakta, melainkan turut mendefinisikan peristiwa. Sebagai aktor sosial, wartawan turut mendefinisikan apa yang terjadi, dan secara aktif membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka.

Keberagaman jenis jurnalisme adalah salah satu bukti bahwa cara pandang media, wartawan, berita, dan fakta tidaklah absolut, cair, dan multimakna. Tantangan jurnalis tidaklah ringan dalam mewujudkan prinsip-prinsip jurnalisme tersebut. Misalnya, ketika seorang jurnalis harus berpihak pada kebenaran, maka realitas kebenaran bisa multiperspektif.

Media-media yang dikendalikan oleh para pemilik modal (kapitalis), politisi, atau pemimpin partai memiliki sudut pandang tersendiri ketika bersentuhan realitas yang paradoks dengan ideologi politik pemilik media. Dominasi berita yang menguntungkan kekuatan politik dengan berdalih "iklan politik" sudah menjadi rahasia umum di masyarakat bahwa muncul keberpihakan media terhadap kepentingan politik tertentu. Ketika garis ideologi media sudah didesain sedemikian rupa, maka wartawan, fakta, dan peristiwa yang diberitakan menjadi bias. Kenyataan seperti ini tidak bisa dibantah. Bukti empirisme adalah dengan mengamati bagaimana khalayak media yang aktif menafsirkan realitas media tersebut memiliki kesimpulan-kesimpulan tersendiri yang berbeda-beda. Untuk itu, agar media kembali kepada jati diri, kesembilan prinsip tersebut dapat dibuat ukuran untuk menilai objektivitas media dalam menggambarkan realitas di media massa mereka. Melalui prinsip-prinsip jurnalisme tersebut, realitas dapat digambarkan secara proporsional-objektif.

D. Jurnalisme Pesantren

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kata jurnalisme beragam dengan atributnya. Ragam jenis jurnalisme yang dinamis tersebut masih membuka ruang terbuka untuk melahirkan konsep baru mengenai jurnalisme, termasuk jurnalisme pesantren. Mengaitkan jurnalisme dengan pesantren sehingga memiliki makna jurnalisme pesantren tidak bisa dilepaskan dari makna jurnalisme sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan makna pesantren itu sendiri. Berdasarkan jenis jurnalisme yang ada, maka jurnalisme dapat dilekatkan dalam

beragam konteks. Sebelum melekatkan identitas mengenai jurnalisme pesantren, maka realitas dunia pesantren harus tergambar dengan jelas, sehingga ketika membangun konsep jurnalisme pesantren dapat memberikan gambaran identitas yang mendekati realitas.

Konsep mengenai pondok pesantren telah banyak dikemukakan para peneliti dan pakar pesantren. Bahkan, identitas pondok pesantren dapat dipahami dari aktivitas pesantren setiap harinya yang bersentuhan dengan masyarakat. Mengenai pondok pesantren, Dhofier[75] memberikan batasan yang jelas mengenai sebuah institusi yang layak disebut pondok pesantren. Menurutnya, pondok, masjid, santri, pengajaran kitab Islam klasik dan kyai adalah lima elemen dasar tradisi pesantren. Ini berarti bahwa suatu lembaga pengajian yang telah berkembang hingga memiliki kelima elemen tersebut berubah statusnya menjadi pesantren. Secara ringkas pandangan Dhofier dapat dijelaskan sebagai berikut.

---

[75]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 2011), 79-93. Di seluruh Indonesia, orang biasanya membedakan kelas-kelas pesantren dalam tiga kelompok, yaitu pesantren kecil, menengah, dan besar. Pesantren kecil biasanya mempunyai jumlah santri di bawah seribu dan pengaruhnya terbatas pada tingkat kabupaten. Pesantren menengah biasanya mempunyai santri antara 1.000 sampai 2.000 orang, memiliki pengaruh dan menarik santri dari beberapa kabupaten. Adapun pesantren besar biasanya memiliki santri lebih dari 2.000 yang berasal dari berbagai kabupaten dan provinsi. Beberapa pesantren besar memiliki popularitas yang dapat menarik santri-santri dari seluruh Indonesia. Pada millenium ketiga ini, pesantren yang memiliki santri lebih dari 5000 mencapai sebanyak 22 buah. Pesantren yang terbesar jumlah santrinya saat ini ialah pesantren Raudlotut Tholibin, Gresik yang memiliki santri lebih dari 16.000.

1. Elemen pondok harus ada dalam lembaga pesantren karena sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan "kyai".
2. Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dari pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik sembahyang lima waktu, khutbah dan sembahyang jum'ah dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik.
3. Pengajaran kitab Islam klasik. Pada masa lalu, pengajaran kitab Islam klasik, terutama karangan-karangan ulama yang menganut faham syafi'i, merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Tujuan utamanya ialah untuk mendidik calon-calon ulama. Para santri yang tinggal di pesantren untuk jangka waktu pendek (misalnya kurang dari satu tahun) dan tidak bercita-cita menjadi ulama, bertujuan untuk mencari pengalaman dan pendalaman perasaan keagamaan.
4. Santri. Menurut pengertian yang dipakai dalam lingkungan orang-orang pesantren, seorang alim hanya bisa disebut kyai bilamana memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam pesantren untuk mempelajari kitab-kitab klasik. Oleh karena itu, santri merupakan elemen penting dalam suatu lemaga pesantren. Santri terdiri dari dua, yakni santri mukim dan santri kalong.
5. Kyai merupakan elemen paling esensial dari suatu pesantren. Ia sering kali bahkan merupakan pendirinya.

Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi kyainya. Meskipun kyai kebanyakan tinggal di daerah perdesaan, mereka merupakan bagian dari kelompok elit dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebab, sebagai suatu kelompok, para kyai yang memiliki pengaruh yang amat kuat di masyarakat, merupakan kekuatan penting dalam kehidupan politik di Indonesia.

Kelima ciri tersebut dapat dipilih sebagai identitas membangun kekuatan jurnalisme pesantren. Visi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dapat menjadi spirit untuk membangun jurnalisme Islami. Fenomena yang terkait dengan kepemimpinan kyai, santri, pengajaran kitab klasik, masjid sebagai sarana membangun komunikasi yang tinggi dengan *Ilahi Rabbi*, dan asrama sebagai tempat tinggal para santri yang menimba ilmu adalah realitas yang dapat tidak boleh dilepaskan dari visi utama membangun jurnalisme berbasis pesantren. Bahkan peristiwa-peristiwa seputar dunia pondok pesantren tersebut bisa menjadi salah satu "bahan bakar" reportase yang menarik. Dinamika aktivitas santri, sosok kharismatik kyai dalam berkidmah kepada umat, berbagai model pembelajaran kitab klasik, dan situasi pondok sendiri adalah realitas yang bisa didekati untuk pemberitaan. Apalagi, jika dilihat lebih jauh fungsi pondok pesantren, maka akan semakin banyak potensi berita yang bisa digali dari pondok pesantren dengan beragam karakteristiknya.

Jurnalisme pesantren dapat pula mengambil dari spirit fungsi pondok pesantren sehingga karakteristik jurnalistiknya terkait dengan fungsi pondok pesantren. Sebagaimana

dinyatakan Eksan[76] bahwa ada empat fungsi pondok pesantren, yakni sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, lembaga pengkaderan ulama, dan lembaga pengembangan masyarakat. *Pertama*, sebagai lembaga pendidikan, pesantren diakui oleh semua pihak sebagai lembaga pendidikan yang tertua, terlebih lagi dibandingkan dengan dengan lembaga pendidikan persekolahan.

Kedua, sebagai lembaga dakwah, pesantren adalah lembaga dakwah yang pertama dalam sejarah Islam di Indonesia. Melalui kegiatan dakwah para kyai dan santrinya dalam melakukan tabligh, pesantren memastikan posisinya sebagai lembaga dakwah yang sudah terbukti dan teruji dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Populasi umat Islam yang sampai mencapai 87 persen dari seluruh penduduk, atmosfir Islam dalam mewarnai wajah tanah air, fasilitas umum bagi umat Islam yang menjamur di seluruh pelosok nusantara, tidak lepas dari peran serta dan sumbangsih pesantren dalam melakukan dakwah kultural.

Ketiga, sebagai lembaga pengkaderan ulama, pesantren telah banyak melahirkan para ulama yang punya *concern* yang sama terhadap pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Jumlah pesantren setiap tahun terus-menerus bertambah. Pertumbuhannya selalu pararel dengan pertumbuhan penduduk yang rata-rata 2 persen per tahun. Di beberapa daerah, justru jumlah pesantren jauh melampaui jumlah desa sekalipun. Pesantren-pesantren besar tersebar di berbagai daerah di pelosok tanah air lazimnya menjadi embrio dari

---

[76]Moch. Eksan, *Dari Bom Bali Sampai Kuningan* (Jember: LPM Filantropy Studies dan Pena Salsabila, 2009), 76-80.

"perpecahan sel pesantren" melalui reproduksi keulamaan dan kekiaian di pesantren.

Keempat, sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, pesantren dengan segala kelebihan dan kekurangan sangat konsisten dengan pemberdayaan sumber daya manusia lokal. Hal ini terkait dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tak jarang juga menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bidang jahit menjahit, perbengkelan, pertanian, peternakan, dan *skill life education* yang lain. Bahkan, ada beberapa pesantren sangat serius mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah. Pesantren menyediakan jasa konsultan ekonomi-bisnis, lembaga pembiayaan, dan jaringan kerja dan pasar bagi segala jenis produk masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian mengenai jurnalisme dan pesantren tersebut dapat dirumuskan mengenai konsep jurnalisme pesantren yang dapat menjadi salah satu jurnalisme alternatif yang terus berkembang. Jika dimaknai secara bahasa, jurnalisme pesantren dapat diartikan sebagai paham jurnalistik yang dianut kalangan pesantren, bisa juga kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh kalangan pesantren, atau kegiatan jurnalistik yang berkaitan dengan pesantren. Karena jurnalistik terkait dengan pengolahan berita, peran jurnalis dalam melaporkan peristiwa, dan fungsi media massa dalam menyebarluaskan berita yang ditulis wartawan kepada khalayak (massa), maka elemen jurnalisme pesantren dapat diuraikan melalui ketiga hal tersebut, yaitu:

1. Berita yang dibuat adalah peristiwa menarik yang terkait dengan pondok pesantren. Karena elemen pesantren

menyangkut kyai, santri, pembelajaran kitab klasik, masjid, dan asrama, maka laporan peristiwa yang diberitakan terkait dengan fenomena dunia kyai (strategi pendidikan di pesantren, peran kyai dalam memban moralitas umat, peran kyai dalam politik dan pemerintahan, kontribusi kyai dalam peradaban Islam, fenomena hubungan kyai-santri-masyarakat-negara, dan keunikan gaya kepemimpinan kyai) dari berbagai pondok pesantren. Meski kyai menjadi prioritas, berita dalam jurnalisme pesantren tidak menutup tokoh lain yang dapat merepresentasikan dunia kyai dapat menjadi berita pula, baik untuk straigh news maupun features dan opini.

2. Jurnalis yang memberitakan selayaknya dari kalangan santri atau yang telah terseleksi memahami dunia pesantren. Pemahaman terhadap realitas yang diberitakan sangat penting bagi jurnalis. Sebab, sebagaimana diketahui, wartawan hanyalah menggambarkan realitas, tetapi tulisan atau reportase yang dibuatnya bukanlah realitas yang sesungguhnya. Apalagi, wartawan tidak bisa dilepaskan dari ideologi media massa dimana tempat mereka bekerja sebagai jurnalis. Untuk itu, jurnalis dalam jurnalisme pesantren selayaknya yang memahami dunia pondok pesantren.
3. Media massa dalam jurnalisme pesantren dapat dibuat berbadan hukum sebagaimana diamanatkan Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Dalam hal ini media massa atau pers harus membangun institusi jurnalistiknya berdasarkan ketentuan yang legal formal karena persyaratannya untuk membuat media massa di era sekarang ini tidak serumit dahulu. Buktinya, media

dengan beragam latar belakang tumbuh, mulai dari jenis tabloid yang mengkhususkan pada binatang, hobi, teknologi, kuliner, pertanian, otomotif, hingga partai politik. Dengan demikian, membangun media massa pesantren masih terbuka lebar sebagaimana yang dijalankan oleh majalah Sidogiri, yang diprakarsai pesantren Sidogiri di Pasuruan, majalah Gontor yang diterbitkan Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur, dan sebagainya.

4. Massa (khalayak) yang menjadi penikmat produk jurnalisme pesantren adalah massa pondok pesantren secara khusus, dan masyarakat umum sebagai khalayak yang layak mendapatkan informasi mengenai dunia pesantren. Pada kenyataannya, meski media massa berlaku umum untuk massa yang heterogen, pada prakteknya, konsumen media akan tersegmentasi secara alamiah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jurnalisme pesantren dapat diartikan sebagai pengelolaan berita mengenai peristiwa-peristiwa di lingkungan pesantren yang disebarluaskan oleh media massa pesantren kepada khalayak, baik kepada massa pondok pesantren maupun masyarakat luas agar terjadi perubahan sikap dan perilaku khalayak sesuai dengan Islam yang *rahmatan lil alamin*. Definisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.
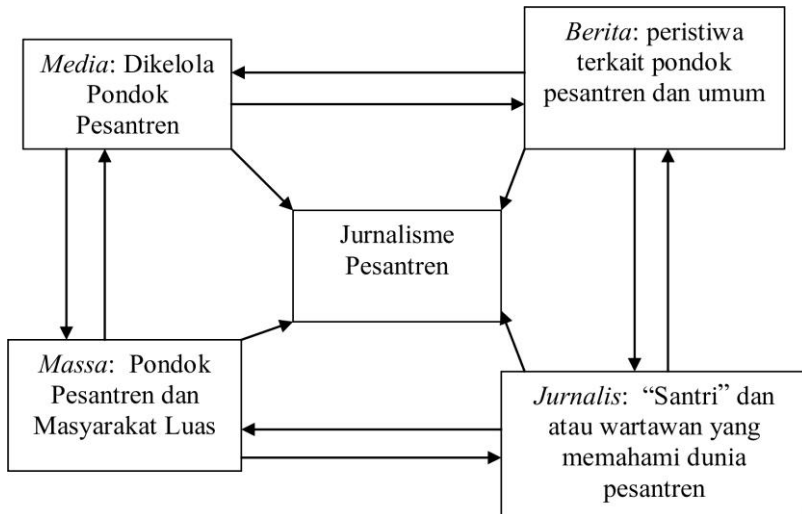
Sumber: Diolah Penulis, 2016

Berita Pesantren

Mendasarkan pada konsep berita pada produk jurnalistik secara umum sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dapat digambarkan bahwa berita untuk jurnalisme pesantren diutamakan yang terkait dengan dunia pondok pesantren. Hal ini terkait dengan misi pondok pesantren sebagai budaya nusantara yang memiliki identitas yang jelas dan berkarakter khas Indonesia, berbeda dengan produk pendidikan di manapun. Misi yang diusung dalam berita pesantren adalah misi dakwah Islam, yakni misi budaya Islam melalui pondok pesantren. Dengan demikian, pemberitaan utama adalah menyangkut isu-isu aktual yang berasal dari lingkungan

pesantren. Menurut Mas'ud (dalam Sholeh, 2007)[77] pesantren memiliki tiga karakteristik utama budaya, yakni *modeling*, *cultural maintenance*, dan budaya keilmuan yang tinggi.

1. Modeling di dalam ajaran Islam bisa diidentikkan dengan *uswatun hasanah* atau *sunnah hasanah* yakni contoh yang ideal yang selayaknya atau seharusnya diikuti dalam komunitas ini. Tidak menyimpang dari ajaran dasar Islam, modeling dalam dunia pesantren agaknya lebih diartikan sebagai *tasyabuh*, proses identifikasi diri pada seorang tokoh, sang 'alim.
2. Mempertahankan budaya dan tetap bersandar pada ajaran dasar Islam adalah budaya pesantren yang sudah berkembang beradab-abad. Sikap ini tidak lain merupakan konsekuensi logis dari modeling. Walisanga dan para kiai Jawa adalah *agen of social change* melalui pendekatan kultural, bukan politik struktural apalagi kekerasan.
3. Dunia pesantren senantiasa identik dengan dunia ilmu. Definisi pesantren itu sendiri selalu mengacu pada proses pembelajaran dengan komponen-komponen pendidikan yang mencakup pendidik, santri, murid, serta fasilitas tempat belajar mengajar. Rujukan ideal keilmuan dunia pesantren cukup komprehensif yang meliputi inti ajaran dasar Islam itu sendiri yang bersumber dari al-Qur'an Hadis, tokoh-tokoh ideal zaman klasik seperti Imam Bukhari, serta tradisi lisan yang berkembang senantiasa mengagungkan tokoh-tokoh ulama Jawa yang agung seperti Nawawi al-Bantani (meninggal 1897 M), Mahfudz

[77] Abdurrahman Mas'ud, *Memahami Agama Damai Dunia Pesantren,* Prolog dalam Badrus Sholeh, *Budaya Damai Komunitas Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2007), xix-xxv.

al Tirmizi (meninggal 1917 M), dan lain-lain. Pemaknaan budaya ini sejalan dengan apa dinyatakan Ruben[78], bahwa dari sudut pandang komunikasi, budaya dapat didefinisikan sebagai kombinasi yang komplek dari simbol-simbol umum, pengetahuan, cerita rakyat, adat, bahasa, pola pengelolaan informasi, ritual, kebiasaan, dan pola perilaku lain yang berkaitan dan memberi identitas bersama kepada sebuah kelompok orang tertentu pada satu titik waktu tertentu

Ketiga aspek tersebut dapat menjadi dasar bahwa peristiwa yang diberitakan memiliki ukuran menarik khalayak jika diolah dengan standar jurnalistik "gaya" pesantren. Sebagaimana realitas yang bermakna ganda, cair, dan multiperspektif, maka realitas peristiwa juga menarik dari sudut pandang tertentu. Berita pesantren tidak muncul di berita media massa umum dan kurang mendapatkan perhatian dari kalangan jurnalis, belum tentu dunia pesantren tidak memiliki kekuatan yang menarik untuk diberitakan. Berita media massa umum memiliki standar tertentu untuk menilai peristiwa yang menarik. Sebagai contoh, pondok pesantren sering kali diberitakan negatif karena media umum masih menganut paham jurnalisme "*bad news is good news*" yakni berita buruk adalah berita bagus, sehingga berita yang menarik terkait dengan hal-hal yang negatif. Kasus pemberitaan "kyai diduga cabul", "pesantren kalah bersaing", "santri terlibat perkelahian", "santri tewas dianiaya" dan "pesantren diduga terkait teroris", "pesantren disusupi narkoba", dan sederet berita negatif adalah contoh framing berita yang digambarkan

---

[78] Brent D. Rubent, Lea P. Stewart, *Komunikasi dan Perilaku Manusia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 358-359.

oleh jurnalis ketika mengonstruksi peristiwa dengan sudut pandang tertentu di media massa mereka. Padahal, sebelumnya, tidak pernah muncul mengenai pesantren yang positif, sehingga dunia pesantren diidentikkan dengan hal-hal yang negatif.

Sedemikian burukkah realitas pesantren, tentu saja tidak. Masih banyak peristiwa pesantren yang terkait dengan pemberdayaan umat yang luput dari pemberitaan media massa. Kegiatan kyai yang 24 jam terlibat dalam pembinaan terhadap para santrinya tentu saja tidak bisa diwakilkan hanya dengan satu kali atau dua kali pemberitaan. Berita pesantren memang ada keberpihakan dalam mengungkapkan realitas, sebagaimana realitas bisa dimaknai dengan beragam perspektif. Jika berpegang dalam prinsip jurnalisme bahwa berita harus berpihak kepada kebenaran, maka kebenaran yang terlahir dari beragam peristiwa pesantren juga layak diberitakan. Perkembangan dunia pesantren yang sedemikian pesat menjadi tidak adil jika diberitakan tidak proporsional. Identitas budaya pesantren mestinya juga perlu dilihat dari perspektif lain yang lebih menarik. Sebab, jika tidak disebut budaya, maka pesantren masuk dalam ruang subkultur. Dengan demikian, kan banyak ragam berita dan opini yang bisa ditampilkan dalam media massa pesantren tersebut. Berita dalam majalah “Sidogiri” yang diterbitkan pondok pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur maupun majalah “Gontor” yang diterbitkan Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur dapat merepresentasikan berita pesantren. Berikut contoh sejumlah produk berita bentuk jurnalisme pesantren yang dipilih sidogiri.net.
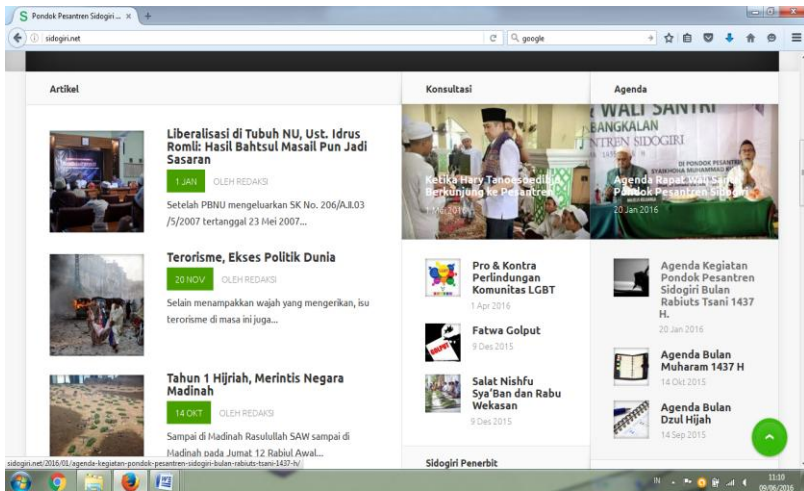
BERKARAKTER PESANTREN: pilihan berita Sidogiri.Net yang mencerminkan pandangan pondok pesantren dalam menyikapi berbagai permasalahan di masyarakat.

Keragaman peristiwa pondok pesantren juga dapat dilihat dari posisi pesantren sebagai subkultur yang memiliki corak dan karakteristik yang khas (unik). Menurut Wahid[79], dibangun atau dibentuk atas tiga elemen, yaitu: 1) pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak berkooptasi oleh negara; 2) kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad; dan 3) sistem nilai (*value system*) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas. *Pertama*, kepemimpinan kiai-ulama di pondok pesantren adalah sangat unik, karena mereka memakai sistem kepemimpinan pra-modern. *Kedua*, memelihara dan menstranfer literatur-literatur umum dari generasi ke generasi dalam berbagai abad, yang mengkonstruk-

---

[79] Abdurrahman Wahid, *Pondok Pesantren Masa Depan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 13-14.

si secara langsung "konsep unik" kepemimpinan kiai-ulama. *Ketiga*, dengan bertumpu pada pemahaman literal tentang ajaran Islam, dalam kenyataan praktis (*tajribi*), sistem nilai tidak bisa dipisahkan dari dari elemen lain, yakni kepemimpinan kiai-ulama di satu sisi dan penggunaan literatur umum yang dipakai di sisi lain. Hal ini sejalan dengan pandangan Samovar[80] yang menggunakan istilah subkultur ketika membahas kelompok sosial dengan karakter komunikasi, persepsi, nilai-nilai, kepercayaan, dan tindakan yang membedakan mereka dari kelompok dan komunitas lain dan juga dari budaya dominan.

Berita pesantren dibutuhkan umat agar tidak mendapatkan gambaran yang lebih objektif dengan sumber yang lebih kredibel. Sebab, sebuah berita sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai realitas, meskipun dianggap mewakili realitas yang diberitakan. Sebagaimana dinyatakan Kuswarno (dalam Mulyana, 2013)[81], nilai objektivitas berita (menyangkut soal kebenaran objektif) pada media massa meskipun telah didasarkan pada fakta, tetap saja fakta tersebut bahkan menampilkan realitas simbolik yang tidak identik dengan realitas objektif. Secara kualitatif, objektivitas itu hanya masalah kesepakatan sosial, maka makna dikosntruksi secara intersubjektif. Isi pesan dan bahasa lebih merupakan proses interpretasi yang sudah terbangun dalam sistem sosial masyarakat. Justru pada suatu titik tertentu, media atau pers

---

[80] Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel, *Komunikasi Lintas Budaya* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), 15.

[81] Engkus Kuswarno, *Perubahan Paradigma Penelitian Komunikasi* dalam Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 427-428.

mampu membangun paradigma interpretasi yang akhirnya dapat diterima oleh sistem sosial masyarakat. Jadi pers dan masyarakat tidak bisa dilihat sebagai entitas-entitas yang terpisah, tetapi dipahami sebagai suatu proses relasi timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Suatu produk pers tidak bisa terpisah dengan sistem budaya yang berlaku dalam masyarakat.

Pondok pesantren yang tersebar di seluruh tanah adalah potensi besar yang tidak akan pernah habisnya jika menjadi fokus untuk peliputan berita. Peristiwa-peristiwa yang menyangkut dunia pesantren dengan gegap gempita dinamika-nya tetap saja menarik untuk diberitakan karena pesantren memiliki beragam keunikan dan peristiwa-peristiwa besar. Mengacu pada pandangan Haryanto[82] bahwa definisi yang sebelumnya bermakna "melaporkan peristiwa yang telah terjadi", kini berganti makna dengan "melaporkan peristiwa yang sedang terjadi", maka berita pesantren juga tidak boleh ketinggalan dengan isu-isu kontemporer yang sedang terjadi. Dan, pesantren memiliki segudang pandangan mengenai problematika kehidupan umat manusia.Kini, sejumlah produk jurnalisme pesantren sudah berbasis jaringan online, sehingga peristiwa yang terjadi di pesantren dapat diketahui secara cepat melalui web yang sudah mereka buat. Bahkan, masing-masing pondok pesantren sudah memiliki web sendiri-sendiri sebagai media resmi pondok pesantren tersebut.

Media online yang dapat juga merepresentasikan jenis jurnalisme pesantren adalah portal santrinews yang berisi mengenai kegiatan jurnalistik di lingkungan pesantren.

[82] Ignatius Haryanto, *Jurnalisme di Era Digital: Tantangan Industri Media Abad 21* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), 3.

Sebagaimana dijelaskan dalam web Santrinews.com disebutkan bahwa media berjaringan internet ini merupakan portal online berita yang berfokus pada pembaca kalangan pesantren baik yang pernah aktif langsung atau simpatisan di tanah air maupun yang tinggal di luar negeri. Berita Santrinews.com diupdate selama 24 jam dan mendapatkan kunjungan lebih dari 1000 pageviews setiap bulannya (Sumber: Google Analytics). Santrinews.com memiliki beragam konten dari berita keislaman secara umum, santri, pesantren, politik, peristiwa, internasional, ekonomi dan lainya. Santrinews juga merupakan salah satu portal yang memberikan inovasi konten mobile (handphone). Para pembaca kami adalah santri, kiai, akademisi muslim, dan umat Islam secara umum. Konten berita Santrinews.com ditulis secara tajam, singkat, padat, dan dinamis sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat yang semakin efisien dalam membaca berita. Selain itu, konsep portal berita online juga semakin menjadi pilihan masyarakat karena sifatnya yang *up-to-date* dan melaporkan kejadian peristiwa secara instant pada saat itu juga sehingga masyarakat tidak perlu menunggu sampai esok harinya untuk membaca berita yang terjadi[83].

Berdasarkan pengamatan penulis saat mengakses santrinews.com tersebut sudah memiliki rubrikasi yang dapat mewakili gambaran peristiwa di dunia pesantren. Selain berita yang sifat *straight news*, berita dengan karang khas (*features*) ditampilkan sebagai kekuatan dalam produk jurnalistik media pesantren yang berpusat di Jl. Jemur Wonosari Lebar No. 74 Wonocolo Surabaya Jawa Timur tersebut. Ragam rubrik yang ditampilkan tidak hanya sebatas berita, namun beragam opini mengenai pesantren dan yang keterkaitannya ada di kolom

[83] www.santrinews.com. Diakses Kamis, 9 Juni 2016.

Fikroh yang berisi opini, mimbar santri, dan dirosah. Bahkan, terdapat kolom budaya sebagai ekspresi seni kalangan pesantren dengan menu esai, cerpen, dan puisi. Mengenai dinamika pesantren terangkum dalam rubrik pesantren. Sedangkan pengetahuan umum penting diketahui khalayak pesantren ada di rubrik Akhbar berisi menu politik, nasional, daerah, dunia, dan fokus. Sebagai gambaran dapat disimak dari portal tersebut.
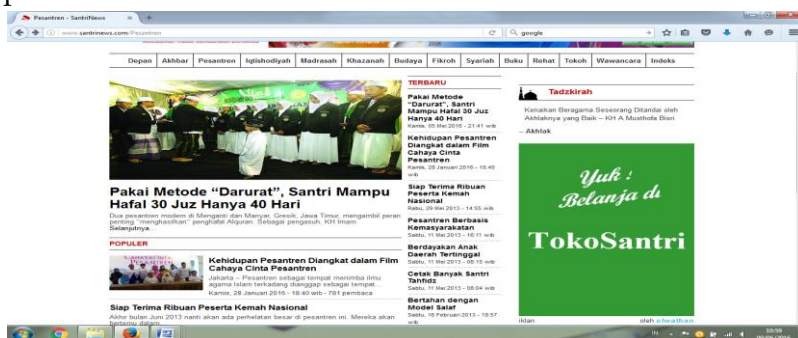
MINIATUR: Perwajahan halaman jurnalisme pesantren dalam santrinews.com yang memberitakan peristiwa pesantren yang umum dan memuat reportase dunia pesantren.

Jurnalis Santri

Identitas wartawan atau jurnalis telah dinyatakan dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang tersebar dalam 11 pasal dan penafsirannya dapat menjadi pegangan bagi jurnalis di tanah air. Jurnalis santri juga dapat mengadopsi kode etik tersebut dalam memberitakan peristiwa pesantren. Selain itu, jurnalis santri dapat diidentikkan dengan jurnalis muslim yang menurut Kasman[84] memiliki lima peranan, yaitu:

[84] Suf Kasman, *Jurnalisme Universal* (Jakarta: Teraju, 2004), 220-222.

1. Sebagai pendidik (*mu'addib*), yaitu melaksanakan fungsi edukasi Islami. Ia harus lebih menguasai ajaran Islam dari rata-rata khalayak pembaca. Lewat media massa, ia mendidik umat Islam agar melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhui larangan-Nya. Ia juga memiliki tugas ulai untuk encegah uat Isla dari perilaku menyimpang dari syariat Islam, juga elindungi uat dari pengasruh buruk media massa non-islami yang anti islami.
2. Sebagai pelurus informasi (*musaddid*). Setidaknya ada tiga hal yang harus diluruskan oleh para jurnalis muslim, yaitu: a) informasi tentang ajaran dan umat Islam; b) informasi tentang karya-karya atau prestasi umat Islam; c)lebih dari itu, jurnalis muslim dituntut mampu menggali kondisi umat Islam di berbagai penjuru dunia. Peran *musaddid* terasa relevansi dan urgensinya engingat informasi tentang Islam dan umatnya yang datang dari pers Barat, biasanya biased (menyimpang, berat sebelah) dan distorsi, manipulatif, dan penuh rekayasa untuk memojokkan Islam yang tidak disukainya.
3. Sebagai pembaru (*mujaddid*), yakni penyebar paham pembaruan akan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam. Jurnalis muslim hendaknya menjadi juru bicara para pembaru yang menyerukan umat Islam untuk memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, memurnikan pemahaman tentang Islam dan pengalamannya (membersihkan dari bid'ah, khurafat, takhayul, dan isme-isme asing non-islami), dan menerapkannya dalam segala aspek kehidupan umat.
4. Sebagai pemersatu (*muwahid*), yaitu harus mampu menjadi jembatan yang mempersatukan umat Islam. Oleh karena

itu, kode etik jurnalistik yang berupa imapriality (tidak memihak) pada golongan tertentu dan menyajikan dua sisi dari setiap informasi (both side information) harus ditegakkan.

5. Sebagai pejuang (*mujahid*), yaitu pejuang pembela Islam melalui media massa. Jurnalis muslim berusaha keras membentuk pendapat uum yang mendorong penegakan nilai-nilai Islam, menyemarakkan syiar Islam, mempromosikan citra Islam yang positif dan *rahmatan lil 'alamin* serta menanamkan *ruhu al-jihad* di kalangan umat.

Peranan jurnalis muslim tersebut menjadi pegangan bagi jurnalis santri dalam menjalankan tugas jurnalistiknya melalui media massa pesantren. Jurnalis santri menyadari posisi dirinya sebagai pembela nilai-nilai pesantren yang mengajarkan Islam *rahmatan lil alamin* sebagai identitas Islam yang ramah bagi dunia. Wajah pesantren perlu digambarkan secara luas (utuh) agar realitas pesantren tidak dinilai miring akibat cara wartawan memberitakan pesantren selama ini. Dalam konteks inilah, pembelaan terhadap dunia pesantren sangat diperlukan karena realitas yang digambarkan oleh wartawan pun yang tidak memahami dunia pesantren tidak bisa mengungkapkan realitas pondok pesantren secara utuh.

Sebagaimana diungkapkan Mulyana[85] bahwa makna suatu peristiwa yang diproduksi dan disebarluaskan oleh media massa, sebenarnya adalah suatu konstruksi yang temporer, rentan, dan terkadang muskil. Wartawan media massa cenderung memilih seperangkat asumsi tertentu yang berimplikasi bagi pemilihan judul berita, struktur berita, dan

---

[85] Deddy Mulyana, *Komunikasi Massa: Kontroversi, Teori, dan Aplikasi* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2008), 12-13.

keberpihakannya kepada seseorang atau sekelompok orang, meskipun keberpihakannya tersebut sering bersifat subtil dan tidak sepenuhnya disadari. Asumsi wartawan bersifat parsial, karena tidak mewakili pihak-pihak lain: wakil rakyat, pemerintah, kaum ilmuwan, LSM, kaum buruh, rakyat jelata, atau aliansi dari dua pihak atau tiga pihak tersebut. Seperti dibuktikan oleh studi tentang persepsi, setiap orang dan setiap kelompok aktif dan selektif dalam memahami lingkungannya, dan masing-masing memiliki persepsi yang berbeda atas suatu masalah, seberapa kecil pun perbedaan tersebut. Kerangka rujukan yang dimiliki kelompok wartawan memungkinkan mereka memunculkan persepsi kewartawanan yang boleh jadi berbeda dengan persepsi pemerintah, atau bahkan persepsi rakyat kebanyakan. Melalui penggunaan bahasa sebagai sistem simbol yang utama, para wartawan mampu menciptakan, memelihara, mengembangkan, bahkan meruntuhkan suatu realitas[86].

Posisi jurnalis "santri" menjadi sangat penting dalam mengonstruksi dunia pesantren di media massa. Selama ini, dikesankan bahwa dunia pesantren tidak menarik karena dinilai tidak marketable untuk industri media massa. Hal ini dipengaruhi oleh tidak banyaknya konstribusi pondok pesantren kepada media massa dalam bentuk iklan. Akibatnya, hanya pesantren-pesantren tertentu saja yang ampu menjalin komunikasi dengan pihak media yang berhasil tampil.

---

[86] *Ibid*, 69. Guru besar komunikasi Universitas Padjadjaran Prof. H. Deddy Mulyana, MA, Pd.D., mencontohkan bahwa ketika menyimak suatu wacana dalam surat kabar atau TV, terkadang kita tanpa sadar digiring oleh definisi yang ditanamkan media massa tersebut, yang membuat kita mengubah definisi kita mengenai realitas sosial atau memperteguh asumsi yang kita miliki sebelumnya.

Selebihnya, jurnalis akan menulis berita pesantren berdasarkan kepentingan dan politik redaksional. Pesantren baru muncul karena adanya tokoh politik yang datang ke pesantren, sehingga terkesan bahwa pesantren menjadi tempat mencari restu dan dukungan politik. Pesantren pun tergambarkan ikut terlibat dalam politik praktis. Lebih parah lagi, pemberitaan yang tidak lengkap memilih sumber berita, karena hanya satu politisi yang dikutip dalam berita, semakin meyakinkan pondok pesantren telah terseret dalam tarik menarik dukungan politik.

Anam[87] menyebut bahwa seorang jurnalis harus menerapkan konsep-konsep dasar dalam Islam terkait dengan dunia pemberitaan, yakni: 1) melakukan klarifikasi dan klasifikasi para nara sumber atau saksi mata; 2) jujur dalam pemberitaan; 3) teliti alias akurat, yang merupakan unsur pelengkap bagi kejujuran; 4) obyektif, atau dalam bahasa syariat Islam adalah "ikhlas"; dan 5) patuh pada aturan dan etika hukum. Mendasarkan pada konsep ini, menurut penulis, bagi jurnalis santri menjadi kewajiban untuk melakukan klarifikasi terhadap setiap peristiwa yang akan dipublikasikan dengan melakukan konfirmasi kepada nara sumber yang lengkap dan saksi mata yang memadai sehingga dapat merepresentasikan peristiwa yang diekspose. Kejujuran merupakan prinsip ajaran Islam yang harus dijunjung tinggi oleh jurnalis santri, sebab realitas adalah gambaran yang akan diungkapkan kepada khalayak, sehingga tidak boleh melakukan manipulasi terhadap fakta yang ditampilkan. Seorang jurnalis, selain harus bekerja secara profesional, kekuatan ikhlas menjadi motivasi

---

[87] Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik: Etika Kebebasan Pers menurut Islam* (Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2009), 169.

yang harus diperkuat karena pekerja jurnalistik sejatinya masuk kedalam ranah sosial, sehingga dibutuhkan keikhlasan dalam melaksanakan tugas. Dan, yang tidak kalah pentingnya adalah menjunjung tinggi etika yang ditetapkan dalam peraturan dunia jurnalistik, baik yang umum, maupun yang ditetapkan oleh institusi media massa pesantren.

Mengenai etos kerja seorang jurnalis pesantren dapat mengacu kepada nilai-nilai yang dikembangkan di pondok pesantren sebagaimana disebutkan Zarkasih (dalam Mustajab)[88], yaitu: jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa kemandirian, dan jiwa ukhuwah islamiyah. Nilai-nilai kejiwaan pondok pesantren tersebut dapat memperkuat posisi jurnalis santri dalam melakukan kegiatan jurnalistik berbasis pesantren tersebut. Kekuatan ikhlas merupakan dorongan spiritual agar seseorang tidak melepaskan posisi Allah dalam setip tindakan manusia, termasuk jurnalis dalam melakukan "pekerjaan" jurnalistiknya. Kesederhanaan dapat memperkokoh jiwa jurnalis muslim agar tetap berada dalam pembelaan terhadap kebenaran, bukan pembelaan terhadap kekuatan kapital yang mempengaruhi visi jurnalisme pesantren. Jiwa kemandirian sejalan dengan jiwa jurnalis yang mampu melakukan kerja dengan kekuatan sendiri, baik reportase yang ringan hingga yang terberat sekalipun dapat dilakukan dengan kemampuan jurnalis santri. Jiwa ukhuwah islamiyah menunjukkan keberpihakan ideologis terhadap posisi umat Islam yang saat ini lemah dalam pertarungan kekuatan media massa di dunia.

---

[88] Mustajab, *Masa Depan Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2015), 60.

Media Massa Pesantren

Media massa pesantren memiliki misi yang jelas dalam manajemen media massanya, yakni mengemban dakwah Islam yang ramah. Tentu saja, dalam menjalankan tugasnya, media massa pesantren tidak bisa dilepaskan dengan fungsi-fungsi media massa sehingga dapat menjadi media massa alternatif yang memiliki kekuatan untuk membangun kekuatan pesantren. Fungsi utama media jurnalistik yang harus diperankan oleh media massa pondok pesantren adalah sebagaimana yang dijelaskan Muhtadi[89] bahwa secara umum media massa, baik media cetak maupun elektronik, memiliki fungsi yang sama, yaitu: *pertama*, menyiarkan informasi. Ini merupakan fungsi utama media massa sebab masyarakat membeli media tersebut karena memerlukan informasi tentang berbagai hal yang terjadi di dunia ini. *Kedua*, mendidik. Media massa menyajikan pesan-pesan atau tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga dapat dijadikan media pendidikan massa. *Ketiga*, menghibur. Media massa biasanya menyajikan rubrik-rubrik atau program-program yang bersifat hiburan. Hal ini dihidangkan memang sengaja untuk menghibur atau yang lebih penting lagi untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel-artikel yang dapat menguras perhatian dan pikiran pembaca. *Keempat*, memengaruhi. Melalui fungsinya yang keempat ini pers memegang peranan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi tersebut, media massa pesantren dapat menyiarkan informasi yang berkaitan dengan pandangan

---

[89] Asep Saiful Muhtadi, *Komunikasi Dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 77.

pesantren mengenai isu terorisme yang menimpa di dunia Islam, misalnya. Hal ini penting dilakukan karena selama ini media massa Barat sering kali menggambarkan Islam identik dengan kekerasan. Sebagaimana dinyatakan Sholeh[90] media Barat menyebut pesantren telah menjadi '*breeding ground*' radikalisme dan terorisme di Indonesia. Sebutan ini menurutnya menjadi dua hal yang jelas berbeda tetapi saling keterkaitan. Padahal, sebagaimana digambarkan oleh Azyumardi Azra fakta itu sebagai sesuatu yang bukan *Indonesian origin* dan aksi terorisme di Indonesia itu disebutnya istilahnya sebagai '*importer terorism* daripada *home-grown terorism*'. Citra dunia pesantren sebagaimana dikonstruksi media tersebut menurut Sholeh juga bertentangan dengan masyarakat pesantren yang telah berkiprah dalam stabilitas internasional dan rekonsiliasi regional. Mereka telah terjun dalam memediasi persoalan dan konflik antara masyarakat dan negara. Masyarakat petani, nelayan, buruh dan bahkan pelaku industri menyerahkan peran komunitas pesantren sebagai wadah dan media rekonsiliasi dengan pemerintah. Dalam konteks inilah, media massa pesantren hadir melalui berita-berita yang memuat pandangan kaum pesantren terhadap terorisme.

Sejumlah kasus pemberitaan mengenai teroris yang kemudian dialamatkan kepada Islam dan umat Islam ternyata tidak terbukti di lapangan. Sejumlah kasus salah tangkap terhadap terduga teroris adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa isu terorisme dilatarbelakangi kepentingan tertentu. Bahkan, sejumlah media massa juga hanya mengandalkan

---

[90] Badrus Sholeh (edt). *Budaya Damai Komunitas Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2007), 133.

sumber-sumber resmi yang bersuara mengenai teroris, tanpa mau melakukan verifikasi terhadap statemen tersebut. Padahal, berdasarkan penelitian Tim Aliansi Jurnalis Independen (2011) sebagaimana dikutip Rahmawati[91] menyebut bahwa kegemaran media massa menjadikan sumber resmi sebagai sumber utama tanpa melakukan verifikasi sebagai dosa besar jurnalisme dalam peliputan terorisme. Hal ini semakin menegaskan bahwa realitas yang ditampilkan oleh media assa melalui sumber resmi sekalipun bukanlah jaminan terhadap kebenaran peristiwa yang diberitakan. Narasumbernya jelas, tetapi informasi yang disampaikan suber berita tersebut tidak jelas didalam menggambarkan realitas terorisme sehingga mengarahkan kepada Islam dan umat Islam sebagai pihak yang tertuduh. Untuk itu diperlukan kecermatan, kejelian, dan daya analisis yang tajam yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis santri ketika melihat realitas di lapangan sehingga tidak terjebak dalam vonis-vonis.

Menurut Mulyana[92], penyebutan media massa Barat terhadap siapa yang layak mendapatkan julukan teroris tidak bisa dilepaskan dengan peran Amerika Serikat yang menjadikan isu terorisme sebagai agenda global di dunia. Dengan demikian, tidaklah mengejutkan bisa Amerika Serikat sebagai "Sang Tuan" dunia memaksakan definisinya sendiri mengenai tindakan apa saja yang termasuk terorisme dan siapa

---

[91] Evi Rahmawati dan Tantowi (ed), *Jurnalisme Keberagaman* (Jakarta: HIVOS dan SEJUK Press, 2013), 29. Dalam konteks ini, jurnalisme keberagaman menawarkan kemajemukan dalam memberitakan peristiwa yang berkaitan dengan persoalan kesetaraan dalam ruang media.

[92] Deddy Mulyana, *Komunikasi Massa: Kontroversi, Teori, dan Aplikasi* (Bandung: Widya Padjdjaran, 2008), 138.

yang dapat dijuluki teroris. Sayangnya, karena begitu gencar dipromosikan media massa, pemaknaan sepihak itu tanpa sadar diterima banyak orang, kelompok, dan bangsa. Definisi Amerika mengenai segala hal menjadi semacam sumber "konstruksi sosial" lebih tepatnya propaganda yang tidak pernah kita persoalkan lagi. Mulyana mengilustrasikan dengan diksi yang jelas sebagai berikut:

> "Jika mereka yang menghancurkan gedung WTC sebagai teroris, bukankah Amerika pun teroris karena Amerika telah membunuh ratusan orang Afghanistan, termasuk anak-anak dan bayi-bayi tak berdosa untuk menangkap satu orang saja, yakni Osama bin Laden yang dicurigai sebagai gembong penghancur gedung WTC tersebut. Patut dipertanyakan pula, apakah nyawa seorang Amerika jauh lebih berharga daripada nyawa bangsa lain,"

Pernyataan Mulyana tersebut menegaskan betapa kuasanya media massa Barat dalam mengonstruksi realitas terorisme sesuai dengan kepentingan mereka. Media memang tidak bisa dilepaskan dari persoalan ideologi yang menaungi media tersebut. Ketika ideologi kebebasan berada di balik produksi media, maka peristiwa yang dipilih akan dikonstruksikan dalam bentuk berita yang senafas dengan ideologi kebebasan tersebut. Ketika ideologi pasar menaungi sebuah media massa, maka seluruh jurnalis dan berita yang dibuatnya adalah untuk memuaskan pasar, sebagaimana ketika media massa berideologi kapitalis maka keuntungan pemilik modallah yang akan diutamakan. Media massa pesantren memang seyogyanya mengusung ideologi pesantren sebagai kekuatan untuk melawan ideologi media massa yang hanya mengandalkan pasar sebagai identitasnya. Posisi ideologi

media massa pesantren penting dalam rangka ikut menegakkan jurnalisme yang bermartabat. Sebab, jurnalisme di Indonesia juga terus mengalami pasang surut.

Hal ini sebagaimana digambarkan Ashadi[93] dengan mendasarkan catatan Mosco bahwa terdapat perbedaan mencolok dalam wajah media massa di Indonesia antara sebelum dan pasca orde baru. Berakhirnya pengendalian yang koersif dan represif oleh kekuasaan negara, menjadikan media massa juga bersifat anomali. Jika pada masa Orde Baru media massa tidak dapat mengembangkan nilai kultural atas dasar *shared values* kebebasan pers, sebab melalui *apparatus* hegemonis Orde Baru seperti PWI dan Dewan Pers telah dikembangkan jurnalisme pembangunan, atau jurnalisme Pancasila, nama lain dari penerapan hegemoni dalam media jurnalisme. Mengikuti kondisi anomali dalam ruang publik pasca-Orde Baru, media massa di Indonesia mengambil peluang untuk menjadi bagian dari kekuatan pasar kapitalisme. Disini media massa bukan hanya menjadi pendukung kekuatan kapitalisme pasar dalam periklanan, tetapi keberadaannya sendiri digerakkan oleh dorongan kekuatan kapitalisme pasar yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Motif dan dorongan sebagai institusi kapitalisme pasar jika bersumber dari dalam, sulit dihadapi oleh kaum profesional yang menginginkan otonomi dan independensi dalam menjalankan fungsi sosial.

Jurnalisme pesantren sejatinya sudah dimulai oleh beragam kalangan di tanah air dari lingkungan pesantren.

---

[93] Ashadi Siregar, *Democratic Governance dan Hak Asasi Manusia: Makna Kebebasan Pers dalam Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UGM, Vol. 14 Nomor 3, Maret 2011), 322-323.

Kalangan pesantren telah menggagas banyak media massa, baik cetak maupun elektronik (termasuk *online*) yang berangkat dari kepedulian mereka akibat tidak berakomodasinya suara pesantren di media-media umum. Bahkan, dapat dinyatakan, kemunculan jurnalisme pesantren terstimulasi oleh pemberitaan media massa yang sering kali "menyudutkan" pesantren dengan melakukan framing peristiwa pesantren sehingga terkesan "tidak menyenangkan". Hal ini bisa dilihat dari produk jurnalisme pesantren yang lebih didominasi dengan idealisme pesantren yang tampil sebagai berita dan opini. Sebagaimana portal santrinews.com menyikapi mengenai jurnalisme pesantren dalam tampilan halamannya sebagai berikut.

SantriNews.com

Melestarikan Tradisi, Membumikan Demokrasi

Depan | Akhbar | Pesantren | Iqtishodiyah | Madrasah | Khazanah | Budaya | Fikroh | Syariah | Buku | Rehat | Tokoh | Wawancara | Indeks

Majalah SANTRI Hidupkan Jurnalisme Pesantren

M Zidni Nafi - SantriNews.com

Minggu, 08 Februari 2015 - 13:12 wib

Yogyakarta – Sekitar 45 mahasantri perwakilan dari berbagai perguruan tinggi negeri mengikuti pelatihan jurnalistik tingkat nasional yang digelar redaksi Majalah SANTRI Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs (CSS MORA), di Gedung Kampus Fiksi, Yogyakarta, Jumat-Ahad, 6-8 Pebruari 2015.

Surotul Ilmiyah pimpinan redaksi Majalah SANTRI mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk regenerasi kepengurusan di majalah tersebut. Selain itu, pihaknya berupaya melaksanakan kaderisasi jurnalis dari kalangan pesantren.

"Pelatihan ini juga dalam rangka syiar pengenalan majalah Santri ke segmen yang lebih luas, sekaligus mengembangkan semangat jurnalisme pesantren," kata Ilmi dalam pelatihan yang bertajuk 'Sebait Kata, Satu Asa Untuk Indonesia Berkarya'.

Menurut salah satu mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) ini, acara pelatihan jurnalistik tersebut penting digelar bagi santri karena sebagai wadah untuk menumbuhkan kecintaan dalam berkarya di dunia

TERKAIT

Nur Syam: Ciri Santri di Pesantren Radikal Mudah Dikenali

Film Penjuru 5 Santri Ajari Indonesia Belajar pada Pesantren

Hari Santri, Pengakuan Peran Ulama Pesantren Dalam Berbangsa

Pesantren Tebuireng Gandeng LIPI untuk Berdayakan Santri

Menpora Minta Pesantren Prakarsai Liga Santri

Liga Santri Momentum Gali Nilai-nilai Pesantren

Ketika Kapolri Motivasi Santri di Pesantren Baitul Arqom

Tadzkirah

Kenaikan Beragama Seseorang Ditandai oleh Akhlaknya yang Baik – KH A Musthofa Bisri

– Akhlak

SPIRIT: jurnalisme pesantren menjadi salah satu alternatif media yang dapat menjembatani keinginan khalayak untuk memahami dunia pesantren dari dalam pesantren sendiri secara profesional dan proporsional.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka desain jurnalisme pesantren sebenarnya dapat dikembangkan, baik secara personal (santri, kyai, ustad) maupun secara organisasi

(lembaga santri, organisasi kyai, yayasan pondok pesantren maupun asosiasi alumni). Sebab, saat ini, dunia pesantren juga sudah sangat akrab dengan berbagai perkembangan teknologi dan informasi. Sebagai contoh, pondok Tremas Pacitan Jawa Timur yang dikenal sebagai cikal bakal pondok salaf yang berdiri pada tahun 1830, kini juga sudah memiliki website yang dikelola secara menarik. Konten yang ditampilkan pun cukup beragam, sehingga dapat menjadi alternatif informasi yang akurat tentang dunia pesantren. Tidak hanya berita yang bersifat teks saja, namun foto-foto, audio, hingga aplikasi audiovisual juga sudah melengkap laman "pondoktremas.com" tersebut. Tak mau ketinggalan, pondok yang "bersantri" ribuan itu juga memiliki TremasTV untuk memberikan deskripsi mengenai pondok pesantren.

Pondok pesantren ini juga melengkapi dengan berbagai menu online, mulai berita, sejarah pondok, hingga kisah para kyai dan alumni santrinya. Tampilan perwajahan (layout) "pondoktremas.com" juga cukup menarik dan bersaing dengan website pesantren lain yang kini bermunculan bak jamur di musim hujan. Bahkan, cara pencariannya sangat mudah hanya dengan klik mesin pencarian Google, dunia pondok pesantren Tremas dapat dilihat sebagai berikut.
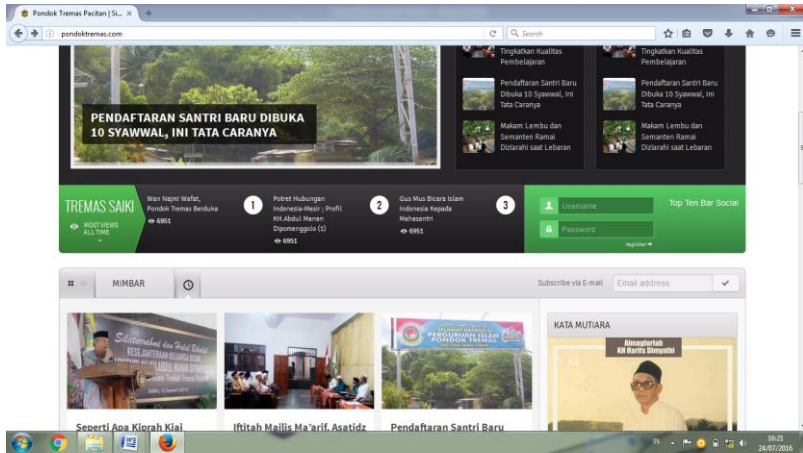
SISI LAIN: salah satu website pondoktremas.com yang merupakan bentuk jurnalisme pesantren karena dikelola oleh para pengurus pondok secara mandiri. Beritanya juga mengenai pesantren dan bidang umum yang dipandang dari sudut pondok.

Secara ringkas, membangun jurnalisme pesantren sejatinya sudah dimulai oleh kalangan pondok sendiri. Bahkan, pondok Sidogiri Pasuruan malah sudah mempunyai "institusi pers" yang bernama Badan Pers Pondok (BPP) yang merespok pandangan-pandangan pers menurut pondok pesantren. Melalui media massa Sidogiri.Net, kekuatan pondok pesantren membangun jurnalisme pesantren dapat dikembangkan di masa-masa mendatang. Desain Jurnalisme Pesantren secara umum dapat dijelaskan dalam bagan berikut.

Desain Jurnalisme Pesantren

Unsur Jurnalisme	Deskripsi	Aplikasi
Berita Pesantren	Berita politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, seni, dengan prioritas peristiwa di pesantren dan sebagian kecil peristiwa non pesantren.	Setiap peristiwa dapat dilihat dari perspektif pondok pesantren. Pandangan kyai, ustad, dan santri dalam melihat realitas dalam bidang kehidupan apapun layak untuk diberitakan.
Jurnalis Santri	Wartawan Santri dan reporter yang memahami dunia pondok pesantren.	Rekrutmen dengan pelatihan jurnalistik dari tingkat dasar hingga mahir. Mengikuti organisasi wartawan dan mengikuti sertifikasi wartawan Indonesia.
Media Pesantren	Media Massa Cetak:	Didirikan atas nama yayasan pondok pesantren, forum kyai,

	majalah, tabloid, surat kabar, buletin, buku. Media Massa Elektronik: radio, televisi, film, Media Massa Online: blog, web, net, com,	aliansi santri, atau berbadan hukum berbentuk perusahaan terbatas (PT) di dimotori kalangan pondok pesantren. Dikelola dengan manajemen media pesantren yang profesional.
Massa Pesantren	Kyai, Santri, Ustad, Guru Ngaji, masyarakat umum	Segmentasi khalayak penikmat media (konsumen) adalah jaringan pesantren baik di dalam negeri dan di luar negeri, bisa melalui langganan media pesantren maupun eceran.

Bab IV
Jurnalisme Pesantren: Strategi dan Aksi

A. BUSUR 23: Media Alternatif Pesantren PP Miftahul Ulum Suren

Sebagai pendukung kelengkapan data teoritis tentang jurnalisme pesantren dalam buku ini, khususnya pada bab IV dan Bab V, sengaja tim menghadirkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim penulis secara kolektif. Kelompok Dampingan dalam Program pengabdian ini mengangkat tema tentang penguatan dakwah melalui jurnalisme warga (Citizen Jurnalism) berbasisi santri pada pondok pesantren pinggiran di kabupaten Jember. Adapun subyek dampingan dalam pengabdian ini adalah para santri pondok pesantren Miftahul Ulum Suren Kabupaten Jember khususnya santri yang aktif dalam pengelolaan majalah Busur 23.

Berdasarkan hasil penelusuran data sementara (*mapping*),

sebelumnya komunitas jurnalis santri ini memiliki produk majalah berupa BUSUR 23, majalah ini merupakan hasil karya santri PP Miftahul Ulum, baginya majalah ini diharapkan banyak dapat menjadi sarana bagi santri untuk mewujudkan Cita-cita atau tujuan hidup sebagai bagian dari seseorang yang ingin meraih kesuksesan dimasa yang akan datang. Hal demikian diakui oleh komunitas ini sebagai hal yang lumrah yang pastinya dimiliki oleh setiap manusia. Karena bercita-cita untuk menjadi orang kaya, orang pintar ataupun memiliki cita-cita untuk mendapatkan status social maupun pendidikan juga adalah segelintir contoh cita-cita yang dimiliki oleh setiap manusia[94]. Dan cita-cita pula lah yang menjadi factor utama yang melandasi lahirnya Buletin Pesantren Miftahul Ulum melalui para Siswa Madrasah Aliah Suren (BUSUR 23) Sebagai harapan media ini nantinya menjadi media kreatifitas kalangan santri Miftahul Ulum, Suren terutama dalam bidang jurnalistik seperti tulis-menulis dan reportase dalam mengangkat sebuah berita ataupun fenomena yang terjadi disekitar kita.

Salah satu inspirasi tentang hadirnya buletin ini adalah munculnya beberapa buletin di beberapa pesantren dan madrasah yang telah lahir lebih awal pastinya. Keinginan memiliki buletin yang serupa itu telah muncul 2-3 tahun sebelumnya dan sayangnya keinginan tersebut baru bisa tercapai pada tahun 2015 ini. Puji syukur alhamdulilah berkat dukungan dari kepala Madrasah Moh Ilham Pribadi, M.Pd.I serta teman-teman guru yang tergabung dalam tim redaksi buletin ini bisa merealisasikan komunitas jurnalis kalangan

---

[94] Pengakuan Muhammad Eko, Koordinator Komunitas Santri Jurnalis dari Pesantren Miftahul Ulum Suren dalam kesempatan gelar dalog dengan tim dampingan pada tanggal 11 September 2015.

santri dengan memiliki buletin untuk pertama kalinya.

Kelahiran pertama buletin ini dihadapkan pada nama yang akan diberikan atau dipasang. Setelah berdiskusi dan *sharing* dengan kepala madrasah serta teman-teman redaksi muncullah beberapa pilihan nama yang akan dipasang. Dan disepakati nama BUSUR 23 sebagai nama buletin madrasah ini, BUSUR diambil dari singkatan Buletin Siswa Madrasah Aliah Suren dan angka 23 dipilih karena tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal kelahiran madrasah yaitu 23 Agustus. Dan logo busur yang dipasangi oleh sebuah anak panah mempunyai makna dengan membaca buletin ini akan mampu menembus semua informasi yang ada di madrasah dan pesantren Miftahul Ulum, Suren.

Dengan slogan Membuka Wawasan, serta Menembus Cakrawala harapan yang besar diemban buletin ini kedepannya. Terutama bagaimana bisa tetap memberikan informasi dan pengetahuan yang ada di madrasah dan pesantren tercinta kita ini. Selain itu kehadiran buletin ini dijadikan wadah berkreasi para seluruh siswai-siswi dalam mengembangkan kemampuan menulis mereka.

Diketahui bahwa media massa pesantren memiliki misi yang jelas dalam manajemen media massanya, yakni mengemban dakwah Islam yang ramah. Tentu saja, dalam menjalankan tugasnya, media massa pesantren tidak bisa dilepaskan dengan fungsi-fungsi media massa sehingga dapat menjadi media massa alternatif yang memiliki kekuatan untuk membangun kekuatan pesantren. Fungsi utama media jurnalistik yang diperankan oleh media massa pondok pesantren ini adalah yaitu: dapat menyiarkan informasi yang

berkaitan dengan pandangan pesantren mengenai isu terorisme yang menimpa di dunia Islam, misalnya.

Hal ini penting dilakukan karena selama ini media massa Barat sering kali menggambarkan Islam identik dengan kekerasan. Sebagaimana dinyatakan Sholeh[95] media Barat menyebut pesantren telah menjadi '*breeding ground*' radikalisme dan terorisme di Indonesia. Sebutan ini menurutnya menjadi dua hal yang jelas berbeda tetapi saling keterkaitan. Padahal, sebagaimana digambarkan oleh Azyumardi Azra fakta itu sebagai sesuatu yang bukan *Indonesian origin* dan aksi terorisme di Indonesia itu disebutnya istilahnya sebagai '*importer terorism* daripada *home-grown terorism*'.

Citra dunia pesantren sebagaimana dikonstruksi media tersebut menurut Sholeh juga bertentangan dengan masyarakat pesantren yang telah berkiprah dalam stabilitas internasional dan rekonsiliasi regional. Mereka telah terjun dalam memediasi persoalan dan konflik antara masyarakat dan negara. Masyarakat petani, nelayan, buruh dan bahkan pelaku industri menyerahkan peran komunitas pesantren sebagai wadah dan media rekonsiliasi dengan pemerintah. Dalam konteks inilah, media massa pesantren hadir melalui berita-berita yang memuat pandangan kaum pesantren terhadap terorisme.

Sejumlah kasus pemberitaan mengenai teroris yang kemudian dialamatkan kepada Islam dan umat Islam ternyata tidak terbukti di lapangan. Sejumlah kasus salah tangkap terhadap terduga teroris adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa isu terorisme dilatarbelakangi kepentingan tertentu. Bahkan, sejumlah media massa juga hanya mengandalkan

---

[95] Badrus Sholeh (edt). *Budaya Damai Komunitas Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2007), 133.

sumber-sumber resmi yang bersuara mengenai teroris, tanpa mau melakukan verifikasi terhadap statemen tersebut.

Padahal, berdasarkan penelitian Tim Aliansi Jurnalis Independen (2011) sebagaimana dikutip Rahmawati[96] menyebut bahwa kegemaran media massa menjadikan sumber resmi sebagai sumber utama tanpa melakukan verifikasi sebagai dosa besar jurnalisme dalam peliputan terorisme. Hal ini semakin menegaskan bahwa realitas yang ditampilkan oleh media assa melalui sumber resmi sekalipun bukanlah jaminan terhadap kebenaran peristiwa yang diberitakan. Narasumbernya jelas, tetapi informasi yang disampaikan suber berita tersebut tidak jelas didalam menggambarkan realitas terorisme sehingga mengarahkan kepada Islam dan umat Islam sebagai pihak yang tertuduh. Untuk itu diperlukan kecermatan, kejelian, dan daya analisis yang tajam yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis santri ketika melihat realitas di lapangan sehingga tidak terjebak dalam vonis-vonis.

B. Tentang Pesantren Miftahul Ulum Suren

Adalah salah satu pesantren yang berada di Kabupaten Jember, dan secara geografis pesantren ini berada diwilayah pinggir sebelah timur kabupaten Jember, awalnya Pondok pesantren Miftahul Ulum Suren didirikan oleh Almarhum KH. Ahmad Mudzhar Bin Abdus Salam, beliau lahir tahun 1914 di Madura, tepatnya di desa Karang Compakah, kecamatan

---

[96] Evi Rahmawati dan Tantowi (ed), *Jurnalisme Keberagaman* (Jakarta: HIVOS dan SEJUK Press, 2013), 29. Dalam konteks ini, jurnalisme keberagaman menawarkan kemajemukan dalam memberitakan peristiwa yang berkaitan dengan persoalan kesetaraan dalam ruang media.

Blutoh, Kabupaten Sumenep. Pada umur yang masih terbilang muda, beliau menuntut ilmu di pondok pesantren Banyuanyar selama kurang lebih 3 tahun yang saat itu pengasuh pesantren Banyuanyar adalah KH. Abdul Hamid Bin Isbat. Beliau belum puas diri untuk terus menimba ilmu, perantauan beliau ke Jawa adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Di Jawa beliau mengemban ilmu agama di pondok pesantren yang berada di desa Sukokerto, kecamatan Sukowono, kabupaten Jember yang pada saat itu pengasuhnya adalah KH. Abdussyukur. Kurang lebih sekitar 2 tahun beliau menempuh pendidikan di ponpes tersebut, beliau pindah karena KH. Abdussyukur Wafat.

Beliau akhirnya pindah ke pondok pesantren Raudatul Ulum Sumber Wringin, kecamatan Sukowono, kabupaten Jember yang saat itu pengasuhnya adalah KH. Ahmad Syukri Bin Urmat dan KH. Umar Bin Ahmad Ikrom. Saat beliau mondok di Raudatul Ulum, beliau betah karena banyak teman dan juga beliau sering diajak dakwah oleh KH. Umar ke masyarakat, membantu mengajar dan membantu para santri untuk memahami pelajaran. Karena begitu dekatnya beliau dengan KH. Umar, KH Umar berniat menjodohkan beliau dengan gadis desa dari Jember bagian timur tepat nya di Dusun Dampar, desa Suren, kecamatan Ledokombo, kabupaten Jember yaitu Nyai Solhah Binti Shonhaji.

Perjodohan itu sempat ditolak oleh KH. Ahmad Mudzhar karena beliau masih ingin memperdalam ilmunya dipondok pesantren Raudatul Ulum. KH. Umar menjodohkan beliau dengan Nyai Solhah bukan tanpa tujuan, tujuan KH. Umar adalah menugaskan beliau untuk memberi pengaruh islam yang kuat didaerah tempat tinggal Nyai Solhah, dan juga untuk mendirikan pondok pesantren di desa Suren. KH. Umar

menyuruh beliau untuk istikharah untuk meminta petunjuk, dan dalam mimpi beliau, beliau didatangi oleh KH. Syukri, KH. Syukri berkata " nda'i kalau ingin menjadi orang yang sukses dunia akhirat dan selamat dunia akhirat ikuti KH. Umar". Setelah bermimpi tersebut, akhirnya beliau menyetujui menikah dengan Nyai Solhah dan mendirikan pesantren Di Desa Suren.

Setelah menikah beliau tinggal di desa Suren. Sebelum lembaga pesantren didirikan, di desa Suren sudah terdapat Surau kecil tetapi sekitar 7 tahun surau itu fakum. Pada tahun 1944 berdirilah pondok pesantren Miftahul Ulum Suren. Beliau memulai dengan sebuah surau kecil yang berdinding nyaman bambu, berlantai kayu dan beratap genting, kemudian di bangun kamar-kamar (pondok) sebagai istirahat santri, pada saat itu jumlah santri tidak terlalu banyak sebanyak kurang lebih 15 orang santri putra dan beberapa antri putri. KH. Umar bukan hanya membantu menjodohkan beliau dengan Nyai Solhah tetapi beliau juga membantu mempromosikan tentang pondok pesantren Miftahul Ulum Suren dengan menyelipkan promosi dalam dakwah dan juga menyuruh para santri yang tempat tinggalnya dekat dengan pondok pesantren Miftahul Ulum untuk mondok diponpes tersebut dan tidak perlu kembali kepondok Raudatul Ulum karena ponpes Miftahul Ulum dan Raudatul Ulum sama saja.

Pendidikan yang ada di pondok pesantren Miftahul Ulum Suren merupakan pendidikan tradisional murni, sistem pengajaran KH. Ahmad Mudzhar adalah sorogan, bandongan dan wetonan. Pelajaran terfokus pada pengajian- pengajian kitab kuning seperti Al-jurumiyah, kailani, sullam, safina, fathul mu'in, tafsir dan lain-lain. adapun Evaluasi adalah

setelah selesai mengajar kitab kuning tersebut pada pertemuan berikutnya akan ditanya ulang oleh kyai materi yang telah diajarkan sebelumnya.

Beberapa tahun setelah pernikahan KH. Ahmad Mudzhar dengan Nyai Solhah, beliau dikarunai putra dan putri yaitu Nyai Maftuhah, Kyai Hanafi dan, Nyai Munawwarah. Setelah wafatnya Nyai Solhah, KH. Ahmad menikah lagi dengan Nyai Nafisah Binti Kyai Asyri dan dikarunia putra dan putri yakni Nyai Sukriah, KH. Muhammad Hasan Mudhar, KH. Mudhasir Mudhar dan Nyai Siti Romlah. Setelah wafatnya Nyai Nafisah, beliau menikah kembali dengan Nyai Khotijah, tidak berlangsung lama beliau berpisah dengan Nyai Khotijah dan menikah kembali dengan Nyai Hj. Siti Rukayyah Binti Kyai Mukmin dan dikaruniai putra yang bernama KH. Muhammad Hazin Mudzhar.

Seiring dengan perkembangan zaman, pondok pesantren Miftahul Ulum Suren terus mengembangkan dan membuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal yang dimotori oleh putra KH. Ahmad Mudhar, yaitu Almarhum KH. Hasan Mudhar. KH. Ahmad sempat menolak didirikannya sekolah formal karena beliau mengikuti jejak guru yang mendirikan pondok salaf, tetapi KH. Hasan juga mendapat perintah oleh gurunya di Nurul Jadid untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendirikan pendidikan formal.

Akhirnya KH. Ahmad melakukan sholat istiharoh untuk mendapatkan petunjuk karena beliau dengan putranya sama-sama atas perimtah guru. Dalam mimpinya beliau bermimpi bertemu dengan Almarhum KH. Sukri. KH. Sukri menanyakan waktu sholat Dhuhur dan menanyakan apakah KH. Ahmad

sudah melaksanakan sholat, karena belum sholat KH. Sukri mengajak KH. Ahmad sholat berjamaah disurau, tetapi KH. Sukri sholat dipaling ujung surau dan tidak dapat berjamaah kepada beliau. Setelah mimpi tersebut KH. Ahmad menyetujui didirikannya pendidikan formal.

Lembaga-lembaga pendidikan formal yang didirikan secara bertahap dan tetap eksis dilingkungan pondok pesantren Miftahul Ulum Suren yakni: Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum berdiri tahun 1978, Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum berdiri tahun 1980, Madrasah Aliyah Miftahul Ulum berdiri tahum 1983, dan Madrasah Athfal Miftahul Ulum berdiri tahaun 1997. Pondok pesantren Miftahul Ulum Suren disamping sebagai lembaga pendidikan, juga mengembangkan dan menunjukkan eksistensi dirinya sebagai lembaga sosial dan dakwah kepada masyarakat. Pencapaian yang dicapai oleh para santri setelah menempuh pendidikan dipondok pesantren Miftahul Ulum Suren diantaranya dapat sejajar dengan santri alumni pondok pesantren lain yang sudah tersohor dikalangan masyarakat, tidak sedikit para santri sudah dapat mendirikan pondok pesantren. Sejak wafatnya almarhum KH. Ahmad Mudzhar pada tahun 1998, kepengasuhan pondok pesantren Miftahul Ulum Suren digantikan oleh putra beliau yaitu KH. Muhamad Hasan Mudhar.

C. Pilihan Metode Dan Strategi dalam Aksi

Perlu diurai dalam buku tentang jurnalisme pesantren ini adalah metode dan pendekatan dalam aksi pengabdian yang telah dilaksanakan oleh tim penulis sebelumnya. Harapannya pendekatan ini bisa menjadi petunjuk rangkaian aksi yang telah dilaksanakan sehingga bisa memperkuat konsep buku

jurnalisme pesantren. Adapun pengabdian yang telah dilaksanakan adalah tentang penguatan dakwah melalui jurnalisme warga (Citizen Jurnalism) berbasisi santri pada pondok pesantren pinggiran di kabupaten Jember maka pilihan pendekatannya adalah dengan menggunakan pendekatan partipatoris.

Diketahui bahwa Pendekatan "partisipasi", atau "partisipatory" sudah cukup lama populer dan mengalami perkembangan pesat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini, khususnya dalam isu pelatihan untuk menciptakan dan mengembangkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Di lingkungan masyarakat dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang unik, pendekatan partispatif penting dilakukan untuk meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan dan Perubahan Sikap.

Didalam pendekatan ini, para peserta dalam program penguatan dakwah melalui jurnalisme warga (Citizen Jurnalism) berbasisi santri di pesantren Suren Ledok Ombo diperlakukan sebagai narasumber utama, dengan mengali potensi Cipta, Rasa dan Karsa sehingga menghasilkan Karya (Produk) yang bersumber dari pengalaman pribadi mereka dalam proses pemberdayaan yang digunakan sebagai sumber informasi utama untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Proses partisipasi itu sendiri merupakan keterampilan yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap personal, namun kemampuan ini perlu diolah dan dikomunikasikan untuk menciptakan proses partisipatif yaitu membangun kepercaya-an diri, membangun proses dialog, memberikan pembelajaran dan keterampilan yang dapat diaplikasikan oleh peserta pelatihan dalam proses pendampingan.

Didalam pelaksanaan program penguatan dakwah melalui jurnalisme warga (Citizen Jurnalism) berbasisi santri yang dilakukan juga melalui tahap beberapa pelatihan ini, peserta belajar bersama mengenai kemampuan dasar jurnalistik dan pendekatan partisipatif yang dapat diterapkan dalam proses pendampingan masyarakat sehingga para pendamping akan menjadi lebih baik dan lebih percaya diri.

Peserta dampingan dalam program penguatan dakwah melalui jurnalisme warga (Citizen Jurnalism) berbasisi santri akan memahami prinsip dasar dan teknik jurna;istik. Studi Kasus dan Diskusi Kelompok, dengan mengajak peserta untuk mengkritisi kasus dan temuan dalam proses pendampingan, juga menjadi bagian metode yang digunakan hal ini bertujuan untuk mempertajam analisa pemberdayaan masyarakat.

Selain itu metode lain yang juga dilakukan adalah Curah Pendapat (Brainstroming), Proses kreatif untuk menghasilkan ide-ide peserta yang berkaitan dengan pengalaman dan wawasan dalam jurnalistik. Kemudian Sumbang Saran, proses berbagi pengalaman antara peserta sebagai sumber pembelajaran dan motivasi mereka juga menjadi bagian strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Selain itu pendamping juga menggunakan metode Bermain Peran & Game Simulasi pendampingan, simulasi fasilitasi dan pendampingan untuk berlatih mengenai Jurnalistik. Selain itu metode Latihan, menjadi salah satu bentuk pembelajaran aktif yang mendorong dan mengasah kemampuan peserta untuk mengembangkan diri terhadap kemampuan jurnalistik.

Dengan begitu fasilitator tidak hanya dengan menggunakan metode ceramah semata, meski demikian Ceramah juga digunakan sebagai sumber inspirasi dan wawasan dalam

proses pelaksanaan program penguatan dakwah melalui jurnalisme warga (Citizen Jurnalism) berbasisi santri..

Adapun framework dan strategi aksi yang dilakukan dalam pelaksanaan program penguatan dakwah melalui jurnalisme warga (Citizen Jurnalism) berbasisi santri adalah sebagai berikut :

1. *Identifikasi potensi*

Pada tahap Identifikasi ini tim melakukan pemetaan potensi pada mitra dampingan, sehingga dapat dipetakan bahwa kelompok dampingan harus dibekali kemampuan jurnalistik pada dua kelompok, masing-masing adalah kelompok dampingan yang terdiri dari semua santri baik putra maupun putrid dan kelompok dampingan yang terdiri dari santri yang aktif terlibat dalam proses penerbitan majalah BUSUR 23.

2. *Penguatan Kelompok Dampingan*

Pada tahap ini, Tim dampingan melakukan penguatan jurnalistik termasuk pengetahuan teknik jurnalisme warga kepada santri (Kelompok dampingan) adapun kelompok dampingan terkelompokkan berdasarkan pada hasil pemetaan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini tim bersama dengan stakholder lain melakukan kegiatan Diklat jurnalistik, sebagai bahan materi dalam kegiatan ini meliputi: Mengetahui dasar-dasar jurnalistik, etika jurnalistik, Jurnalisme Warga, Teknik membuat tulisan berita, teknik membuat tulisan artikel, manajemen keredaksian dan mengenal berbagai media massa, serta teknik membuat media massa baik cetak maupun media massa berbasis internet. Dihasil pada proses tahap ini

santri sebagai kelompok dampingan lebih mengenal lebih dalam tentang jurnalistik khususnya jurnalisme warga.

3. *Dampingan Kemandirian Kelompok Dampingan*

Pada tahap ini, tim dampingan melakukan dampingim pada santri/masing-masing kelompok dampingan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan jurnalisme, sebagai wujud keberhasilan pendamping melakukan dampingan hingga kelompok dampingan dapat menerbitkan majalah BUSUR 23 dengan lebih professional, media majalah inilah yang dapat digunakan oleh santri untuk menjalankan kegiatan jurnalis warga.

Untuk mewujudkan kegiatan pengabdian tentang penguatan jurnalisme warga *(Citizen Jurnalism)* berbasis Santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Silo Kabupaten Jember. Tim selain melibatkan kegiatan ini secara kelembagaan juga mengggandeng beberapa stakeholder lain yang dinilai terkait dan berkontribusi untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, diantaranya kalangan jurnalis yang tergabung dalam awak media Jawa Pos (Radar Jember), hal ini didasarkan karena keberadaan media jawa pos (Radar Jember) saat ini masih menjadi standar ukuran opini public local dikabupaten Jember, selain crew manajemen radar jember juga memiliki hubungan kerjasama dengan lembaga IAIN Jember.

Bab V
Jurnalisme Pesantren : Media Alternatif Penguatan Dakwah Islam

Ada beberapa tahap pelaksanaan aksi yang dilakukan dalam program penguatan dakwah melalui jurnalisme warga (Citizen Jurnalism) berbasisi santri ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Identifikasi Potensi Komunitas Dampingan

Pada tahap Identifikasi ini dalam program dampingan ini, pengusul bersama tim melakukan pemetaan potensi pada mitra dampingan, dalam hal ini tim membuat identifikasi potensi meliputi, santri yang belum memahami pengetahuan

jurnalistik, santri yang telah mengenal mengenal jurnalistik secara mendasar, santri yang telah aktif dalam kegiatan jurnalistik melalui majalah Busur 23.

Berdasarkan hasil pemetaan menunjukkan bahwa santri yang memiliki bekal skill menulis adalah mereka yang terlibat aktif dalam pengelolaan bulletin busur 23 sebagaimana media yang telah diterbitkan oleh santri pondok pesantren Miftahul Ulum Suren Ledok Ombo Jember. Adapun rata-rata kalangan santri masih relative minim pengetahuannya dibidang tulis menulis, padahal disisi yang lain berdasarkan hasil rembuk dengan kelompok dampingan yang telah dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat diketahui bahwa proses penerbitan pada edisi perdana bulletin Busur 23 sumber tulisan diperoleh dari kalangan santri.

Diketahui bahwa Seorang penulis hebat yang sudah menerbitkan puluhan bahkan ratusan tulisan baik itu penulis buku, majalah, koran, penulis puisi, penulis novel, penulis di blog atau biasa disebut blogger semua pasti berawal dari seorang penulis "pemula" yang sering kali mengalami berbagai kendala saat mau mulai menulis, hal inipun juga dialami oleh Santri sebagai bagian dari penulis pemula.

Berikut beberapa kendala yang sering dihadapi santri sebagai penulis "pemula" khususnya uraian masalah yang sedang dihadapi oleh santri PP Miftahul Ulum yang tergabung dalam proses penerbitan majalah BUSUR 23, diantaranya adalah saat mau mengawali sebuah tulisan: Setiap kali ingin menulis tapi tidak punya ide, Saat dikejar deadline, harus segera menyelesaikan suatu tulisan, namun kondisi tidak mood, atau karena memang ada faktor malas, Kendala berikutnya adalah kurangnya wawasan atau pengetahuan yang

masih sedikit, Masalah lainya adalah sedikitnya bahan yang akan kita tuliskan atau kurangnya bahan bisa berupa data dan informasi, Kendala yang termasuk dalam penyakit seorang penulis pemula adalah sulit menuangkan gagasan dalam tulisan.

Selain itu santri juga dihadapkan pada ketersediaan Data dan informasi yang telah tersedia namun sering kali susah sekali merangkai bahan yang ada tadi menjadi sebuah tulisan yang menarik dan unik, Masalah yang menjadi kendala yang lain adalah belum tahu atau belum mendapatkan ilmu tentang struktur penulisan yang benar dan baik, bahkan Tulisan yang dibuat cenderung tidak sistematis dan ini berakibat pada kebosanan dan bingungnya pembaca tulisan kita, santri juga sering kali menulis dan cenderung muter-muter, tak jelas ujung pangkalnya, Biasanya jika pendahuluan atau alinea pembuka sudah dibuat maka tulisan kelanjutanya akan mudah dibuat, namun bagi penulis "pemula" ini ternyata membuat sebuah lead/alinea pembuka sangatlah sulit, dan inilah yang menjadi salah satu kendala dalam menulis. Karena itu santri juga Sulit menyusun suatu kalimat menjadi sebuah paragraf yang menarik dan enak dibaca. Bahkan santri juga belum tahu atau susah sekali membuat membuat ending atau tulisan penutup.

Atas dasar itulah, maka dapat mitra dampingan dalam pelaksanaan kegiatan dampingan dikelompokkan pada dua kelompok dampingan; diantaranya kelompok dampingan umum yang meliputi semua santri baik santri putrid maupun santri putra dan kelompok dampingan khusus yang meliputi santri yang aktif dalam pengelolaan bulettin Busur 23.

Adapun strategi yang digunakan dalam dampingan ini, mengikut sertakan kelompok dampingan umum dalam tahap

penguatan dengan menggelar kegiatan Diklat jurnalistik, serta melibatkan kelompok dampingan khusus selain memperoleh bekal jurnalistik melalui diklat juga digembleng secara intens selain menyangkut teknis penulisan juga pada teknis pengelolaan media termasuk teknis layout.

B. Penguatan Komunitas Dampingan

Pada tahap penguatan kelompom dampingan ini dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu tahap pertama, dilaksanakan Diklat jurnalistik yang diikuti oleh santri putra sebanyak 120 santriwan dan Diklat Jurnalistik (dalam forum yang berbeda) diikuti oleh santri putrid sebanyak 225 santriwati. Adapun pada tahap penguatan yang berikutnya diikuti oleh sedikitnya 25 santri yang aktif terlibat dalam pengelolaan majalah Busur 23. Pada tahap ini dilaksanakan secara kontinyu hingga mitra dampingan mampu secara mandiri mengelola majalah dengan lebih baik lagi, karenanya melalui program ini, untuk tahap kemandirian tim pengabdian selain mendampingin teknis penulisan juga mendampingi hingga proses cetak majalah Busur 23.

1. Penguatan Tahap Pertama melalui Diklat Jurnalistik Dasar

Pada tahap ini, Tim dampingan melakukan penguatan jurnalistik termasuk pengetahuan teknik jurnalisme warga kepada santri (Kelompok dampingan). bedasarkan hasil identifikasi potensi kelompok dampingan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini tim bersama dengan stakholder lain melakukan kegiatan diklat jurnalistik kepada santri pondok pesantren miftahul ulum Suren Ledok Ombo. Sebanyak 100 lebih santri putra, dan sebanyak 200 lebih santri putri mengikuti pelatihan jurnalistik dalam forum kegiatan yang berbeda.

Kegiatan ini dimulai dengan opening yang dihadiri oleh semua ustadz dan ustadzah serta pengurus pesantren termasuk kepala sekolah madrasah aliyah miftahul ulum. Sebagai harapan kegiatan ini bisa mengantarkan pada santri PP Miftahul Ulum Suren, sehingga dapat mengenal bahkan juga memperkuat kemampuannya dibidang jurnalistik.

Diungkapkan oleh Kepala sekolah MA Miftahul Ulum, Moh. Ilham Pribadi, M.Ag bahwa pelatihan jurnalistik sebagaimana proses dampingan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat dari IAIN Jember merupakan sebagai upaya bersama dalam rangka memberikan tambahan kemampuan kepada santri-santri sehingga mereka dapat memiliki kemampuan menulis. (Sumber : Rekam Data Proses Kegiatan)

Menurutnya Santri pondok pesantren dapat menjadi jurnalis yang handal dalam menyampaikan pesan-pesan pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat melalui berbagai media yang ada sekarang ini, terutama internet. Santri dapat menyuguhkan berita yang menarik di lingkungan pesantren agar dapat diketahui kiprahnya selama ini sehingga dapat mengimbangi informasi yang kurang bagus tentang

pesantren yang diberitakan sebagian media informasi saat ini.

Kepala Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Ulum Suren Ilham Pribadi, M.Pd dalam sambutannya juga mengungkapkan bahwa pelatihan jurnalistik tersebut sangat diharapkan karena sangat dibutuhkan untuk keterampilan santri dalam menulis pesan di media massa. Santri dengan potensi yang dimilikinya sejatinya mempunyai kapasitas menjadi jurnalis karena hakikatnya dakwah adalah bagian dari perintah Islam. "Apalagi, di era digital sekarang ini, banyak media yang bisa menjadi sarana untuk menyampaikan pesan kepada publik agar ilmu-ilmu di pesantren dapat ditransformasikan melalui media tersebut," ujarnya.

Pihaknya berharap agar para santri dapat menjadikan pelatihan tersebut sebagai jembatan untuk mengasah kemampuan menulis mereka di media massa. Minimal, saat ini, dengan hadirnya media berbasis internet, para santri nantinya dapat menyampaikan tulisan-tulisan mereka melalui media alternatif, seperti media Online. "Saya yakin, kalau para santri terus berlatih untuk menulis, mereka pasti bisa. Yang terpenting, saat ini mereka berproses dulu agar dapat membuat tulisan yang baik," katanya.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Jember Muhibbin mengungkapkan, pelatihan ini memang bertujuan untuk mengeksplorasi pesan-pesan pesantren yang selama ini sudah dikenal sebagai salah satu institusi yang memiliki peran besar dalam melakukan perubahan kepada masyarakat. Sayang, masih sedikit media massa yang mengungkapkan tentang kiprah pesantren dalam perubahan sosial tersebut. "Penelitian terhadap media menyebutkan, dari 360 lebih edisi dalam satu tahun media

massa, misalnya, hanya sedikit yang memberitakan pesantren, kurang lebih 5 persen saja dari total beritanya umum. Sayangnya, dari berita yang muncul tersebut, ternyata berita negatif yang muncul tentang pesantren," ungkapnya.

Menurut Muhibbin, menulis memang bisa disebut persoalan yang gampang-gampang susah. Sebab, hakikatnya semuanya sudah sering kali belajar menulis dari hal-hal yang kecil. Hanya saja, untuk membuat tulisan yang baik, dibutuhkan kemauan keras dari para santri agar mereka dapat menampilkan apa yang dilihatnya dalam bentuk tulisan. "Kita ini sudah biasa menulis sebenarnya, ya minimal menulis SMS. Hanya tinggal kemauan saja yang menggerakkan kita apakah kita ingin menjadikan tulisan sebagai sarana menyampaikan ilmu yang kita miliki," katanya disambut tepuk tangan ratusan santri.

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat, Minan Jauhari juga menegaskan bahwa kemampuan menulis menjadi kebutuhan para santri, karenanya tim pengabdian yang sedang ia laksanakan bersama dengan tim lainnya diantara rangkaiannya juga difokuskan pada penguatan kemampuan menulis bagi santri.

Minan menyebutkan bahwa keberadaan Pondok Pesantren yang nota benenya Sebagai pusat penggemblengan ilmu-ilmu agama, tentunya pesantren selalu mengajarkan kebaikan sesuai dengan tuntunan agama. Tak terkecuali tentang sopan santun dan ajaran tentang larangan membicarakan aib orang lain. Karenanya, menulis pun sedikit banyak telah menjadi tradisi intelektual pesantren dalam pengembangan ilmu-ilmu agama. Menilik potensi ini, tentunya akan sangat mudah apabila jurnalisme warga berbasis santri

bisa berkembang dan menjadi sebuah kecenderungan yang tak terelakkan dilingkungan pondok pesantren.

Sebagai bahan materi dalam kegiatan ini meliputi: Mengetahui dasar-dasar jurnalistik, etika jurnalistik, Jurnalisme Warga, Teknik membuat tulisan berita, teknik membuat tulisan artikel, manajemen keredaksian dan mengenal berbagai media massa, serta teknik membuat media massa baik cetak maupun media massa berbasis internet.

Masing-masing materi disampaikan langsung oleh tim pengabdian masyarakat dan beberapa nara sumber kalangan jurnalis dari jawa pos. salah satu yang hadir adalah saudara aro. Aro memberikan pembinaan kepada santri tentang Cara Mudah Menulis Berita, menurutnya pemahaman Jurnalistik harus di pahami dengan sebenarnya yakni Aktivitas komunikasi yang meliputi penelusuran, pengolahan dan penyampaian informasi yang memiliki nilai berita dengan menggunakan media massa. Karenanya Karya Jurnalistik meliputi penulisan berita, Artikel, Editorial/tajuk rencana, dan juga Opini.

Aro juga memperjelas terkait Media Jurnalistik yang dapat digunakan, masing-masing adalah media cetak, Elektronik, dan juga Online. Karenanya pesan aro para santri jika mau menjalankan peran ini harus mau belajar Menulis Berita Itu, aro-pun memberikan analog bahwa belajar menulis berita sama halnya dengan Belajar Naik Sepeda Pancal , tegas aro.

Dipertegas dalam pelatihan ini bahwa teknik menulis bisa mengikuti model Piramida Terbaik, Setiap Peristiwa Mengandung 5W+1H. artinya a. What (apa) : Apa peristiwa yang terjadi?, b. Who (siapa) : Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu?, c. When (kapan) : Kapan peristiwa itu terjadi?, d. Where (dimana): Dimana peristiwa itu terjadi?, e. Why (mengapa): Mengapa peristiwa itu terjadi?, f. How (Bagaimana) : Bagaimana peristiwa itu terjadi . Adapun Intisari Menulis Berita meliputi Kalimat harus jernih dan komunikatif, Susunan kalimat tidak harus teratur, Sesuai nalar dan logika, Akurat, Memilih kata dengan luwes. Ingat tidak semua peristiwa memiliki News Value (Nilai Berita) pesan aro kepada santri miftahul ulum suren. Menurut aro setidaknya dianngap memiliki nilai berita apa bila kedapatan unsur Magnitude, Signifikan, Aktual, Proximity, Ketokohan, Konflik, Human interest, Unik, Menarik/seks dll. Inti Berita: Tulisan Bisa Difahami Pembaca dan Saat Menulis Berita, Posisikan Diri Sebagai Pembaca

Materi lainnya yang juga ditekankan pada kelompok dampingan adalah sebagaimana berikut : **MENULIS BERITA: BIASA SAJA, MUDAH SAJA (Oleh Kun Wazis),** Berikut materi yang tersaji selama proses pelatihan: Dalam penguatan itu, Pendamping memberi penegasan bahwa Berita adalah peristiwa yang menarik perhatian publik. Inilah inti definisi

berita yang disampaikan oleh para pakar media massa. Artinya, tidak semua peristiwa bisa menjadi berita karena tidak semua peristiwa itu menarik perhatian publik. Untuk itu, suatu peristiwa yang menarik perhatian publik membutuhkan ukuran atau nilai sehingga menjadi standar umum dalam penilaian suatu peristiwa.

Kun Wazis mendasarkan pada Alex Sobur, dalam jurnalisme, tidak semua peristiwa dianggap penting sebagai sebuah berita, terutama bila dikaitkan dengan khalayak pembacanya. Artinya, dilihat dari tingkat kebutuhan dan keingintahuan khalayak pembaca, tidak semua kejadian pantas dikategorikan sebagai berita. Dengan demikian, berita atau informasi bisa dipilah-pilah menurut nilainya. Ukuran nilai berita itu berdasarkan tingkat kebutuhan khalayak pembaca dan daya tarik keunikan maupun keistimewaannya.[97]

Kun Wazis juga mendasarkan pada Paulus Winarto bahwa setiap media bisa jadi memiliki kriteria nilai yang berbeda. Namun, menurut mantan wartawan Gamma, Tempo Interaktif, dan AJINews ini, umumnya nilai berita terdiri dari waktu (time), kedekatan (nearness), humor, aneh, pornografi (sex), pertentangan (conflict), akibat (impact), penting (important), perubahan (change), dan menyentuh perasaan (human interest). Ukuran-ukuran inilah yang mendasari para penentu kebijakan di redaksi media cetak untuk menurunkan suatu berita. Semua unsur tersebut biasanya dipertimbangkan berdasarkan kekuatan (strength) peristiwa itu terhadap "kepentingan" publik.

Menurut Kun Wazis, bahwa Paulus ini juga menyebut

---

[97] Alex Sobur, Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani, Humaniora Utama Press, Bandung, 2001, hal. 160.

nilai berita versi Parakitri Simbolon yang meringkas nilai berita dengan jembatan CHOPPT (huruf O tidak dihitung), yaitu: Consequences (besar kecilnya dampak peristiwa terhadap masyarakat), Human interest (menarik atau tidak dari segi ragam cara hidup manusia), Prominence (besar kecilnya ketokohan orang dalam peristiwa), Proximity (jauh dekat lokasi peristiwa dari orang yang mengetahuinya), dan Timeless (baru tidaknya atau penting tidaknya peristiwa itu.[98]

Totok Djuroto, mantan Wartawan Suara Indonesia dan Surabaya Post hampir memiliki pandangan yang sama. Politik redaksi di media massa tidak bisa sama, karena memiliki pandangan sendiri. Persamaan pandangan Paulus dan Totok terletak pada nilai seks sebagai unsur penilaian berita, sedangkan standar lainnya tidak jauh berbeda. Ada 12 nilai berita yang disebutkan Totok sebagai standar untuk menentukan laik tidaknya berita itu muncul di media massa. Unsur-unsur itu diantaranya, aktual atau baru (termasa), jarak, terkenal (ternama), keluarbiasaan, akibat, ketegangan, pertentangan, seks, kemajuan, human interest, emosi (perasaan), dan humor. Unsur inilah yang menarik perhatian pembaca.[99]

Asep Syamsul M Romli, Editor dan Redaktur Opini Mingguan Hikmah, menyederhanakan nilai berita "hanya" menjadi empat unsur saja. Yakni, cepat, nyata, penting, dan menarik. Cepat berarti aktual atau ketepatan waktu, dimana tulisan yang muncul adalah yang belum diketahui sebelumnya

---

[98] Paulus Winarto, How to Handle The Journalist, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2003, hal. 23-24.

[99] Totok Djuroto, Teknik Mencari dan Menulis Berita, Dahara Prize, Surabaya, 2003, hal. 13-14

oleh pembaca. Nyata (faktual) berkaitan dengan informasi yang sebenarnya atau fakta, bukan karangan (fiksi). Penting berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas. Menarik selain berita itu actual, faktual, dan menyangkut kepentingan orang banyak, juga berita yang bersifat menghibur (lucu), mengandung keganjilan atau keanehan, dan human interest.[100]

Pandangan lebih tegas lagi diungkapkan AM Hoeta Soehoet, tokoh pers nasional dan juga Rektor Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta yang menyebutkan empat faktor yang menentukan nilai berita bagi seseorang, yakni kegunaan berita, aktualitas, hubungan pembaca dengan peristiwa, dan kelengkapan berita[101].

Bagi redaksi surat kabar, makin banyak kegunaan suatu berita bagi seseorang, makin tinggi nilai beritanya. Sebaliknya, makin sedikit kegunaan suatu berita bagi seseorang, makin rendah nilai berita itu baginya. Nilai suatu berita ditentukan oleh jumlah pembaca yang kepentingannya terpenuhi oleh berita tersebut. Ada empat hal yang dapat dikemukakan, pertama, makin banyak kegunaan suatu berita bagi sebagian besar pembaca surat kabar, maka semakin tinggi pula nilai beritanya bagi redaksi suratkabar tersebut. Kedua, makin banyak kegunaan suatu berita bagi sebagian kecil pembaca suratkabar, nilainya sedang bagi redaksi surat kabar tersebut. Ketiga, makin sedikit kegunaan suatu berita bagi sebagian besar pembaca suratkabar, nilai beritanya sedang bagi redaksi

---

[100] Asep Syamsul M Romli, Jurnalistik Praktis, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal. 3-4.

[101] AM Hoeta Soehoet, Dasar-dasar Jurnalistik, Yayasan Kampus Tercinta-IISIP Jakarta, 2003, hal. 44.

suratkabar tersebut. Keempat, makin sedikit kegunaan suatu berita bagi sebagian kecil pembaca suratkabar, makin rendah nilai beritanya bagi surat kabar tersebut.

Menurut AM Hoeta Soehoet, aktualitas suatu berita ditentukan oleh jarak waktu antara terjadinya peristiwa dengan waktu penyiarannya, dan sudah atau belum disiarkannya berita tersebut oleh media massa lain. Hubungan pembaca dengan peristiwa terkait dengan hubungan pembaca dengan tempat peristiwa, hubungan pembaca dengan unsur-unsur yang terlibat dalam peristiwa, dan hubungan profesi/tugas pembaca dengan peristiwa. Sedangkan kelengkapan berita ditentukan oleh terpenuhinya rumusan 5 W+1 H dalam berita tersebut[102].

---

[102] Berikut adalah Contoh Berita yang bersumber dari Jawa Pos Edisi: Senin, 01 Agustus 2011 , 15:05:00. **Jawa Pos Raih Gelar Koran Terbaik Dunia ke-102**

PARIS - Harian Jawa Pos, induk JPNN, berhasil meraih gelar tertinggi World Young Reader Prize 2011, menjadi koran terbaik dunia dalam inovasi untuk meraih dan mengembangkan pembaca muda. Penghargaan itu dipastikan oleh asosiasi penerbit sedunia, WAN-IFRA, Jumat akhir pekan lalu (29/7).

Dalam ajang tahunan yang diikuti koran dari seluruh dunia tersebut, Jawa Pos meraih kemenangan pada kategori Enduring Excellence. Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang ditunjuk WAN-IFRA, berdasar komitmen dan konsistensi untuk meraih dan mempertahankan pembaca muda. Tidak cukup sampai di situ. Dewan juri kemudian menyatakan Jawa Pos layak meraih gelar tertinggi: World Young Reader Newspaper of the Year 2011.

Lewat surat resmi yang disampaikan WAN-IFRA, tim juri menyatakan Jawa Pos unggul mutlak. Bahkan, departemen dan halaman anak muda DetEksi yang terbit setiap hari di Jawa Pos dianggap tak punya tandingan. "Terus terang, tim juri membuat keputusan dengan sangat mudah,"kata Dr Aralynn McMane, executive director, Young Readership Development, World

Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA), yang berpusat di Paris, Prancis, dan Darmstadt, Jerman.

Tim juri pun memberikan penjelasan detail mengapa Jawa Pos layak meraih penghargaan tertinggi ini, seputar sukses halaman DetEksi yang terbit sejak 2000. "Jawa Pos telah menunjukkan kerja luar biasa. Memiliki program yang substansial, yang dijalani bertahun-tahun, dan punya komitmen sukses dalam mengganden͏g anak muda, baik lewat halaman koran maupun kegiatan off-print," begitu tulis pesan dari tim juri.

Lebih lanjut, juri menilai lembaran DetEksi "yang terbit setiap hari di Jawa Pos" sebagai sesuatu yang "lebih" dari sekadar halaman anak muda biasa. "DetEksi merupakan sebuah strategi komplet untuk menemukan, mengganden͏g, dan mempertahankan pembaca muda. Dan, yang paling penting, DetEksi membuahkan hasil," tegas tim juri.

Dr Aralynn McMane menyampaikan, pengumuman resmi penghargaan itu secara global baru disampaikan sekitar dua pekan lagi. Namun, Jawa Pos sudah mendapat hak untuk mengumumkannya sendiri. Penyerahan pengharga-an sendiri baru dilaksanakan pada 12 Oktober mendatang di Wina, Austria. Yaitu, saat dilangsungkannya 63rd World Newspaper Congress (kongres koran sedunia) dan 18th World Editors Forum (forum editor sedunia).

Dalam ajang itu Jawa Pos diminta mempresentasikan perkembangan DetEksi dalam 11 tahun terakhir. Menurut Azrul Ananda, direktur harian Jawa Pos, pihaknya diberi tahu layak masuk unggulan World Young Reader Prize 2011 setelah Konferensi WAN-IFRA Asia Pasifik di Bangkok, April lalu. Dalam beberapa pekan belakangan ini Jawa Pos telah diminta mengirimkan materi informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan juri tentang program DetEksi.

Setiap tahun World Young Reader Prize diberikan kepada koran-koran yang dianggap inovatif dalam mengganden͏g dan mengembangkan pembaca muda. "Kami sangat bangga dengan penghargaan tingkat dunia ini. Apalagi, ini atas sebuah pencapaian yang prosesnya harus dijalani dengan sangat panjang, dengan konsep yang harus disiapkan secara matang. Bukan pencapaian instan atau sebuah momen keberuntungan," kata Azrul.

"Beberapa tahun lalu kami pernah disarankan ikut, namun waktu itu kami belum mau ikut. Sekarang kami sudah punya hasil

Menulis Berita: Menulis Apa Adanya

Dalam dampingan ini, santri juga ditekankan oleh

---

konkret dari pentingnya konsistensi menggandeng pembaca muda. Kali pertama ikut langsung menang tingkat dunia," tambah Azrul.

Berkat DetEksi, jelas Azrul, belakangan Jawa Pos memang meraih hasil-hasil yang dia anggap mengagumkan. Ketika koran-koran dianggap menghadapi masa sulit, Jawa Pos mampu menjaga konsistensi dan eksistensi. "Survei Nielsen dalam beberapa tahun terakhir selalu menunjukkan bahwa Jawa Pos memiliki readership terbanyak di Indonesia, mengalahkan semua koran yang ada, termasuk yang terbit dari Jakarta. Bukan hanya itu. Survei juga menunjukkan bahwa 51 persen pembaca Jawa Pos berusia lebih muda dari 30 tahun. Kalau ditarik mundur, semua itu bisa dibilang adalah hasil "pengaderan pembaca DetEksi" yang dimulai sejak 2000," tutur Azrul.

"Kami berhasil membuktikan bahwa koran tidak akan punya masalah di masa mendatang. Tinggal bagaimana koran itu beradaptasi dan terus menarik minat pembaca di era yang terus berubah," tandasnya.

Memang hasil itulah yang disebut memukau tim juri. Jumlah pembaca muda Jawa Pos jauh lebih besar daripada koran-koran lain di Indonesia. Tim juri juga mengatakan, apa yang dilakukan Jawa Pos lewat DetEksi bisa dijadikan contoh bagi koran-koran lain di seluruh dunia. Baik itu cara mengelola halaman yang melibatkan personel muda, cara menyampaikan rubrik, maupun program-program off-print seperti kompetisi basket pelajar DBL (dulu DetEksi Basketball League, sekarang Development Basketball League).

Apa yang dilakukan Jawa Pos dengan DetEksi ini disebut bisa menjadi inspirasi bagi koran-koran lain di seluruh dunia. "Content dan program-program DetEksi sangatlah mengagumkan dan dengan mudah bisa direplikasi oleh koran-koran lain," tulis tim juri.

Dengan hasil ini, Azrul mengaku segenap personel Jawa Pos menjadi semakin terpacu untuk terus berinovasi di bidang jurnalistik agar menghasilkan produk yang lebih baik lagi. "Saya yakin seluruh media di bawah bendera Jawa Pos Group, yang jumlahnya hampir 200 koran dan televisi-televisi lokal dari Aceh sampai Papua, juga termotivasi untuk terus berinovasi," ujar Azrul. (nur/c2/iro)

pendamping untuk selalu berlatih, *Latihan, latihan, latihan*. Itulah syarat agar kita bisa mahir menulis berita. Semakin sering berlatih menulis, maka tulisan kita akan semakin "bertenaga" dan dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang kita tulis. Agar kita mudah menulis, maka perlu diketahui pula nilai-nilai berita (newsvalue) untuk mengetahui mana peristiwa yang menarik dan peristiwa yang biasa-biasa saja. Menurut Murtadlo, mantan Redaktur Jawa Pos, ada 10 unsur yang membuat suatu peristiwa layak disebut berita. Kesepuluh unsur nilai (newsvalue) tersebut adalah baru, unik, kedekatan, getaran, dramatik, tokoh, aktual, eksklusif, kontroversi, mision. Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, kesepuluh unsur tersebut juga digunakan untuk mengukur apakah sebuah peristiwa layak diberitakan atau tidak. Newsvalue tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, unsur baru. Sesuatu yang baru pasti akan disukai oleh banyak orang. Sebagai makhluk yang diberikan kekuatan akal "ingin tahu", maka sesuatu yang baru kecenderungannya akan dilihat oleh orang. Misalnya, trend model seragam baru di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren Ledokombo yang mulai diperkenalkan di lingkungan santri. Masuknya, jenis-jenis produk komunikasi selular, seperti android dengan berbagai fasilitas baru menarik untuk ditulis. Kurikulum baru di pesantren maupun di lembaga pendidikan juga menarik untuk diberitakan. Termasuk, trend baru jual beli produk muslim lewat media online, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah yang baru di pondok pesantren Anda?

Kedua, unsur unik. Sesuatu yang "aneh" atau berbeda dengan kebanyakan orang biasanya menggugah rasa ingin tahu masyarakat. Sesuatu yang unik biasanya menggugah perasaan

public, sehingga tergerak rasa ingin tahunya untuk membaca atau melihat tayangan media massa. Jember Fashion Carnaval (JFC) menghadirkan satu keunikan yang berbeda dengan budaya masyarakat Jember yang religius. Identitas budaya yang dipergelarkan "bersinggungan" dengan banyak orang bisa menjadi perhatian masyarakat. Bisa juga sesuatu yang unik di pesantren, misalnya bola api yang seringkali membuat pertandingan saat hari besar Islam. Pertanyaannya, apakah ponpes Miftahul Ulum punya sesuatu yang unik?

Ketiga, unsur proximity (kedekatan). Kedekatan sebuah media terhadap fenomena sosial yang terjadi akan menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat kini cenderung melihat peristiwa yang terdekat. Misalnya, media memberitakan seseorang yang menderita penyakit (tumor, misalnya) akan mendekatkan media tersebut dengan massa, sehingga tergerak untuk membantu. Demikian juga, peristiwa tentang prestasi santri di Lingkungan Ponpes Miftahul Ulum, jika ditulis, akan mendekatkan Miftahul Ulum dengan warga sekitar kecamatan Ledokombo dan sekitarnya.

Keempat, unsur magnitude (getaran). Getaran menyangkut sebuah peristiwa yang terjadi yang gelombang peristiwanya. Misalnya, bencana alam banjir, tsunami, gempa bumi yang menyebabkan hilangnya ribuan nyawa, perang di Timur Tengah yang menyebabkan anak-anak putus sekolah. Kisah anak balita yang sudah hafal Al Quran juga dapat menggetarkan orang yang melihat atau membacanya, kegiatan (peristiwa) jamaah haji di tanah suci yang melibatkan massa umat Islam di seluruh dunia selalu menarik perhatian orang di belahan dunia. Pertanyaannya, apakah pernah diadakan suatu kegiatan besar di Ponpes Miftahul Ulum yang melibatkan

banyak orang?

Kelima, unsur dramatik. Peristiwa yang mengandung mampu membangkitkan emosi akan menarik untuk diketahui. Peristiwa tentang perjuangan anak petani miskin yang berprestasi dan mendapatkan banyak hambatan dalam meraih prestasi tersebut bisa menarik. Perjuangan santri Miftahul Ulum (misalnya) meraih prestasi di tingkat nasional dengan mengalahkan pesaingnya dari berbagai daerah di Indonesia menarik untuk disajikan dalam sebuah reportase majalah, buletin, maupun media online.

Keenam, unsur tokoh. Ketokohan dalam peristiwa kehidupan selalu ingin dilihat dan diketahui oleh khalayak. Kyai, menteri, Kapolri, pejabat tinggi, ustad, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pendidikan, pakar hukum, ahli tata lingkungan, guru besar, petani teladan, murid teladan, adalah representasi tokoh yang mewakili kemampuan di bidang keilmuannya. Pemikiran dan tindakan para tokoh selalu menarik perhatian publik karena tokoh dipandang mewakili "suara" masyarakat. Untuk itu, mereka dapat dijadikan "teladan" dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaannya, siapa tokoh yang dikagumi oleh santri Miftahul Ulum? Ini bisa menarik ditulis.

Ketujuh, unsur aktualitas. Sesuatu yang menjadi bahan perbincangan masyarakat luas adalah peristiwa yang hangat dan selalu ingin diketahui oleh orang lain. Sesuatu yang hangat belum tentu kejadiannya baru, tetapi bisa saja peristiwa lama tetapi selalu diperbincangkan. Mislanya, kisah perjuangan pahlawan bangsa Indonesia yang mengusir penjajah selalu menarik ditulis disaat peringatan 10 Nopember. Napak tilsa jihad para pejuang Islam melawan penjajah Barat bisa menjadi

inspirasi khalayak. Demikian juga, peristwia korupsi yang masih dibicarakan bisa ditulis sebagai "ibrah" bagi pembacanya agar tidak melakukan tindakan serupa. Pertanyaannya, peristiwa apa yang aktual di mata para santri Miftahul Ulum?

Kedelapan, unsur eksklusif. Sebuah berita yang berbeda dengan media lainnya bisa dikatakan eksklusif dan pasti menarik. Kejadian yang berhasil diliput oleh satu media dan media lainnya tidak punya hasil reportasenya, menjadikan peristiwa itu eksklusif. Seorang juranlis harus berusaha menghadirkan berita yang berbeda dengan media lainnya. Misalnya, berita Metro TV mengenai tayangan video amatir tentang bencana Tsunami yang menggambarkan secara detail air bah menghempas apa saja yang dilalui di bumi Aceh adalah contoh yang eksklusif. Pertanyaannya, apakah santri-santri mempunyai peristiwa eksklusif yang menarik untuk ditulis dan media lain belum mengetahuinya?

Kesembilan, unsur kontroversi. Kontroversi bisa dimakna sebagai cara pandang dan sikap yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, pembahasan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang disikapi berbeda-beda oleh masyarakat Indoensia menarik untuk ditulis. Apa alasan yang menolak RUU tersebut dan apa pula yang membuat sebagian masyarakt menerima? Sikap kontroversi ini akan mengundang perhatian publik untuk ikut menyikapinya. Contoh lainnya, adalah kenaikan harga BBM, di satu sisi pemerintah menaikkan, namun pada sisi lainnya sebagian masyarakat menolak kenaikan tersebut, maka layak untuk ditulis. Pertanyaannya, apakah ada sesuatu yang kontroversi dirasakan para peserta pelatihan jurnalistik?.

Kesepuluh, unsur mission. Misi adalah orientasi yang akan

dituju oleh media tersebut. Bisa dimakna bahwa setiap media memiliki tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan media tersebut. Ada media yang misinya mengabarkan berita tentang pertanian, berita hobi, berita pendidikan, berita pesantren, berita kampus, dan sejenisnya. Mision ini tidak boleh dilepaskan dari tujuan media yang memiliki fungsi informasi, kontrol sosial, pendidikan, hiburan, dan fungsi ekonomi. Misi sesuai dengan fungsi harus dijalankan. Pertanyaannya, mision seperti apa yang akan diraih dari media peserta pelatihan jurnalitik tersebut.

Memulai Menulis Berita: Pakai Senjata 5 W + 1 H

Dalam penguatan ini pendamping juga memberi penguasaan pada santri tentang bagaimana memulai menulis berita, dalam hal ini pendamping mengenalkan teknik penulisan dengan menggunakan dasar 5 W+ 1 H, dipertegaskan bahwa Jika ada peristiwa itu masuk dalam 10 unsur itu, maka seorang reporter layak untuk memburunya. Tentu saja, segala jenis berita tersebut perlu diketahui secara lebih lengkap lagi apa (what) peristiwa yang kita buru, siapa (who) narasumber yang dikejar, dimana (where) tempat/ kejadian potensial yang bisa ditemukan, kapan (when) kejadian peristiwa itu, mengapa (why) fakta seperti itu bisa terjadi, dan bagaimana (how) kira-kira kejadiannya dari awal sampai akhir. Pertanyaan ini perlu dijawab oleh seorang jurnalis saat merencanakan sebuah reportase. Seorang wartawan harus memiliki fokus berita apa yang akan diburu. Dengan demikian, akan dapat diketahui ragam peristiwa apa saja yang bernilai menarik untuk diberitakan. Dan, yang juga penting diperhatikan adalah peralatan untuk reportase, seperti kamera,

tape recorder atau segala jenis alat perekam, dan alat tulis.

Langkah penting dalam dunia jurnalistik adalah menurli menulis berita (writing news). Langkah menulis ini bisa dikatakan pekerjaan yang gampang-gampang susah. Gampang bagi yang seringkali berlatih dan menjadi terbiasa, dan susah bagi mereka yang tidak mau dan meluangkan waktu untuk mencoba berlatih menulis. Jadi, syarat menulis adalah juga berani berlatih untuk mencoba menulis. Mulailah menulis dari yang termudah, jangan memulai dari yang sulit. Dan, yang terpenting, modal menulis adalah "bank data" yang kita miliki dari hasil memburu peristiwa itulah yang bisa ditulis. Menulis berita, bukan menulis artikel. Menulis berita adalah menulis peristiwa yang berhasil kita gali di lapangan.

Teknik penulisannya berita sebenarnya cukup sederhana. Setelah kita mengetahui syarat umum nilai berita (newsvalue) dan menggali peristiwa di lapangan, maka untuk mengeksplorasi tulisan cukup dengan memakai rumus umum 5W+1H. Apa yang terjadi (what); kapan peristiwa itu terjadi (when); dimana (where) lokasi kejadian itu; siapa saja (who) yang terlibat dalam kejadian ini; kenapa peristiwa itu terjadi (why); dan bagaimana peristiwa itu terjadi (how). Dalam seni menulis (the art writing) merupakan hal yang penting untuk menjadikan berita lebih menarik dan (enak) dibaca/ didengar orang. "Kita dapat memilah dan memilih mana yang akan dikedepankan dalam berita itu. Apakah apa-nya, siapa-nya, atau lainnya," demikian diungkapkan Asep Syamsul M. Romli dalam bukunya Jurnalistik Praktis.

Menurut dia, ada jenis berita yang dikenal dalam dunia jurnalistik, antara lain: 1) Straight news, yakni berita langsung, apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. Sebagian besar

halaman berita halaman depan surat kabar berita berita jenis ini; 2) Dept news, yakni berita mendalam, dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada dibawah suatu permukaan; 3) Investigation news, yakni berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber; 4) Interpretatif news, yakni berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian penulisnya/ reporter; 5) Opinion news, yakni berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, tokoh, ahli atau pejabat, mengenai suatu hal peristiwa, kondisi poleksosbudhankam, dan sebagainya.

Menurut Paulus Winarto dalam bukunya How To Handle The Journalist, secara umum, ada beberapa tahapan yang ditempuh wartawan hingga sebuah peristiwa menjadi berita, yaitu: 1) Menemukan peristiwa dan jalan cerita; 2) Cek, ricek, triple cek jalan cerita (konfirmasi); 3) Memastikan sudut pandang (angle); 4) Menemukan lead (bagian awal suatu berita/pembuka); dan Menulis berita.

Biasanya, dalam susunan penulisan berita, mengacu kepada struktur piramida terbalik (inverted pyramid), yakni memulai penulisan berita dengan mengemukakan bagian berita yang dianggap paling penting, kemudian diikuti bagian-bagian yang dianggap agak penting, kurang penting, dan seterusnya.

Berikut ini contoh headline news di Kompas (Jumat, 17 Februari 2012) berjudul: SBY Marah Soal Rotasi Angelina Sondah. Leadnya: Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kecewa dan marah ketika mengetahui Angelina Sondakh sempat dipindahkan ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi hukum. Pemindahan ini dinilai sebagai langkah yang tidak cerdas dan

harus segera dibatalkan.

Sikap SBY itu disampaikan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Andi Mallarangeng di sela-sela Pertemuan Umum ke-11 Asosiasi Hukum ASEAN yang juga dibuka oleh SBY sebagai Presiden, Kamis (16/2) di Nusa Dua, Bali. "Persoalannya, Angie (Angelina) yang bermasalah hukum tidak sepatutnya ditempatkan di komisi yang membidangi hukum," kata Andi

Bagian paling penting dalam sebuah berita dituangkan dalam lead atau teras berita. Yakni, bagian berita yang terletak di alinea atau paragraf pertama. Teras berita merupakan bagian dari komposisi atau susunan berita, yakni setelah judul berita (head) dan sebelum badan berita (news body). Lead umumnya disusun dalam aneka bentuk:

Pertama, Summary lead atau conclusion lead (teras berita yang menyimpulkan dan dipadatkan). Contohnya: Kamis (16/2), brankas Bank CIMB Bank Niaga Cimanggis, Depok, Jawa Barat, nyaris dibobol. Namun, upaya perampokan itu gagal dilakukan meski para perampok sudah di depan brankas lantaran alarm bank keburu berbunyi. (Sumber: Harian Kompas, Edisi Jumat, 17 Februari 2012, hal. 25).

Kedua, Statemen lead (teras berita berupa pernyataan). Contoh: Kekosoangan payung hukum penarikan retribusi memaksa DPRD Surabaya bekerja ekstrakeras. Kalau biasanya hanya duduk dan mengkritisi kinerja pemerintah tanpa solusi cespleng, mereka kini mendapatkan pekerjaan menuntaskan perda retribusi secepat mungkin. Mampukah mereka? (Sumber: Harian Jawa Pos Metropolis, Edisi Senin, 30 Januari 2012, hal. 25).

Ketiga, Quotation lead (teras berita kutipan). Contoh: "Selama ini, uang menjadi faktor signifikan yang memengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya," demikian dikatakan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow, di Jakarta, Selasa (7/2) menanggapi rencana pembatasan dana untuk kampanye yang sedang dibahas di DPR. (Sumber: Kompas, Edisi Rabu, 9 Februari 2012)

Keempat, Contrast lead (teras berita kontras). Contoh: Tes kejiwaan terhadap tersangka Mujianto (24), Kamis (16/2(, di Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk, Jawa Timur, menunjukkan yang bersangkutan waras. Tindakannya membunuh 4 orang dari 15 korbannya dilakukan tanpa gangguan kejiwaan yang berarti. (Sumber: Harian Kompas, Edisi Jumat, 17 Februari 2012, hal. 15).

Kelima, Exclamation lead (teras berita yang menjerit). "Tidak....!" demikian teriak histeris terdakwa AP, mendengar putusan hakim yang menvonisnya dengan hukuman mati. (Sumber: Asep Syamsul Arifin, Jurnalistik Praktis, 2001, hal. 10)

Selain itu, teras berita juga bisa didasarkan pada penonjolan salah satu unsur dari rumusan 5W+1H, misalnya

teras berita What, Who, Where, When, Why, dan How. Selanjutnya, setelah teras berita ditentukan, maka reporter akan melanjutkan dengan berita untuk mendukung isi teras tersebut, dari yang penting, agak penting, hingga yang kurang penting, tapi dibutuhkan untuk melengkapi berita tersebut. Mari Kita Praktikkan!

1. Penguatan Tahap Lanjutan

Pada tahap ini, tim dampingan melakukan dampingim pada santri/masing-masing kelompok dampingan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan jurnalisme, sebagai wujud keberhasilan pendamping melakukan dampingan hingga kelompok dampingan dapat menerbitkan majalah pesantren yang lebih professional, Tujuan tahap ini, minimal kelompok dampingan memiliki majalah/bulletin Busur 23 sebagai media untuk menjalankan kegiatan jurnalisme warga.

Pendampingan Jurnalisme Warga Berlanjut

Program Pengabdian Masyarakat tentang Penguatan Dakwah melalui Jurnalisme Warga (Citizen Journalism) berbasis Santri pada Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Ulum Suren memasuki tahap lanjut. Setelah pelaksanaan tahap pertama di Ponpes pada hari Rabu, 18 November 2015 lalu, dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang

tergabung dalam tim pengabdian masyarakat berbasis Ilmu Dakwah (PMD) memusatkan dampingannya kepada santri pondok pesantren Miftahul Ulum Suren Jember untuk memperdalam kemampuan jurnalistik di Ma'had Syaifudin Zuhri IAIN Jember, Selasa, 29 Desember 2015. Selama sehari tersebut, Tim PMD memusatkan pada proses editing, layout, dan tahap produksi majalah Ponpes Miftahul Ulum Suren. Untuk itu, tim majalah Ponpes Miftahul Ulum dipilih secara selektif dari pengurus OSIS dan Guru MA Miftahul Ulum sebagai pengelola majalah tersebut.

Pendampingan tahap dua ini terfokus pada editing naskah yang sudah dibuat oleh Tim Majalah, baik berita maupun opini. Terdapat 25 tulisan yang dihasilkan dalam pelatihan tahap pertama. Tulisan yang terdiri dari berita, reportase, wawancara, artikel, puisi, dan kiat-kiat tersebut kemudian dilakukan editing oleh Tim PMD sebagai proses pendampingan dalam rangka menajamkan isi dari majalah yang akan diterbitkan. Editing dilakukan secara bertahap, dengan membagi antara berita dan opini tentang pesantren. Dalam pelatihan tahap kedua tersebut, terjadi dialog interaktif antara tim PMD dengan pengelola majalah BUSUR yang edisi sebelumnya sudah diterbitkan dan menjadi bahasa evaluasi untuk meningkatkan kualitas produksi majalah tersebut.

Editing terhadap berita difokuskan pada pemilihan judul berita, pemilihan angle, pembuatan lead, batang tubuh, dan penutup berita. Kelengkapan berita berupa 5 W + 1 H juga dijadikan bahan evaluasi untuk mendeteksi apakah penulisan para peserta sudah memenuhi dasar pelaporan jurnalistik atau tidak. Aspek lain, seperti newsvalue (nilai berita) juga dijadikan evaluasi dalam rangka memberikan penilaian sebuah peristiwa

tersebut layak atau tidak menjadi sebuah berita. Organisasi kalimat juga tidak luput dari bahan evaluasi terhadap tulisan untuk memperkuat pemahaman dalam hubungan antar kalimat dan keterhubungan antarparagraf dalam berita tersebut.

Catatan dari tim PMD adalah menindaklanjuti suatu produk jurnalistik yang masih kurang memenuhi kelengkapan. Sebagai contoh untuk aplikasi 5 W + 1 H adalah ketika berbicara Who (siapa), maka yang harus digambarkan siapa itu harus jelas; mulai dari latar belakang pendidikan, jabatan narasumber tersebut, dan kiprahnya yang pernah digeluti selama ini di dunia pendidikan. Apabila tidak memenuhi kelengkapan, maka Tim PMD meminta reporter yang bersangkutan untuk segera melengkapinya agar memenuhi standar jurnalistik. Catatan-catatan tersebut semuanya diberikan kepada para reporter agar dapat dipelajari letak kekuatan dan kelemahan tulisan yang dibuat oleh para Mahassantri Miftahul Ulum Suren Ledokombo.

Teknis pendampingan editing adalah membaca terlebih dahulu secara total naskah setiap peserta tersebut secara detail. Apalagi ada isi judul yang tidak sesuai dengan isinya, maka tim TMD melakukan editing terhadap judul untuk disesuaikan. Dalam faktanya, memang sebagian peserta ada yang menampilkan judul tidak sama dengan substansi isi dari berita yang dimaksudkan. Bahkan, untuk kepentingan mendapatkan lead (kepala berita), tim TMD membongkar tulisan tersebut yang awalnya lead ditemukan di awal paragraf, ternyata yang menarik leadnya ada di paragraf akhir, maka "jungkir balik" harus dilakukan. Tim TMD juga melakukan evaluasi terhadap penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sebagai standar

dalam menggunakan bahasa jurnalistik.

Evaluasi kedua setelah editing adalah layout (perwajahan halaman). Untuk memudahkan evaluasi, sebagai pembanding halaman majalah tersebut adalah Majalah Sidogiri dan Newsletter IAIN Jember. Majalah karena dibaca lebih lama, maka harus menampilkan halaman yang "bombastis" tetapi tetap tidak meninggalkan identitasnya sebagai media pesantren. Dengan mengkritisi perwajahan halaman, maka peserta mendapatkan beberapa teknik editing di media massa.

Acara dibuka oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Jember Muhibbin, M.Si. Dalam evaluasinya, Muhibbin menegaskan, bahwa majalah Ponpes Miftahul Ulum tersebut harus menunjukkan ciri khasnya sebagai media pesantren. Kekhasan ini diperlukan agar memiliki kekuatan di pasar pembacanya. Sebab, media pesantren tidak hanya bersaing dengan media cetak yang saat ini membanjiri pasaran, tetapi juga bersaing

dengan media Online yang saat ini juga menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat. “Untuk itu, harus ada yang khas dari redaksi yang dipilih oleh majalah kita Miftahul Ulum ini. Kedepan juga dipikirkan bagaimana media tersebut juga dikelola secara Online agar aksesnya dapat dijangkau oleh khayalak secara luas dan tanpa batas,” katanya. Kekhasan ini, kata Muhibbin, akan dapat memetakan pasar yang sekarang ini sedang dibidik. Karena jelas bernuansa pesantren, maka apa yang khas dari pesantren Miftahul Ulum Suren Ledokombo ini secara bertahap harus ditampilkan dengan narasi yang menarik. Tim Redaksi Majalah harus memiliki kebijakan redaksional agar dapat melahirkan identitas Majalah Miftahul Ulum yang berbeda dengan yang lain. Dengan membandingkan majalah yang sudah ada, akan dapat ditemukan warna yang beda dengan identitas kepesentrenan. “Sebagai contoh, Majalah Sidogiri yang sudah beredar luas di masyarakat umum dapat menjadi inspirasi untuk melahirkan wajah majalah yang khas pesantren,” katanya. Dalam evaluasi mengenai tulisan, Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom mengungkapkan bahwa tulisan-tulisan yang dibuat oleh mahasantri Miftahul Ulum tersebut sebenarnya sudah cukup bagus. Hal ini bisa dilihat dari reportase yang dibuat menunjukkan identitas santri. Hanya saja, faktor kelemahan yang muncul selama proses pembelajaran ini adalah, masih belum banyak angle berita yang ditampilkan, deskripsi sumber berita tidak lengkap, penggunaan EYD yang masih ada kesalahan, serta pemilihan judul yang belum sepenuhnya mewakili isi dari reportase tersebut. Untuk itu, disarankan agar para pengelola Majalah terus mengasah kemampuan menulis mereka dengan memperbanyak latihan. “Kata kuncinya

memang berlatih terus agar tulisan kita menjadi menarik dan bertenaga," ujar dosen yang antan wartawan ini.

Tulisan yang telah dihasilkan tim redaksi dievaluasi mulai dari berita. Berita-berita yang layak menjadi Laporan Utama dikuantifikasikan terlebih dahulu, kemudian baru laporan khusus, dan rubrik lainnya yang dibutuhkan, seperti artikel, kiat, seputar pesantren, dan puisi santri. Pemetaan ini penting disampaikan karena biasanya sebagai pengelola majalah akan mengalami kebingungan dalam menentukan tema apa yang akan diusung oleh majalah yang akan diterbitkan. Dalam sesi dialog ini, pembina majalah sekaligus guru MA Miftahul Ulum Eko Dian Adi Purwanto, M.Pd mengungkapkan bahwa salah satu kebingungan yang dihadapi adalah menentukan tema terlebih dahulu atau mengumpulkan naskah sebanyak-banyaknya. "Kadang-kadang kita mengalami kebingungan, apakah naskah yang penting masuk dulu atau tema yang ditentukan," katanya.

Kun Wazis mengungkapkan tema penting untuk ditetapkan terlebih dahulu agar tidak kesulitan dalam menentukan reportase dan jumlah berita yang akan dibuat. Tema utama juga digunakan untuk mengatur isu yang menarik sebagai tampilan utama majalah. Tema penting ditetapkan juga agar masing-masing tim redaksi memiliki cara memetakan fokus yang akan dilakukan kajian. Selanjutnya, masing-masing reporter dibagi sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan memetakan nara sumber yang akan dipilih. "Kebanyakan dari tulisan masih menggunakan narasumber yang sama, hal ini perlu dihindari dengan cara memilih narasumber yang memiliki kompetensi untuk menjelaskan tema yang diangkat," katanya.

Evaluasi berikutnya terkait dengan perwajahan majalah yang disampaikan oleh Khoiruddin, S.Sos.I, tenaga ahli layout IAIN Jember Press yang memiliki pengalaman dalam menangani majalah Newsletter dan sejumlah buku terbitan kampus IAIN Jember. Menurutnya, perwajahan majalah atau media massa menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya tarik pembaca maupun penikmat media. Untuk itu, ada program khusus yang harus dikuasai agar dapat membuat perwajahan majalah dengan baik, yakni program Adobe dan CorelDraw. Dengan penguasaan program tersebut, maka tampilan majalah akan lebih menarik. Sebab, dua program ini yang selama ini dipakai oleh para profesional layout dalam mendesain media. "Dibutuhkan komposisi yang seimbang dalam tampilan layout, mulai dari besar kecilnya huruf, jenis huruf yang dipilih, tata letak antara berita yang satu dengan berita lainya, grafis, sampai pada tingkat pemetaan foto dan cara menempatkan foto yang menarik untuk ditampilkan," katanya.

Khairuddin memberikan apresiasi kepada tim layout Majalah BUSUR yang sudah berhasil menerbitkan majalah perdana tersebut dengan bermodal program World saja. Tentu, semangat berkarya tersebut menjadi tantangan bagi Tim PM-D untuk terus memberikan dampingan sampai tim layout dari Ponpes Miftahul Ulum Suren Ledokombo dapat menguasai program Adobe dan CorelDraw. Semangat berkarya ini menjadi modal untuk untuk terus menemukan layout dan grafis yang menarik untuk tampilan. Bisa saja, untuk mendapatkan tampilan yang bagus, tim layout melakukan perbandingan dengan majalah lain yang sebelumnya sudah banyak terbit. "Dengan membandingkan, maka dapat diambil

yang khas sebagai wajah majalah," katanya.

Setelah melakukan evaluasi dan sekaligus editing terhadap naskah yang sudah diterima tim PM-D, acara ditutup oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Jember H Nur Solikin, S.Ag., M.H. Secara khusus, pihaknya memberikan apresiasi yang baik terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh tim dosen IAIN Jember tersebut dalam program yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) RI karena memberikan pendampingan secara langsung kepada tim pengelola Majalah BUSUR milik Ponpes Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember tersebut. Sebab, melalui program pengabdian kepada masyarakat itu pula, insan akademis IAIN Jember dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan dakwah melalui jurnalisme warga (santri) tersebut. "Program yang bersifat pengabdian ini merupakan bukti bahwa kita memberikan rasa pengabdian kita kepada masyarakat secara nyata," tegasnya.

Kepada peserta tim redaksi Majalah BUSUR Miftahul Ulum Wakil Rektor I IAIN Jember tersebut menegaskan pentingnya dakwah melalui jurnalisme ketika dakwah konvensional tidak lagi memadai. Diperlukan terbososan melalui media alternatif di tengah-tengah globalisasi informasi yang serba cepat seperti era digital abad ini. Ponpes mestinya dapat mengambil peran dalam mengisi ruang jurnalisme warga sebagai salah satu cara menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat. "Sebab, saat ini, media massa dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada publik. Untuk itu, menjadi penting, dakwah melalui jurnalistik tersebut," katanya.

Melalui jurnalisme warga tersebut, lanjut H. Nur Solikin,

transformasi ilmu dan dakwah dapat berlangsung secara cepat dan luas. Kekuatan jurnalisme warga sebagai media penyampaian pesan dakwah memiliki hubungan yang erat dengan kiprah pesantren dalam mengajarkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Pesan dakwah inilah yang dapat memenuhi pemahaman umat, bukan dakwah yang radikal. Kekuatan para kyai di pesantren dalam melakukan pembinaan dan perubahan terhadap masyarakat akan menjadi pilar kekuatan bangkitanya jurnalisme pesantren. "Artinya, orang pesantren harus pandai menulis, jangan hanya membaca. Jika membaca itu kecenderungannya adalah memahami karya orang lain. Tetapi, dengan berkarya, dirinya berada dalam posisi membaca sekaligus mentransformasikan nilai-nilai dakwah di tengah-tengah masyarakat," tegasnya. .

Menurut H Nur Solikin, ada dua hal yang harus digunakan dalam melihat majalah, yakni tampilan dan isi majalah. Tampilan terkait dengan desain atau layout yang menarik dan isi adalah kekuatan yang ditawarkan kepada khalayak terhadap kualitas. Ibarat dalam sebuah iklan "kesan pertama begitu menggoda" maka tampilan fungsinya dalam memberikan kesan kuat kepada para khalayak bahwa media tersebut memiliki daya tarik (magnitude) yang tinggi. "Membuat kesan itu penting agar seseorang dapat melihat identitas kita. Image atau rangsangan yang baik itu dimulai dari performa," katanya.

H. Nur Solikin mencontohkan majalah Sidogiri yang dikelola secara profesional sebagai identitas majalah pesantren. Mulai dari tenaga layaout, wartawan, hingga tenaga cetaknya sudah sangat memadai. Para wartawannnya memiliki pengetahuan agama yang mumpuni, didukung dengan

pengetahuan umum, perekrutan tenaga yang profesional, pembinaan pengelolalaan yang berkelanjutan. Tentu saja, proses untuk menjadi majalah seperti sekarang ini tidak seperti membalik telapak tangan. Sebab, dibutuhkan komitmen dan keikhlasan yang tinggi dalam memulai membuat majalah atau media massa. "Majalah Sidogiri ini bisa menjadi miniatur bahwa kedepan kita bisa mencontoh karya jurnalistik pesantren yang sangat baik ini," katanya.

Pihaknya menegaskan pentingnya dakwah melalui media ini karena menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Apalagi, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dan perubahan masyarakat sudah tidak diragukan lagi kiprah positifnya di tengah-tengah masyarakat. "Untuk itu, tidak hanya dakwah bil qoul yang dikembangkan, tetapi dakwah bilqalam, yakni dakwah melalui tulisan majalah ini juga harus dikembangkan lebih baik lagi di masa mendatang," ujarnya.

Ketua Tim PM-D Minan Jauhari, M.Si menegaskan pihaknya akan terus memberikan dampingan sebagai bentuk pengabdian hingga majalah yang kedua terbit sebagai bentuk nyata dari program penguatan tersebut. Salah satu yang mendesak untuk dilakukan adalah menyiapkan tenaga-tenaga layout melalui penguatan di bidang keterampilan mengoperasikan program semacam Adobe dan CorelDraw. "Pelatihan ini akan terus berkelanjutan sampai nanti terbit majalah dengan kekhasan pesantren Miftahul Ulum Suren, Kecamatan Ledokombo," tegasnya.

C. Kemandirian Komunitas Dampingan

Pada tahap ini kelompok dampingan bersama dengan tim pengabdian menerbitkan majalah BUSUR 23 untuk edisi kedua, sebagai prosesnya kelompok dampingan dalam jedah waktu lima belas hari menginfentarisr tulisan baik berupa tulisan berita, artikel, kiat, tips dan juga kreasi pusis dari kalngan santri baik putra maupun putri. Selanjutnya kelompok dampingan yang dikoordinir oleh salah seorang santri yang bernama Eko menyerahkan semua tulisan kepada tim pendamping untuk dilakukan proses evaluasi tulisan. Dalam hal ini tim pendamping membaca semua tulisan kemudian memberikan catatannya.

Berikut beberapa catatan yang telah dibuat oleh tim pendamping untuk disampaikan kepada kelompok dampingan. Semisal tulisan tentang : *Antara Keteladanan dan Kepemimpinan* yang ditulis oleh Siti Fatimatuz Zahro dan Vina

Rizqiyatul Imamah[103].

---

[103] Contoh Tulisan Santri dalam Majalah BUSUR 23, dengan Tema : ***Keteladanan dan Kepemimpinan.***

Keteladanan mempunyai pengaruh yang besar bagi setiap kehidupan dalam pembentukan kepribadian seseorang. Sebab, pada hakikatnya, kehidupan manusia dimulai dari keteladanan yang diberikan seseorang yang mempengaruhi orang lainnya. Bahkan, dapat dikatakan, seluruh makhluk hidup di dunia selalu belajar tindakan kehidupannya dengan cara meniru. Untuk itu, keteladanan yang baik dari seseorang pemimpin merupakan hal yang sangat penting dalam menanamkan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Keteladanan dan kepemimpinan adalah dua sisi yang selalu diperlukan dalam kehidupan manusia. Sebab, pemimpin menjadi sumber keteladanan bagi manusia lainnya.

Menurut Shoni Rahmatullah Amrozi, keteladanan dan kepemimpinan yang utama bagi seorang muslim bersumber dari Baginda Rasulullah SAW. Manusia yang dipilih oleh Alah itu adalah seorang pemimpin sekaligus teladan bagi ummatnya dan manusia di seluruh dunia. Dia mencontohkan keteladanan dan kepemimpinan Rasulullah yang didasari prinsip shiddiq, amanah, tablig, fathonah, yang melahirkan kepemimpinan yang dapat menjadi teladan bagi umatnya sepanjang masa. "Bangunan kepemimpinan Rasulullah SAW. Dapat diumpamakan sebagai bangunan yang indah itu. Perumpamaan ini hanya untuk memudahkan kita melihat pola kepemimpinan Baginda," katanya.

Berdasarkan prinsip kepemimpinan Rosulullah SAW, kata dia, maka kepemimpinan masa kini perlu melakukan perubahan-perubahan dalam meningkatkan konsep kepemimpinannya. Sebab, saat ini, keberadaan pemimpin bisa diibaratkan mengalami kekosongan karena tidak semua pemimpin dapat menjadi teladan bagi umatnya. Ada sejumlah pemimpin yang justru memberikan teladan yang buruk di tengah-tengah masyarakat. "Mengenai kepemimpinan adalah kosong dan belum memilih model yang pasti dalam menjalankan basis kepemimpinan," katanya.

Bagi seorang muslim, kepemimpinan merupakan amanah. Untuk itu, lanjut dia, sebagai seorang muslim, sebelum menjalankan model kepemimpinan yang baik,, hendaknya terlebih dahulu

memohon petunjuk Allah SWT. Maka, jikalau jawaban Allah SWT, usaha kita sampai pada tangga kejayaan tetap harus dilandasi oleh pola fikir yang netral, kosong, dan jauh dari sikap" memastikan kehendak pribadi." "Ini karena, sangat mungkin dalam perjalanan kepemimpinan terjadi banyak perubahan. Sikap kosong, patuh, tunduk kepada-Nya, sambil berusaha secara optimum inilah yang dapat menghasilkan sesuatu justru tidak pernah terpikir oleh kita," katanya.

Rahamtullah mencontohkan, peraturan disekolah maupun dipesantren adalah salah satu usaha yang dapat membentuk pola kepemimpinan anak didik. Hal ini dapat dimulai dengan penanaman kedisiplinan, yang secara tidak langsung tumbuh dalam diri seseorang. Kedisiplinan salah satunya dapat diperoleh dengan memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggar peraturan. Hanya saja, tidak setiap sanksi akan berdampak pada kedisiplinan seseorang. "Memberi sanksi terhadap seseorang yang melanggar peraturan secara fisik, bukan suatu usaha yang baik untuk menumbuhkan kedisiplinan dalam diri seseorang" tuturnya.

Dikatakan, usaha yang dapat menangani seseorang yang tervonis salah dapat dilakukan dengan memberi bimbingan yang positif, memberi solusi yang dapat dijadikan motivasi, memberi pelayanan yang intensif , dan menanamkan nilai-nilai luhur dalam diri seseorang. Keempat langkah itulah yang dapat menumbuhkan sikap disiplin bagi pelajar yang melakukan pelangaran.

Menurut Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Suren K. Miftahul Arifin S.Th.I, bangunan kepemimpinan itu dimulai dari adanya hidayah yang diberikan oleh Allah SWT. Pada kenyataannya, tidak semua manusia dapat menjadi pemimpin yang dikehendaki oleh rakyatnya. Hal inilah yang harus diletakkan dalam kerangka hidayah. "(kepemimpinan, Red) kepada siapapun yang Dia kehendaki. Diatas faktor hidayah itulah, didirikan suatu bangunan kepemimpinan seseorang. Tanpa adanya hidayah ini, mustahil dapat berdiri bangunan kepemimpinan," katanya.

Keberlangsungan kepemimpinan seseorang berikutnya, kepemimpinan harus dibangun atas dasar *asas keimanan dan keteladanan.* Jika asas ini kukuh, maka kukuh pulalah bangunan kepemimpinan seseorang, sebaliknya jika asasnya rapuh, maka rapuh

Sebagai Catatan yang dapat disampaikan oleh tim pendamping adalah :

Tentang Who (siapa) sumber beritanya, perlu didalami siapa Soni Rahmatullah, jabatannya, umurnya berapa, asal lahirnya dari mana.....termasuk sosok kyai yang menjadi kepala madrasah agar identitas sumber berita lebih lengkap dan menarik......

Berdasarkan catatan, keteladanan merupakan seorang pemimpin menjadi sangat penting dalam menanamkan merupakan berasal dari kata teladan yakni hal-hal yang dapat ditiru dan dicontoh oleh masyarakat, berprestasi dalam berbagai hal, berbasis qur'ani, dapat mempertahankan nilai, norma, dan tradisi luhur. Tanpa ada keteladanan maka ruh-ruh dari pendidikan akan hilang , karna secara tidak langsung keteladanan itu mendidik umat manusia, memanusiakan manusia dengan memberikan contoh yang husnul khotimah bagi setiap umat manusia. Pihak yang di mungkinkan akan di tiru semestinya selalu tampil sebagai teladan yang baik agar mereka yang meniru mendapatkan contoh yang baik untuk di

---

pula bangunan tersebut. "Untuk tegaknya suatu bangunan, maka diperlukan tiang-tiang kejujuran, akhlakul karimah, tanpa adanya perilaku jujur dan akhlak yang baik, tidak akan ada bangunan kepemimpinan," katanya.

Hanya saja, menurut K Miftahul Arifin, setiap pemimpin itu belum tentu teladan, namun teladan itu adalah sang juara dalam kepemimpinan. Setiap orang pasti mempunyai impian untuk menjadi pemimpin yang berwawasan, berintegrasi tinggi. Namun hal itu tidak cukup untuk memenuhi syarat kepemimpinan. Seperti halnya simbol kepemimpinan dari Rasulullah SAW, beliau adalah *uswatun hasanah* bagi seluruh umat manusia, baik dalam berperilaku maupun memimpin.

Written by : Siti Fatimatuz Zahro & Vina Rizqiyatul Imamah

tiru. Cara berpakaian, aktif, dan kreatif juga dapat mempengaruhi nilai keteladanan seseorang.

Banyak pihak yang semestinya memberikan figur teladan yang baik. Seperti contoh kepala keluarga menjadi figur teladan bagi anak dan isterinya. Semua pemikiran, ucapan,dan tindakan yang di lakukan oleh kepala keluarga akan menjadi pusat perhatian bagi anggota keluarganya. Bisa dibayangkan betapa hebatnya akibat yang ditimbulkan dari sebuah keteladanan. Jika kepala keluarga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan sunah-sunah, maka dalam suatu keluarga tidak akan terbangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Selain kepala keluarga, Guru juga harus memberikan teladan yang baik bagi para siswanya. Walaupun guru bukan orang tua dari diri sendiri, tapi mereka adalah figur teladan yang baik bagi para siswa di sekolah. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pemimpin tidak cukup hanya dengan kepandaian, dan ketegasan, namun juga harus bisa memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Keteladanan mampu mempengaruhi orang lain yang berbeda latar belakang, budaya, karakter, watak, lingkungan, dan pengetahuan. Sayangnya, saat ini generasi mengalami kritis keteladanan, terutama keteladanan seorang figur pemimpin.

Selanjutnya tim pendamping melakukan dampingan hingga pada proses layout. Beberapa tujuan yang ingin diperoleh pada proses ini, diantaranya: *Pertama,* Setidaknya kelompok dampingan memiliki kemandirian untuk dapat menerbitkan majalah dengan lebih baik lagi pada edisi berikutnya, *Kedua,* Dengan kemandirian pada diri kelompok dampingan, setidaknya kelompok dampingan dapat

memanfaatkan majalah BUSUR 23 sebagai media alternative guna untuk kepentingan pelaksanaan dakwah Islam, dan *Ketiga* Dengan kemandirian pada penerbitan majalah BUSUR 23 ini diupayakan bisa menjadi media yang cukup strategis bagi kalangan santri untuk memperkaya kasanah keilmuannya.

Bab VI
PENUTUP

Perkembangan media di Indonesia saat ini sudah semakin maju. Bahkan dunia cetak perlahan-lahan mulai beralih ke dunia digital dan elektronik. Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan media memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat di dunia media massa. Tidak heran jika perkembangan media saat ini (khususnya di Indonesia) juga dijejali dengan pesatnya perkembangan dunia infotaiment di sejumlah media bahkan berita-berita seputar gosip di media massa dinilai lebih laku bila dibandingkan dengan pemberitaan yang memiliki nilai edukasi. Tidak heran jika media massa banyak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Akibatnya kepentingan masyarakat luas nyaris terabaikan. Karenanya dalam pandangan mazhab kritis melihat bahwa media massa selalu dirasakan sebagai alat yang "powerfull" dan ada ideologi dominan di dalamnya.

Realitas arus informasi yang dinilai timpang Penguasaan media yang sangat kuat di tangan segelintir orang akan menciptakan situasi arus informasi yang tidak seimbang, yang lebih jauh akan mengancam demokrasi di negara yang bersangkutan. Setidaknya realitas hegemoni media ini tidak terlepas dari dua aspek, yaitu ekonomi dan politik. Aspek ekonomi terkait dengan pengaruh ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap negara-negara Barat penguasa ekonomi dan politik dunia. Negara-negara tersebut merupakan pengusung dari ideologi pasar bebas yang berkeinginan untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan bagi pelaku usaha untuk menciptakan kompetisi terbuka di antara mereka.

Sebagai salah satu klien, Indonesia mau tidak mau mengikuti apa yang telah menjadi garis kebijakan ekonomi mereka. Ideologi pasar ini merasuk pula ke bidang media dimana media massa telah berfungsi sebagai sebuah industri, melalui produksi pesan yang dipasarkan secara komersial. Kondisi demikian mau tidak mau menggiring bidang media massa untuk berorientasi memperoleh keuntungan dagang. Orientasi pada keuntungan semacam ini merupakan gambaran dari model kapitalis pasar.

Seiring dengan fenomena perkembangan media "arus utama"yang dinilai belum dapat menjadi media yang sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Selanjutnya harapan keberpihakan itu dapat berpaling pada media-media alternatife yang dinilai masih murni memiliki visi yang lebih jelas.

Buku tentang Jurnalisme Pesantren ini muncul sebagai penjabaran dalam ranah kajian tentang repons atau reaksi terhadap fenomena media kekinian. Media alternatif bisa menjadi suara alternatif ditengah suara-suara media arus utama yang dikontrol oleh media korporat. Media alternatif mencoba menyuarakan dialog publik dan member ruang bagi kaum pinggiran atau marjinal ditengah-tengah dominasi wacana arus-utama.

Dipertegas bahwa media massa pesantren memiliki misi yang jelas dalam manajemen media massanya, yakni mengemban dakwah Islam yang ramah. Tentu saja, dalam menjalankan tugasnya, media massa pesantren tidak bisa dilepaskan dengan fungsi-fungsi media massa sehingga dapat menjadi media massa alternatif yang memiliki kekuatan untuk membangun kekuatan pesantren. Fungsi utama media jurnalistik yang harus diperankan oleh media massa pondok pesantren adalah sebagaimana yang dijelaskan Muhtadi[1] bahwa secara umum media massa, baik media cetak maupun elektronik, memiliki fungsi yang sama, yaitu: *pertama*, menyiarkan informasi. Ini merupakan fungsi utama media massa sebab masyarakat membeli media tersebut karena memerlukan informasi tentang berbagai hal yang terjadi di dunia ini. *Kedua*, mendidik. Media massa menyajikan pesan-pesan atau tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga dapat dijadikan media pendidikan massa. *Ketiga*,

[1] Asep Saiful Muhtadi, *Komunikasi Dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 77.

menghibur. Media massa biasanya menyajikan rubrik-rubrik atau program-program yang bersifat hiburan. Hal ini dihidangkan memang sengaja untuk menghibur atau yang lebih penting lagi untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel-artikel yang dapat menguras perhatian dan pikiran pembaca. *Keempat*, memengaruhi. Melalui fungsinya yang keempat ini pers memegang peranan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat

Disisi yang lain, jurnalisme pesantren sebagai media alternatif ini merupakan bagian dari bentuk bentuk perlawanan yang sering muncul dalam bentuk alternatif. Karenanya sebagai penegasan, tim penulis menyertakan rangkuman proses pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang penguatan dakwah melalui jurnalisme santri di PP Miftahul Ulum Jember. Harapannya rekaman proses pengabdian ini bisa menambah data konsep buku tentang jurnalisme pesantren. []

Daftar Pustaka

Anam, Faris Khoirul. 2009. *Fikih Jurnalistik: Etika Kebebasan Pers Menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kaustar.

Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Balai Pustaka.

Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik*, Jakarta: Erlangga.

Biagi, Shirley. 2010. *Media/ Impact: Pengantar Media Massa*, Jakarta: Salemba Humanika.

Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.

Djuroto, Totok, Drs. 2002. *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Djuraid, Husnun. 2006. *Panduan Menulis Berita: Pengalaman Lapangan Seorang Wartawan*. Malang; UMM Press.

Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Effendy, Onong Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju.

Eksan, Moch. 2009. *Dari Bom Bali Sampai Kuningan*. Jember: LPM Filantropy Studies dan Pena Salsabila.

Haryanto, Ignatius. 2014. *Jurnalisme Era Digital: Tantangan Industri Media Abad 21.* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Ishwara, Luwi. 2007. *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Gray, Jerry D. 2006. *Dosa-Dosa Media Amerika*. Jakarta: Ufuk Press.

Kasman, Suf. 2004. *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-prinsip Dakwah bi Al Qalam dalam Al Quran*. Jakarta: Teraju.

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2014. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhtadi, Asep Saiful. 2012. *Komunikasi Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. 2008. *Komunikasi Massa: Kontroversi, Teori, dan Aplikasi*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Mulyana, Deddy (Edt). 2013. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurudin. 2013. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Romli, Asep Syamsul, M., 2001. *Jurnalistik Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Romli, Asep Syamsul M. 2005. *Jurnalistik Terapan*. Bandung: Batic Press.

Rubent, Brent D. Dan Lea P. Stewart. 2014. *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Samovar, Larry A., Richard E. Porter, dan Edwin R. McDaniel. 2014. *Komunikasi Lintas Budaya*. Jakarta: Salemba Humanika.

Setiati, Eni. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Soehoet, Hoeta, A.M., 2003. *Dasar-Dasar Jurnalistik*. Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta-IISIP.

Sobur, Alex. 2009. *Etika Analisis Teks Media*. Bandung: PT Reaja Rosdakarya.

Sholeh, Badrus (edt). 2007. *Budaya Damai Komunitas Pesantren*. Jakarta: LP3ES.

Suhandang, Kustadi. 2010. *Pengantar Jurnalistik*. Bandung: Nuansa.

Wahid, Abdurrahman. 1999. *Pondok Pesantren Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Wazis, Kun, 2012. *Media Massa dan Konstruksi Realitas*. Malang: Aditya Media Publishing.

__________, 2013 *Laporan Penelitian,* "Konstruksi Realitas Pesantren di Media Massa: Analisis Framing Berita Pondok Pesantren di wilayah Jember, Bondowoso, dan Lumajang pada koran Radar Jember Jawa Pos Group Edisi 2012, STAIN Jember

Wibowo, Wahyu. 2009. *Menuju Jurnalisme Beretika, Peran Bahasa, Bisnis, dan Politik di Era Mondial*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Tentang Penulis

Tim Penulis adalah Tim Pengabdian tentang penguatan dakwah melalui jurnalisme warga (Citizen Jurnalism) berbasis Santri pada Pondok Pesantren Pinggiran Kabupaten Jember. Tim terdiri dari empat orang yang dinilai memiliki basis keilmuan yang relevan dibidan Ilmu Dakwah dan Komunikasi, secara rinci masing-masing adalah sebagai berikut :

Minan Jauhari, S.Sos.I., M.Si. adalah Dosen Tetap Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) IAIN Jember, yang bersangkutan selain mengampu mata kuliah public relations, filsafat komunikasi, retorika dan beberapa mata kuliah lainnya sebelumnya juga memiliki pengalaman jurnalistik dibeberapa media massa, yang bersangkutan pernah tercatat sebagai reporter kontrak radio prosalina

FM, reporter Radio Best FM, Selain itu yang bersangkutan saat ini juga dipercaya sebagai penanggung jawab konten berita Website www.iain-jember.ac.id serta majalah kampus IAIN Jember, yaitu majalah Newsletter.

Muhibbin, S.Ag., M.Si adalah Dosen Tetap adalah Dosen Tetap Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Jember, yang bersangkutan selain mengampu mata kuliah ilmu komunikasi, metodologi penelitian juga saat ini aktif sebagai pengelola jurnal ilmiah al-adalah IAIN Jember, yang bersangkutan sebelumnya juga pernah sebagai pemimpin redaksi majalah araita IAIN Sunan Ampel Surabaya saat masih aktif sebagai mahasiswa, bekal pengtahuan dan kemampuan akademik yang dimiliki dinilai sangat relevan untuk mendukung pelaksanaan program pengabdian ini.

Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom, adalah Dosen Tetap Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Jember, yang bersangkutan selain sedang mengampu mata kuliah jurnalistik, teknik penulisan karya ilmiah dan beberapa mata kuliah lainnya, sebelumnya yang bersangkutan juga pernah aktif sebagai wartawan tetap jawa pos (Radar Jember). Pengalaman dan kemampuan akademik yang bersangkutan dapat mendukung pada rencana pelaksanaan program pengabdian masyarakat.

Dr. Sofyan Hadi, S.Sos.I., M.Pd adalah Dosen Tetap Prodi KPI Fakultas Dakwah IAIN Jember, yang bersangkutan selain mengampu mata kuliah Ilmu Dakwah dan beberapa mata

kuliah pendukung lain, saat ini juga tercatat sebagai ketua Prodi KPI Fakultas Dakwah IAIN Jember. Kemampuan dan Bekal Pengetahuan yang bersangkutan sangat menentukan terhadap pelaksanaan program pengabdian

RMI-NU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jurnalisme Pesantren

Perlawanan Alternatif Kaum Santri Terhadap Hegemoni Media Mainstream

Perkembangan media di Indonesia saat ini sudah semakin maju. Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan media memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat di dunia media massa. Tidak heran jika perkembangan media saat ini juga dijejali dengan pesatnya perkembangan dunia infotaiment di sejumlah media bahkan berita-berita seputar gosip di media massa dinilai lebih laku bila dibandingkan dengan pemberitaan yang memiliki nilai edukasi. dalam pandangan mazhab kritis melihat bahwa media massa selalu dirasakan sebagai alat yang "powerfull" dan ada ideologi dominan di dalamnya.

Seiring dengan fenomena perkembangan media sebagai "arus utama" informasi dinilai belum menjadikannya sebagai media yang sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Disinilah media alternatif memiliki posisi tawar yang cukup strategis, selanjutnya harapan keberpihakan itu dapat berpaling pada media-media alternatife yang dinilai masih murni memiliki visi yang lebih jelas.

Buku tentang Jurnalisme Pesantren ini muncul sebagai penjabaran dalam ranah kajian tentang repons atau reaksi terhadap fenomena media kekinian. Media alternatif bisa menjadi pilihan suara ditengah derasnya media arus utama yang dikontrol oleh media korporat. Media alternatif mencoba menyuarakan pesan-pesan bagi kaum pinggiran atau marjinal termasuk komunitas santri ditengah-tengah dominasi wacana arus-utama. Jurnalisme pesantren sebagai media alternative ini juga merupakan bagian dari bentuk perlawanan yang bisa dimunculkan oleh komunitas terpinggirkan. Sebagai penegasan konsep buku tentang jurnalisme pesantren, tim penulis menyertakan rangkuman proses pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang penguatan dakwah melalui jurnalisme santri yang pernah dilaksanakan di PP Miftahul Ulum Jember sebelumnya. Harapannya rekaman proses pengabdian ini bisa menambah data konsep buku tentang jurnalisme pesantren.

PUSTAKA PELAJAR
Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
e-mail:pustakapelajar@yahoo.com

IAIN JEMBER PRESS
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember 68136
Telp. 0331-487550 Fax. 0331-427005
email: iainjember.press14@gmail.com